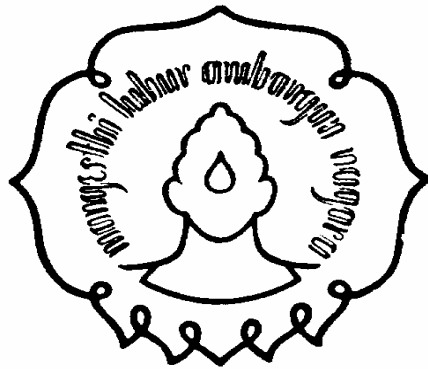


**Aksi buruh sobsi (sentral organisasi buruh seluruh
indonesia)**

Cabang madiun tahun 1957-1959



SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan

Guna Mencapai Gelar Sarjana Sastra

Jurusan Sejarah

Fakultas Sastra dan Seni Rupa

Oleh :

Lestari

C0500042

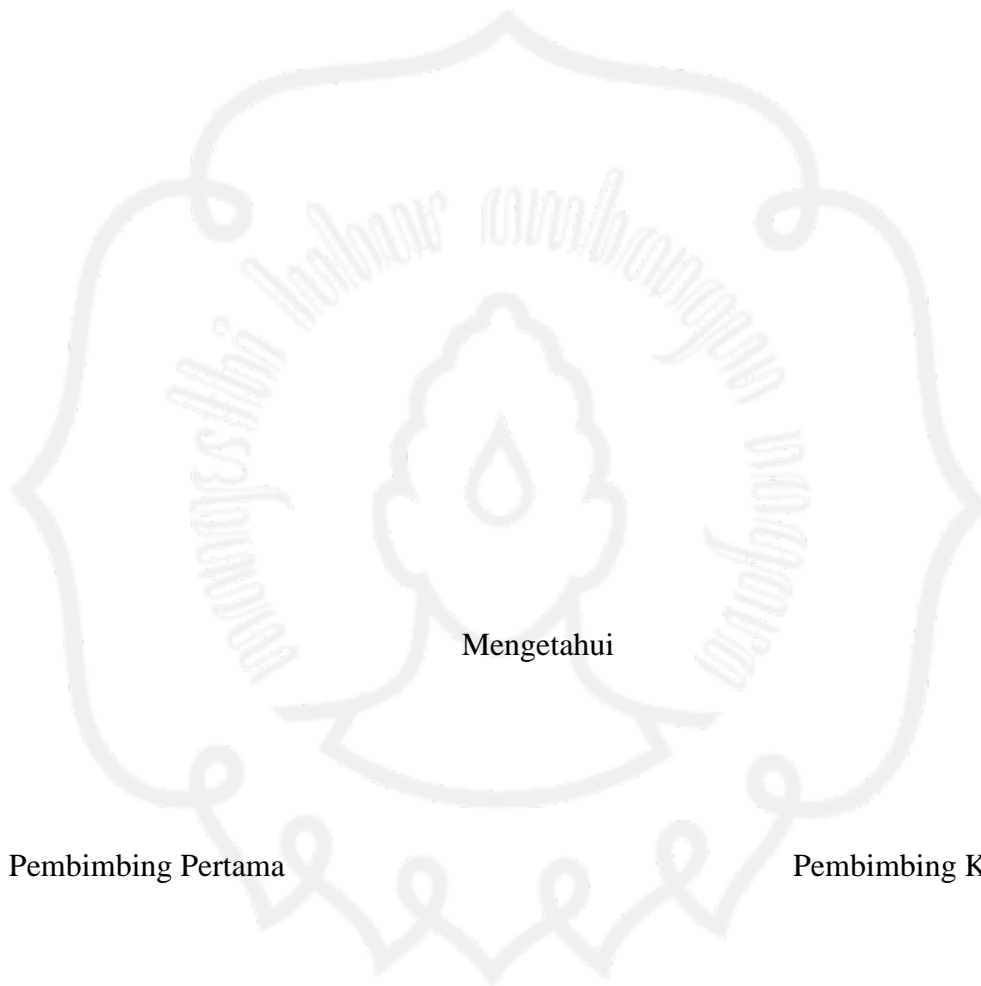
FAKULTAS SASTRA DAN SENI RUPA

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

SURAKARTA

2004

Disetujui untuk dipertahankan di hadapan
Panitia Penguji Skripsi Fakultas Sastra dan Seni Rupa
Universitas Sebelas Maret



Mengetahui

Pembimbing Pertama

Pembimbing Kedua

(Dra. Sri Sayekti, M.Pd.)
NIP. 131. 913.434

(Drs. Susanto, M.Hum)
NIP. 131. 792. 939

Diterima dan disetujui oleh Panitia Penguji
Fakultas Sastra dan Seni Rupa Universitas Sebelas Maret
Pada tanggal : 13 Maret 2004

Panitia Penguji

1. Drs. Sri Agus, M.Pd (_____)
Ketua Penguji NIP. 131. 633. 901
2. Drs. Wardo, M. Hum (_____)
Sekretaris Penguji NIP. 131. 633. 898
3. Dra. Sri Sayekti, M.Pd (_____)
Penguji I NIP. 131. 913. 434
- 4
4. Drs. Susanto, M.Hum (_____)
Penguji II NIP. 131. 792. 939

Dekan Fakultas Sastra dan Seni Rupa
Universitas Sebelas Maret
Surakarta

(DR. Maryono Dwirahardjo, SU.)
NIP. 130. 675. 147

MOTTO

- ❖ *“Historia Magistra Vitae”*
- ❖ *“Sesungguhnya di dalam sejarah itu terdapat pesan-pesan yang penuh perlambang bagi orang-orang yang dapat memahaminya.”*
 - ❖ *(QS.Yusuf : 112)*
- ❖ *“Ketahuilah bahwa bersama kesabaran ada kemenangan, bersama kesusahan ada jalan keluar dan bersama kesulitan ada kemudahan.”*
 - (HR. Tirmidzi)*
- ❖ *“One can not escape history” (Abraham Lincoln)*

PERSEMBAHAN

Ku persembahkan historiografi ini untuk :

- ❖ Ibunda tercinta
- ❖ Bapak
- ❖ Saudara-saudaraku (Mas Sugeng, Bang Goppar, Mas Sunar, Adik Anto)
- ❖ Almamater

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum, wr.wb.

Alhamdulillah. Puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah, inayah serta kenikmatan lahir dan batin sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Penulis menyadari bahwa keseluruhan hal yang telah dikorbankan selama ini, baik waktu, pikiran, perasaan, tenaga, dan biaya untuk penelitian ini pada hakikatnya tidak menjadi sesuatu yang berarti tanpa ridho-Nya. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Rasulullah, Muhammad SAW, keluarganya, para sahabat dan umatnya yang selalu istiqomah di jalan-Nya.

Serangkaian kerja keras dengan penggalan doa yang mengiringinya tidak akan berarti jikalau hasil ini tidak menjadi "ladang ilmu" yang dapat diambil hasilnya. Pengalaman menyusuri jalan panjang Ampera Raya dan panasnya kota Jakarta, berkutat dengan lembaran-lembaran usang yang tidak terhitung nilainya untuk "sekedar" mencari sepotong demi sepotong cerita lalu, serta menjelajah kota Madiun, menyibak penggalan-penggalan sejarah demi sebuah historiografi.

Berucap syukur dan terima kasih merupakan refleksi kekurangan dan kelemahan diri yang mengimbas pengakuan eksistensi orang lain. Merupakan sebuah kewajiban penulis untuk mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Maryono Dwirahardjo, SU, selaku Dekan Fakultas Sastra dan Seni Rupa Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah

memberikan izin penelitian dan pemenuhan fasilitas studi lainnya selama studi.

2. Bapak Drs. Sudarno, MA, selaku Pembantu Dekan I Fakultas Sastra dan Seni Rupa Universitas Sebelas Maret yang telah memberikan perizinan dan fasilitas bagi penulis untuk memperlancar penulisan skripsi.
3. Bapak Sri Agus, M.Pd., selaku Ketua Jurusan Sejarah Fakultas Sastra dan Seni Rupa Universitas Sebelas Maret Surakarta.
4. Ibu Sri Sayekti, M.Pd., selaku Dosen Pembimbing Pertama yang penuh ketelitian dan kesabaran serta nasihat yang berarti dalam memberikan pengarahan dan bimbingan sampai penulisan skripsi ini selesai.
5. Bapak Drs. Susanto, M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Kedua yang penuh kecermatan dan kedisiplinan dalam membimbing dan mengarahkan penulis serta memberikan nasihat-nasihat dan *untaian mutiara* pemikirannya yang begitu berarti bagi penulis sampai penulisan skripsi ini selesai.
6. Bapak Drs. Suharyana, M.Pd., selaku Dosen Pembimbing Akademis yang penuh ketulusan dan kesahajaan dalam membimbing dan mengarahkan penulis selama menempuh jenjang pendidikan di Jurusan Sejarah Fakultas Sastra dan Seni Rupa Universitas Sebelas Maret Surakarta.

7. Bapak Drs. Supriadi, M.Hum., yang memberikan *awan pencerahan* dan pengarahan bagi penulis dalam penulisan skripsi ini.
8. Bapak Tunjung, W. M.Si., yang telah memberikan semangat dan dorongan kepada penulis.
9. Seluruh dosen pengajar di Jurusan Ilmu Sejarah Fakultas Sastra dan Seni Rupa Universitas Sebelas Maret. Terima kasih atas bimbingannya selama ini.
10. Seluruh jajaran aparat komponen unsur pelengkap, Arsip Nasional Republik Indonesia, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Perpustakaan Fakultas Sastra dan Seni Rupa Universitas Sebelas Maret Surakarta, Perpustakaan Pusat Universitas Sebelas Maret Surakarta, Perpustakaan Nasional Museum Pers Surakarta, Perpustakaan Daerah Madiun, Perpustakaan Kotamadya Surakarta, KODIM 0803 Brawijaya Madiun Pabrik Gula Redjoagung Madiun, P.T KAI Madiun.
11. Bapak Marijoen Hardjoseomarto, eks pejuang veteran Madiun dan Bapak Saimin, eks Ketua Kesatuan Buruh Marhaenis Madiun yang telah membantu dalam memberikan informasi bagi penulisan skripsi.
12. Ibu, ayah, dan saudara-saudaraku (buat Mas Sugeng terima kasih atas semuanya, Bang Goppar, terima kasih atas komputernya, dan adik Anto atas doa-doanya selama ini.
13. Keluarga besarku di Jakarta (Om Sutar sekeluarga di Lebak Bulus, Pakdhe Warimin sekeluarga di Pluit, dan Om “Lucky” di Kebayoran)

Bang Andri Marinir di Wisma KKO Cilandak, dan tempatku berbagai cerita (dik Nurul). Terima kasih atas segalanya.

14. Sahabatku, saudaraku, sekaligus my angels Mbak Wiwit 'carmen tomboy' dan Mbak Dwi si kecil yang imut (my group of *Charlie Angels*). Thanks for everything, you are parts of my life.
15. Teman-temanku sekaligus sahabat-sahabatku di Sejarah 2000, Mas Taufiq yang lucu, imut dan penuh canda, buat Wahyu Win terima kasih mau menemaniku menjelajah Kota Madiun, Aris Pacitan "How are you?", Irwan yang sok *cool*, Pak Eko 'Doni' Ada Band, Shelly white, Dhenik dan keponakanku si kecil Nurul, Mu-mun yang imut, Udin, Gugun yang nggak gondrong, Agung 'ndut, Mas Alique, Sasongko-Saskia, buat 4 sekawan (Ajie, Doni, Gus Wid, dan si Encep), Fiera, *spice girls* (Mbak Putri 'Cui', Dhani, Yuni, dan Mbak Widi), Heles 'Ayuk', Mbak She Gie, Mbak Fitri, Rika, Mbak Vika, Si Mbah dhukun Si-Me (bagi-bagi ilmunya dong), dan yang lainnya yang tidak tercantum di sini. Terima kasih atas pertemanan dan persahabatannya selama ini, semoga persahabatan ini akan terus dan tetap terjalin.
16. Saudara-saudaraku di Sie Kerohanian Islam Fakultas Sastra dan Seni Rupa Universitas Sebelas Maret Surakarta dan di LSO PENERBITAN TAZKIA, ikhwahfillah di DPD PKS Kabupaten Wonogiri (bu Tuti, bu Aan, mbak Esthi, dik Menik, mbak Ermin, dan semuanya). Terima kasih atas ukhuwahnya dan doa-doanya selama ini.

17. Buat adik Wuyi sekeluarga dan teh Dea, serta *gang ijo*-nya (terima kasih segalanya), Mas Budi '97 atas dorongannya, Mas Joko'97 dan Bumi Manusia-nya, Mas Haryo'98, dan semua rekan-rekan sejarah di Fakultas Sastra dan Seni Rupa Universitas Sebelas Maret Surakarta.

18. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, semoga mendapat balasan kebaikan di kemudian kelak.

Penelitian ini memang jauh dari sempurna, baik secara intrinsik maupun ekstrinsik. Oleh karena itu saran dan kritik yang konstruktif sangat penulis harapkan. Akhirnya atas dasar ketulusan, penulis persembahkan karya ini dengan segala kekurangan, keterbatasan, dan kelebihannya. Semoga bermanfaat bagi dinamika keilmuan yang akan datang. Amien.

Wassalamu'alaikum, Wr. Wb.

Surakarta, Maret 2004

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR SINGKATAN	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xix
ABSTRAK.....	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian	13
D. Manfaat Penelitian	13
E. Tinjauan Pustaka	13
F. Metodologi Penelitian	17
1. Kajian Teori dan Pendekatan	17
2. Pengumpulan Data atau Sumber.....	20
a. Dokumen.....	20
b. Studi Pustaka	21

c. Wawancara	22
3. Teknik Analisa Data	23
G. Sistematika Penulisan Skripsi	23
BAB II SEJARAH LAHIRNYA SENTRAL ORGANISASI BURUH	
SELURUH INDONESIA (SOBSI)	25
A. Lahirnya Partai Politik Masa Kemerdekaan	25
B. Lahirnya Partai Buruh Indonesia dan Partai Sosialis	28
C. Lahirnya Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia	40
a. SOBSI sebagai Saluran Gerakan Buruh	40
b. Perpecahan dalam Tubuh SOBSI	48
c. Pemogokan Buruh	56
D. Peristiwa Madiun 1948	60
BAB III KEHIDUPAN PERBURUHAN MASA DEMOKRASI LIBERAL	
A. Kehidupan Perburuhan Indonesia	70
1. Kondisi Perburuhan di Madiun	72
a. Hubungan SOBSI dengan Serikat Buruh Non-SOBSI	75
b. Masalah Perburuhan	80
2. Undang-Undang Darurat No. 16 Tahun 1951	84
B. Kehidupan Ekonomi dan Politik di Madiun	89
C. Dukungan Partai Politik Terhadap Serikat Buruh	94

BAB IV AKSI PEMOGOKAN SOBSI CABANG MADIUN	
TAHUN 1957-1959	104
A. Latar Belakang Aksi Pemogokan SOBSI Tahun 1957-1959	104
1. Masalah Irian Barat	107
2. Pemberlakuan SOB	115
3. Gerakan Pembebasan Irian Barat	118
B. Aksi Pemogokan SOBSI Cabang Madiun	121
1. Pemogokan dan Pengambilalihan Oleh Buruh SOBSI	121
2. Larangan Aksi Pemogokan dan Pengambilalihan dari Penguasa Militer	124
3. Undang-Undang Nasionalisasi	129
C. Pengaruh Gerakan SOBSI Madiun Terhadap Kehidupan Politik dan Ekonomi Madiun	134
BAB V PENUTUP	146
Kesimpulan	146
DAFTAR PUSTAKA	152
DAFTAR INFORMAN	158
LAMPIRAN	159

DAFTAR SINGKATAN

Acoma	: Angkatan Communis Muda
AD	: Angkatan Darat
API	: Angkatan Pemuda Indonesia
Baperki	: Badan Permusyawaratan Kewarganegaraan Indonesia
BBI	: Barisan Buruh Indonesia
BBW	: Barisan Buruh Wanita
BKBI	: Badan Koordinasi Buruh Indonesia
BKS-Bumil	: Badan Kerja Sama Buruh Militer
BPBSI	: Badan Permusyawaratan Buruh Seluruh Indonesia
BPKNIP	: Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat
BTI	: Barisan Tani Indonesia
CC	: Central Commite
DI/TII	: Darul Islam/Tentara Islam Indonesia
DPRS	: Dewan Perwakilan Rakyat Sementara
FDR	: Front Demokrasi Rakyat
FNPIB	: Front Nasional Perjuangan Irian Barat
GASBI	: Gabungan Serikat Buruh Indonesia
Gasbiindo	: Gabungan Serikat Buruh Islam Indonesia
GASBRI	: Gabungan Serikat Buruh Revolusioner Indonesia
GBI	: Gabungan Buruh Indonesia
Gerindo	: Gerakan Rakyat Indonesia

GPPS	: Gerakan Pembela Panca Sila
GRR	: Gerakan Revolusi Rakyat
GSBV	: Gabungan Serikat Buruh Vaksentral
HSSBI	: Himpunan Serikat-Serikat Buruh Indonesia
ICOSS	: Ikatan Central Organisasi Serikat Sekerja
IPKI	: Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia
ISDV	: Indische Sociaal Democratische Vereniging
KAA	: Konferensi Asia Afrika
KB	: Kweekschool Bond
KMB	: Konferensi Meja Bundar
KSAD	: Kepala Staf Angkatan Darat
LBI	: Laskar Buruh Indonesia
Masyumi	: Majelis Syuro Muslimin Indonesia
MIAI	: Majelis Islam A'la Indonesia
NICA	: Nederlands Indies Civil Administration
NU	: Nahdlatul Ulama
ORB	: Opium Regie Bond
ORBU	: Organisasi Buruh Umum
Paras	: Partai Rakyat Sosialis
Parkindo	: Partai Kristen Indonesia
Parpol	: Partai Politik
Parsi	: Partai Sosialis Indonesia
PB	: Partai Buruh

PBB	: Perserikatan Bangsa-Bangsa
PBI	: Partai Buruh Indonesia
PBP	: Perkoempoelan Boemipoetra Pabean
PBST	: Persatoean Beambte Spoor en Tram
PDKSI	: Persatuan Djuru Kesehatan Seluruh Indonesia
PERBUM	: Persatuan Buruh Minyak
Permai	: Persatuan Marhaen Indonesia
Permesta	: Perjuangan Rakyat Semesta
Perti	: Persatuan Tarbiyah Islamiyah
PFB	: Personel Fabriek Bond
PGB	: Persatoean Goeroe Bantoe
PGHB	: Perserikatan Goeroe Hindia Belanda
PGTI	: Persatuan Guru Teknik Indonesia
PIR	: Partai Indonesia Raya
PKBO	: Perhimpoean Kaoem Boeroeh Onderneming
PKBT	: Perhimpunan Kaum Boeroeh dan tani
PKI	: Partai Komunis Indonesia
PKT	: Perhimpoean Kaoem Tani
PNI	: Partai Nasional Indonesia
PNS	: Perserikatan Normal School
POB	: Persatuan Organisasi Buruh
PPDI	: Persatuan Pamong Desa Indonesia
PPPB	: Persatuan Pegawai Pegadaian Boemipoetra

PPPRI	: Persatuan Pegawai Polisi Republik Indonesia
PPTI	: Partai Persatuan Tharikat Islam
PRD	: Partai Rakyat Desa
PRIM	: Partai Rakyat Indonesia Merdeka
PRN	: Partai Rakyat Nasional
PRRI	: Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia
PSI	: Partai Sosialis Indonesia
PSII	: Partai Serikat Islam Indonesia
PSO	: Persatoean School Opziener
PSOBSI	: Pusat Sementara Organisasi Buruh Seluruh Indonesia
PVPN	: Persatoean Vakbonden Pegawai Negeri
RI	: Republik Indonesia
SARBUMIKSI	: Serikat Buruh Minyak Kelapa Seluruh Indonesia
Sarbumusi	: Serikat Buruh Muslimin Indonesia
SARBUPRI	: Serikat Buruh Perkebunan Republik Indonesia
SBBRN	: Serikat Buruh Biro Rekonstruksi Nasional
SBBSI	: Serikat Buruh Bank Seluruh Indonesia
SBBT	: Serikat Buruh Bea dan Tjukai
SBDPR	: Serikat Buruh Djawatan Pertanian Rakyat
SBG	: Serikat Buruh Gula
SBGSDN	: Serikat Buruh Garam dan Soda Dalam Negeri
SBII	: Serikat Buruh Islam Indonesia
SBIM	: Serikat Buruh Industri Metal
SBKA	: Serikat Buruh Kereta Api
SBKB	: Serikat Buruh Kendaraan Bermotor

SBKUGT	: Serikat Buruh Kantor Urusan Gerakan Tani
SBPI	: Serikat Buruh Percetakan Indonesia
SB-Postel	: Serikat Buruh Pos Telegrap Telepon dan Radio
SBPP	: Serikat Buruh Pelabuhan dan Pelayaran
SBPPK	: Serikat Buruh Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan
SBPU	: Serikat Buruh Pekerjaan Umum
SERBAUD	: Serikat Buruh Angkatan Udara
SI	: Sarekat Islam
SKBI	: Serikat Kaoem Boeroeh Indonesia
SOB	: Staat van Orlog Beleg
SOBRI	: Sentral Organisasi Buruh Republik Indonesia
SOBSI	: Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia
SSBRI	: Serikat Sekerja Bank Rakyat Indonesia
SSKIN	: Serikat Sekerja Kementerian Islam Negara
SSKPM	: Serikat Sekerja Kabinet Perdana Menteri
STII	: Sarekat Tani Islam Indonesia
TNI	: Tentara Nasional Indonesia
TRI	: Tentara Rakyat Indonesia
UUDS	: Undang-Undang Dasar Sementara
VIPBOUW	: Vereniging van Indlansch Persneel Burhelijk Openbare Warken
VSTP	: Vereniging Spoor-Traam Personen
WFTU	: World Federation of Trade Union

LAMPIRAN

LAMPIRAN I : Daftar Informan

LAMPIRAN II : Arsip atau Dokumen

ABSTRAK

Lestari, NIM. C0500042, Aksi Buruh SOBSI (Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia) Cabang Madiun. Skripsi Jurusan Ilmu Sejarah Fakultas Sastra dan Seni Rupa Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui ; 1) mengapa SOBSI dijadikan sebagai saluran gerakan buruh, 2) kehidupan perburuhan di Indonesia dan Madiun pada khususnya, 3) bagaimana aksi gerakan SOBSI Madiun dan pengaruh gerakan SOBSI terhadap kehidupan politik-ekonomi Madiun.

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode historis. Dalam studi ini dilakukan dengan cara studi arsip (dokumen), studi pustaka, dan wawancara. Data yang diperoleh dikritik, baik secara intern maupun ekstern, sehingga menghasilkan fakta-fakta sejarah. Fakta sejarah tersebut kemudian diinterpretasikan dan disusun dalam bentuk cerita sejarah atau historiografi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa aksi pemogokan buruh yang tergabung dalam SOBSI Cabang Madiun dilatarbelakangi oleh beberapa faktor. Masalah Irian Barat yang tidak memperoleh kesepakatan melalui forum KMB menjadikan serikat-serikat buruh untuk melakukan aksi pembebasan Irian Barat. Selain itu juga didorong oleh ketidakpuasan buruh terhadap upah yang diterima, kesewenang-wenangan majikan, dan semakin meluasnya monopoli asing di Indonesia dan aksi itu memuncak setelah tewasnya tujuh orang rakyat Indonesia di Irian Barat karena kekejaman Belanda. Aksi-aksi dilakukan melalui pemogokan buruh yang bekerja pada perusahaan-perusahaan Belanda. Aksi tersebut diikuti dengan mengambilalih semua aset-aset dan perusahaan-perusahaan Belanda. Akan tetapi aksi-aksi pemogokan buruh pada akhirnya dilarang oleh Penguasa Militer dengan alasan bahwa aksi-aksi buruh tersebut membuat kondisi Indonesia semakin kacau, khususnya pada perekonomian negara. dan disinyalir bahwa aksi tersebut di bawah pengaruh sayap kiri melalui serikat buruhnya yang direpresentasikan oleh SOBSI.

Aksi-aksi pemogokan oleh serikat buruh SOBSI Cabang Madiun pada akhirnya dibubarkan oleh militer dan semua perusahaan-perusahaan yang telah diambilalih oleh buruh diambilalih penangannya oleh militer, karena di sinyalir bahwa aksi-aksi oleh serikat buruh SOBSI tersebut bukan murni semata, tetapi ada tujuan lain yaitu bahwa komunis di belakang itu semua. Dari hasil penelitian juga diperoleh bahwa dengan adanya aksi pemogokan serikat buruh SOBSI, kehidupan perekonomian Madiun tidak begitu terpengaruh dan masyarakat tetap beraktifitas sebagaimana biasanya, tetapi aksi tersebut bagaimanapun juga menimbulkan ketegangan-ketegangan dalam masyarakat.

Gerakan yang dilakukan oleh SOBSI melalui aksi pemogokan adalah bukan suatu gerakan yang direncanakan, tetapi terjadi karena dipicu oleh beberapa faktor yang semakin memuncak, sehingga meledak dalam suatu bentuk aksi pemogokan.

BAB I PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Sejak Proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia menghadapi permasalahan politik yang cukup kompleks. Dalam mempertahankan kemerdekaan yang telah diproklamasikan, bangsa Indonesia harus menempuh perjalanan yang sangat sukar, berliku-liku, dan penuh rintangan. Sejak Nederlands Indies Civil Administration (NICA) bersama-sama dengan pasukan Sekutu mendarat di Indonesia pada bulan September 1945, Belanda tidak bersedia melepaskan Indonesia sebagai negeri jajahan yang telah dikuasainya selama lebih dari tiga ratus tahun dan berusaha untuk menegakkan kembali pemerintahan Hindia Belanda di Indonesia.

Selama perjuangan, selain menghadapi musuh dari pihak Belanda, dalam tubuh bangsa Indonesia sendiri secara tidak terduga telah muncul kericuhan-

kericuhan yang sangat menyedihkan. Ketegangan dan permusuhan yang telah berlangsung lama antara beberapa golongan politik sangat merintang jalannya roda pemerintahan. Partai-partai lahir berkat adanya maklumat dari pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 3 November 1945. Kurang disadari bahwa dengan lahirnya partai-partai politik baru tersebut juga menimbulkan ketegangan yang dapat mengganggu persatuan bangsa. Apalagi ditambah dengan silih bergantinya kabinet dalam pemerintahan yang juga membawa pengaruh bagi kestabilan negara. Dengan adanya maklumat pemerintah yang berakibat bagi munculnya berbagai partai politik. Partai-partai baru tersebut antara lain Partai Nasional Indonesia (PNI), Masyumi, Partai Sosialis (PS), Partai Buruh Indonesia, dan Partai Komunis Indonesia (PKI).

Pada tanggal 15 September 1945, grup Menteng 31 mendirikan Barisan Buruh Indonesia (BBI) yang merupakan organisasi buruh pertama untuk tugas-tugas perjuangan. Di kota-kota lain timbul pula BBI yang menjadi pelaksanaan dalam pengambilalihan instansi-instansi dari Jepang. BBI semakin kuat karena Iwa Kusuma Sumantri selaku Menteri Sosial hanya mengakui bahwa BBI satu-satunya organisasi buruh di Indonesia.¹

BBI mengadakan kongres di Solo pada bulan November 1945. Kongres tersebut terdapat perbedaan pendapat, yaitu sejumlah pimpinan menginginkan agar BBI menjadi sebuah partai dan ikut dalam pemilihan umum. BBI pun akhirnya berubah menjadi partai, yaitu Partai Buruh Indonesia (PBI), tetapi sejumlah cabang tidak mau peduli dengan putusan tersebut dan akhirnya

keputusan tersebut dikoreksi lagi sehingga hasilnya yaitu PBI didirikan oleh BBI, sedangkan BBI tetap berdiri.

Di Indonesia pada waktu itu terdapat tiga buah partai yang berdasar *Marxisme*, yaitu PKI, PS, dan PBI. Kelompok komunis Indonesia, di samping mendirikan partai, mereka juga mendirikan organisasi-organisasi pemuda, buruh, tani, laskar, dan gerakan-gerakan massa lain yang dapat mendukung cita-cita kaum komunis dalam masyarakat.

BBI berganti nama menjadi GASBI (Gabungan Serikat Buruh Indonesia) pada tanggal 21 Mei 1946, namun demikian, persoalan-persoalan mengenai perburuhan masih kurang diperhatikan. Dalam situasi seperti itu terjadi perpecahan dalam tubuh GASBI karena golongan *Vaksentral* keluar dan mendirikan GSBV (Gabungan Serikat Buruh Vaksentral). Namun akhirnya kedua golongan tersebut dapat disatukan kembali dalam wadah yang bernama Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia (SOBSI) tanggal 29 November 1946. Kaum komunis pada tahun-tahun sesudah kemerdekaan menunjukkan keseriusannya dalam membina buruh-buruh Indonesia. Secara kecil-kecilan pendidikan kader-kader *Marxist* telah dimulai di Madiun di bawah pimpinan Moewaladi dan Abdurahman (eks-Nefis dan eks. Let. Laut AL Belanda).² Pada tahun 1948 terdapat keinginan di kalangan partai-partai kiri untuk bersatu dan menjadikan PKI sebagai pelopor gerakan kelas buruh dan pelopor perlawanan terhadap kolonial.

¹ Soe Hok Gie, *Orang-orang di Persimpangan Kiri Jalan. Kisah Pemberontakan Madiun September 1948*, (Yogyakarta : Bentang, 1997), hal.79

² Soe Hok Gie, *Op.Cit*, hal. 85

SOBSI yang menjadi tulang punggung PKI merupakan gerakan buruh terbesar. Sebagai organisasi gabungan, SOBSI didukung oleh berbagai serikat pekerja dari berbagai lapisan, seperti Serikat Pekerja Bea Cukai, Jawatan Pertanian Rakyat, Serikat Buruh Pendidikan dan Pengajaran dan Kebudayaan, Serikat Buruh Garam dan Soda Negeri, Persatuan Pamong Desa Indonesia, Organisasi Buruh Umum, Serikat Buruh Kehewan, Serikat Buruh Kantor Urusan Gerakan Tani Indonesia, Persatuan Juru Kesehatan Seluruh Indonesia, Serikat Buruh Pos Telegraf, Serikat Buruh Kereta Api, Serikat Buruh Kendaraan Bermotor, Serikat Buruh Pelabuhan dan Pelayaran, Serikat Buruh Angkatan Udara. SOBSI juga terlibat dalam proklamasi Madiun 1948.³

Pengaruh komunis yang paling kuat terutama berakar pada organisasi BTI (Barisan Tani Indonesia) dan SOBSI. Pengaruh itu terlihat dalam Pemogokan di Delanggu. Pemogokan Delanggu berawal dari persoalan tanah dan tuntutan upah yang lebih baik serta adanya kekurangan-kekurangan dalam bidang pangan dan sandang. Pemogokan tersebut dipimpin oleh Lembaga Buruh Tani yang bernaung di bawah SOBSI. Sebelum kedatangan Musso, sewaktu pergolakan di Delanggu, FDR (Front Demokrasi Rakyat) atau PKI dengan hati-hati telah menerima suatu posisi yaitu mendukung aksi-aksi pemogokan yang didasarkan atas tuntutan-tuntutan pekerja. FDR mengemukakan bahwa pemogokan adalah senjata buruh yang terakhir. Tindakan pemogokan di Delanggu tersebut atas nama hak-hak buruh, dikecam oleh golongan-golongan lain.

³ Cahyono, *Perburuhan dari Masa ke Masa : Jaman Kolonial Belanda sampai Orde Baru-1998*, Paper dipersiapkan untuk IUF Indonesia Project, Bandung 18 Juni 2002, diakses dari www.geocities.com/penebar/essay/kronikperburuhan.htm.

Sifat buruh gerakan kiri antara lain memang berusaha mempertentangkan kelas buruh dan kelas pengusaha (kapitalis). Sifat gerakan buruh kiri tersebut membuat kekhawatiran kelompok Islam dan Angkatan Darat, karena gerakan-gerakan buruh tidak lagi murni berasal dari buruh, tetapi sudah bercampur dengan kepentingan-kepentingan tertentu atau kepentingan sekelompok golongan. Gerakan buruh di bawah Masyumi, Gasbiindo (Gabungan Serikat Buruh Islam Indonesia) menginginkan perbaikan nasib buruh yang murni dan bertujuan pada keharmonisan, bukan untuk politik, sehingga dapat dikatakan bahwa hubungan SOBSI dengan buruh lain terutama dari kelompok Islam kurang harmonis karena banyak perbedaan pendapat, apalagi dari kelompok militer yang memang menganggap SOBSI adalah musuh karena SOBSI adalah serikat buruh kiri .

Pemogokan menjadi sesuatu yang sudah melekat di kalangan buruh. Selain pemogokan Delanggu, terjadi juga pemogokan di pusat penyulingan minyak di Cepu, suatu basis PKI, yang terjadi pada awal September. Alasan pemogokan ini bukan semata-mata karena ekonomi, tetapi juga politis. Ketegangan juga terjadi di Madiun. Pada tanggal 23 Juli 1948, Wirosudarno seorang buruh kereta api ditembak oleh seorang tentara. Kemudian terjadi lagi pemukulan seorang buruh Kantor Balai Kota Madiun oleh seorang perwira. Peristiwa-peristiwa tersebut diprotes oleh SBKA (Serikat Buruh Kereta Api) dan (SOBSI), maka dari peristiwa itu membuat hubungan antara tentara dengan golongan kiri semakin memburuk. Selain itu di Madiun juga terjadi suatu pemogokan oleh pegawai

administrasi kotapraja yang dimulai pada tanggal 13 September 1948 dengan alasan perlakuan kasar terhadap pekerja oleh anggota-anggota tentara.⁴

Peristiwa Madiun 1948 membawa pengaruh terhadap sikap serikat-serikat buruh dalam mengarahkan perjuangannya, sehingga hal itu berpengaruh juga bagi persatuan dalam SOBSI. Perpecahan dalam tubuh SOBSI tidak dapat dihindarkan. Satu demi satu anggotanya keluar karena mereka tidak menyukai sikap SOBSI yang terlalu jauh melibatkan diri dalam persoalan politik. Setelah keluar dari SOBSI, mereka mendirikan Gabungan Serikat Buruh Revolusioner Indonesia (GASBRI). Hal itu semakin menambah lemahnya kekuatan SOBSI, ditambah lagi dengan tertangkapnya tokoh-tokoh PKI.

Pada tahun 1950, Indonesia berada dalam periode Demokrasi Liberal yang ditandai dengan dominannya peranan partai politik dalam kehidupan politik. Dengan keadaan politik yang demikian ini tidak mengherankan apabila tercermin dalam perjuangan kaum buruh, serikat-serikat buruh pun tumbuh dengan pesat. Hal itu juga dimungkinkan karena adanya peraturan dari Menteri Perburuhan No.90 tahun 1955⁵ yang kemudian berpengaruh pula pada SOBSI yang telah bangkit kembali setelah Peristiwa Madiun 1948. Setelah PKI di bawah pimpinan D.N. Aidit dan kemenangan PKI dalam pemilu 1955 juga memberi dukungan terhadap perkembangan buruh.

⁴ Anthoni J.S. Reid, *Revolusi Nasional Indonesia*, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1996), hal.237.

⁵ Peraturan Menteri Perburuhan No. 90 tahun 1955, ayat 2 dalam buku *Indonesia dan Pembaharuan Gerakan Buruh di Hubungan Perburuhan Pancasila* oleh Sukarno, (Jakarta), hal. 10.

Kemenangan PKI dalam pemilu 1955 mempertegas dan melengkapkan rasa kekecewaan masyarakat yang memungkinkan timbulnya suatu krisis politik, karena mengingat bahwa PKI ketika itu baru saja sembuh dari pukulan-pukulan yang dideritanya dalam Peristiwa Madiun 1948. Kondisi politik Indonesia pada masa Demokrasi Parlementer tidak stabil. Berbagai peristiwa politik terjadi pada masa ini dan mempengaruhi jalannya pemerintahan. Dengan dikeluarkannya Konsepsi Presiden pada tahun 1957 cukup membawa pengaruh bagi kestabilan negara. Konflik bermunculan di mana-mana, maka melihat situasi yang demikian itu Presiden Sukarno segera memutuskan untuk memberlakukan SOB (*Staat van Orlog on van Beleg*) atau negara dalam keadaan bahaya pada bulan Maret 1957. Dikeluarkannya SOB mengakibatkan peranan militer semakin luas. Situasi negara yang gawat bertambah gawat karena persoalan sengketa Irian Barat antara Indonesia dan Belanda yang merupakan akibat dari gagalnya Konferensi Meja Bundar (KMB). Belanda telah melanggar perjanjian dalam KMB dengan menolak melanjutkan negoisasi Irian Barat dan justru memasukkan wilayah tersebut ke dalam konstitusi sebagai wilayah Belanda.⁶

Meskipun secara teoretis dapat dikatakan bahwa setelah kemerdekaan, Indonesia memiliki peralatan untuk melucuti ekonomi kolonial dan menggantikannya dengan ekonomi nasional, tetapi dengan apa yang disetujui dalam KMB sebenarnya Indonesia tidak dapat berbuat apa-apa. Bahkan dominasi perusahaan Belanda begitu kuat sehingga berdampak pada terhambatnya pembangunan di Indonesia. Untuk mendapatkan sumber-sumber dana

⁶ W.F. Wertheim, *Masyarakat Indonesia dalam Transisi. Studi Perubahan Sosial*,

pembangunan pada waktu itu tidak terbuka jalan lain kecuali secara selektif atau seluruhnya menyita modal asing dan perusahaan-perusahaan asing terutama milik Belanda.⁷

Ketika persoalan Irian Barat yang diajukan oleh Indonesia sekali lagi gagal dalam memperoleh dukungan dalam pemungutan suara di PBB tanggal 29 November 1957, Indonesia mempunyai alasan politik untuk mengambilalih seluruh kepentingan ekonomi Belanda dan menaruhnya langsung dalam manajemen pemerintahan Indonesia. Bahkan melalui Kabinet Djuanda dilancarkanlah aksi-aksi pembebasan Irian Barat dari tangan Belanda. Aksi tersebut didukung oleh segenap golongan. Di berbagai daerah, rakyat melancarkan aksi unjuk rasa, sedangkan di perusahaan-perusahaan milik Belanda terjadilah aksi pemogokan oleh buruh yang tergabung dalam SOBSI.

Telah disebutkan, bahwa aksi pemogokan dan pengambilalihan terhadap perusahaan-perusahaan Belanda terjadi di berbagai daerah, demikian halnya aksi pemogokan buruh di bawah SOBSI juga terjadi di Madiun. Gerakan-gerakan dan aksi-aksi tersebut kemudian menjadi pengambilalihan terhadap perusahaan-perusahaan Belanda yang diawali pada bulan Desember 1957. Tindakan pengambilalihan ini sesuai pula dengan kebijaksanaan pokok dalam bidang

(Yogyakarta : PT. Tiara Wacana Yogya, 1999), hal. 290.

⁷ Daniel Dhakidae, *Nasionalisme dalam Proses Mencari Arti, dalam : Menguak Mitos-Mitos Pembangunan*, (Jakarta : Gramedia, 1986), hal. 65-67.

perekonomian, yaitu dipercepatnya pelaksanaan dasar-dasar ekonomi nasional yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia.⁸

Sementara itu tindakan pengambilalihan kekuasaan dan akhirnya menasionalisasikan perusahaan-perusahaan Belanda berdasar Undang-Undang No. 86 Tahun 1958 tentang “Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Belanda di Indonesia yang dikeluarkan tanggal 27 Desember 1958 yang berlaku surut hingga 3 Desember 1957⁹ tersebut juga berpengaruh pada kondisi perekonomian Indonesia. Dengan adanya berbagai aksi pengambilalihan oleh segenap golongan juga menyebabkan situasi moneter semakin kritis. Aksi-aksi yang digerakkan oleh buruh yang bekerja pada perusahaan-perusahaan Belanda termaksud dengan sendirinya menimbulkan kekacauan dan kelumpuhan di sektor produksi dan distribusi yang sangat mencemaskan masyarakat dan merugikan perekonomian.¹⁰ Maka pada tanggal 5 Desember 1957, Menteri Kehakiman G.A. Maengkom mengumumkan, setiap pengambilalihan sewenang-wenang perusahaan Belanda yang dilakukan oleh serikat buruh tersebut bertentangan dengan hukum yang ada. Hanya tindakan yang diambil oleh Penguasa Militer Pusat atau Penguasa Militer Daerah untuk mengawasi dan melindungi perusahaan Belanda demi keamanan dan ketertiban dapat dibenarkan. Juga pada tanggal 10 Desember 1957, Kepala Staf Angkatan Bersenjata, selaku Penguasa Militer Pusat mengeluarkan sebuah

⁸ Keterangan Pemerintah Tentang Perjuangan Irian Barat. Penerbitan Khusus No. 2., (Jakarta : Kementerian Penerangan RI, 1958), hal. 11.

⁹ Lembaran Negara No. 162 Tahun 1958

¹⁰ Oey Beng To, *Sejarah Kebijakan Moneter Indonesia Jilid I 1945-1958* (Jakarta: Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia, 1991), hal. 313.

peraturan yang ditujukan kepada segenap Penguasa Militer Daerah untuk mengambilalih pelaksanaan semua perusahaan Belanda yang ada dalam masing-masing wilayah militer atas nama Republik Indonesia.¹¹

Aksi-aksi yang tergabung dalam SOBSI seperti Serikat Buruh Kereta Api Bengkel Madiun yang juga melakukan aksi pemogokan terhadap perusahaan-perusahaan Belanda juga mendapat larangan keras dari Menteri Pertahanan RI (Penguasa Militer). Akan tetapi mereka tidak sepenuhnya mentaati larangan dari penguasa militer tersebut, karena dari pandangan Serikat Buruh Kereta Api Bengkel Madiun bahwa larangan aksi pemogokan bagi kaum buruh adalah kurang memberikan dorongan untuk lebih maju guna memenuhi rencana pembangunan nasional. Selain itu buruh juga menginginkan agar perusahaan-perusahaan Belanda segera dinasionalisasikan dengan sikap lebih tegas, karena sikap kurang tegasnya pemerintah terhadap pengambilalihan perusahaan-perusahaan Belanda itu merugikan kaum buruh pada khususnya dan rakyat Indonesia pada umumnya, baik dalam bidang ekonomi maupun politik.¹² Oleh karena itu dengan caranya sendiri, buruh-buruh yang tergabung dalam SOBSI cabang Madiun tersebut melancarkan aksi pemogokan terhadap perusahaan-perusahaan Belanda.

Oleh karena itu maka dalam nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda tidak lepas dari campur tangan militer, karena mengingat bahwa hubungan antara militer dengan buruh terutama SOBSI sejak lama memang tidak harmonis.

¹¹ Karl J. Pelzer, *Sengketa Agraria*, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1991), hal. 205-206.

¹² Arsip Konstituante RI No. 111 Tahun 1957.

Apalagi mengingat dengan adanya SOB, militer semakin menguasai sektor ekonomi dan terbuka kesempatan-kesempatan ekonomi yang baru dan luas bagi para perwira tentara. Dalam tindakan melawan PKI dan golongan nasionalis kiri, tentara dengan segera memanfaatkan kekuasaan darurat perang untuk menempatkan seluruh perusahaan bekas milik Belanda ke bawah pengawasan tentara, kemudian setelah menasionalisasi perusahaan-perusahaan itu, para perwira AD meneruskan dalam hal pengelolaan.¹³

Militer turun tangan dalam rangka penyelamatan perekonomian negara agar tidak jatuh ke tangan komunis, sehingga mereka terlibat dalam nasionalisasi. Dari uraian di atas sangatlah menarik untuk mengkaji mengenai gerakan SOBSI dalam konteks perburuhan di Madiun pada masa nasionalisasi, yaitu kurun waktu antara 1957-1959. Madiun sendiri pada permulaan masa revolusi, perkembangan politik dalam karesidenan ini telah berada di bawah dominasi kelompok-kelompok perjuangan yang berorientasi pada Partai Sosialis. Mereka secara dominan mewarnai pergerakan pemuda setempat. Dukungan terhadap golongan kiri dalam karesidenan ini berasal dari serikat-serikat dagang, terutama dari serikat-serikat perkeretaapian yang kuat, serikat-serikat buruh perkebunan, dan serikat pegawai pemerintahan.¹⁴ Berangkat dari fenomena tersebut, maka sangatlah menarik untuk lebih lanjut mengkaji tentang perburuhan terutama SOBSI di Madiun, apakah aksi-aksi yang dilancarkan oleh buruh pada masa

¹³ Harold Crouch, *Militer dan Politik di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Harapan, 1986), hal. 37-38

tersebut semata-mata karena masalah Irian Barat antara Indonesia dan Belanda ataukah ada tujuan lain, maka dari semua itu perlu pegkajian lebih lanjut.

B. Rumusan Masalah

Gerakan SOBSI di Madiun 1957-1959 di sini adalah gerakan buruh yang tergabung dalam SOBSI dalam aksi-aksi yang dilancarkan untuk mengambilalih dan menasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda. Aksi-aksi tersebut terjadi di berbagai daerah yang di dukung oleh segenap lapisan masyarakat. Gerakan pemogokan dan pengambilalihan terhadap perusahaan-perusahaan Belanda tersebut sebagai akibat dari gagalnya KMB yang berimplikasi pada sengketa Irian Barat antara Indonesia dengan Belanda. Oleh karena itu untuk menyelamatkan Indonesia dari tangan kolonial, maka aksi-aksi pemogokan dan pengambilalihan terjadi.

Serikat-serikat buruh juga tidak ketinggalan dalam aksi tersebut. Serikat-serikat buruh terutama dari SOBSI juga paling keras dalam melaksanakan gerakan pemogokan. Pengkajian ini, yaitu mengkaji mengenai gerakan buruh yang bernaung di bawah SOBSI cabang Madiun yang berada di garis depan dalam pelaksanaan aksi-aksi pemogokan. Hal yang menarik dari gerakan buruh SOBSI Madiun adalah karena tidak terlepas dari latar belakang SOBSI sendiri yang merupakan organisasi buruh sayap kiri bentukan PKI. Melihat latar belakang SOBSI cabang Madiun sendiri, menarik untuk dikaji lebih lanjut bagaimana gerakan SOBSI Madiun itu dalam melancarkan aksi-aksinya.

¹⁴ David Charles Anderson, *Peristiwa Madiun 1948. Kudeta atau Konflik Internal Tentara?* (Jakarta : Media Pressindo, 2003), hal. 50-51.

Benarkah semata-mata karena masalah Irian Barat, yaitu untuk menyelamatkan perekonomian negara dari tangan kapitalis ataukah aksi-aksi tersebut mempunyai tujuan lain.

Berangkat dari semua uraian di atas, maka perlu pengkajian lebih lanjut mengenai gerakan buruh SOBSI serta di sini juga akan menjelaskan bagaimana sebenarnya hubungan SOBSI sendiri dengan buruh-buruh lain, apakah murni perjuangan SOBSI adalah menyuarakan suara buruh. Bertolak dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, perumusan masalahnya adalah sebagai berikut :

1. Mengapa SOBSI dijadikan sebagai saluran gerakan buruh ?
2. Bagaimana kehidupan perburuhan di Indonesia pada umumnya dan di Madiun pada khususnya ?
3. Bagaimana aksi gerakan SOBSI di Madiun dan pengaruhnya bagi kehidupan politik ekonomi Madiun ?

C. Tujuan Penelitian

Bertolak dari latar belakang dan permasalahan yang telah diungkapkan, maka penelitian ini diarahkan pada tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui mengapa SOBSI dijadikan sebagai saluran gerakan buruh.
2. Untuk bagaimana kehidupan perburuhan di Indonesia pada umumnya dan di Madiun khususnya.
3. Untuk mengetahui aksi gerakan SOBSI Madiun dan pengaruh gerakan SOBSI terhadap politik-ekonomi Madiun.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi perkembangan ilmu sejarah, terutama mengenai gerakan buruh di Indonesia pada tahun 1957-1959.
2. Penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan bahan masukan bagi peneliti lain yang hendak melakukan penelitian sejenis.

E. Tinjauan Pustaka

Setengah abad lebih sebelum Lenin mendirikan negara komunis pertama, tepatnya tahun 1848, dua orang berkebangsaan Jerman, Karl Marx dan Frederich Engels, mengeluarkan sebuah pamflet, yaitu Manifesto Partai Komunis. Manifesto memuat pernyataan klasik teori sejarah *Marxis*, yaitu bahwa sejarah semua masyarakat merupakan sejarah perjuangan kelas, kelas tertindas melawan kelas penindas. Marx dan Engels meramalkan bahwa keruntuhan kelas borjuis (pemilik modal) dan kemenangan kelas proletar (buruh) sama-sama tak terelakkan. Tujuan jangka dekat kaum komunis oleh Marx dan Engels disebutkan yaitu sama dengan tujuan semua kaum proletar lainnya, yaitu pembentukan proletar menjadi satu kelas, penggulingan kekuasaan borjuis, perebutan kekuasaan politik oleh proletar.¹⁵ Buku karya Solzhenitsyn, Milovan

¹⁵ Karl Marx dan F. Engels, *Manifesto of The Communist*, terjemahan oleh DN.Aidit dkk, Departemen Agiprop CCPKI, hal 68 dalam buku *Menyibak Tirai Komunisme*.

Djilas serta James Monahan membahas bagaimana teori Marxis dalam buku *Menyibak Tirai Komunisme*.

Untuk mengkaji tentang masalah buruh, terutama perkembangan serikat buruh di Indonesia dapat dikaji dalam bukunya Bambang Setiaji yang berjudul *Ekonomi Serikat Buruh di Indonesia*. Dalam buku ini dibahas tentang masalah buruh yang merupakan salah satu bagian penting dalam kehidupan perekonomian. Dibahas juga perkembangan buruh dari masa ke masa, mulai dari jaman kolonial hingga reformasi. Disebutkan pula dalam buku ini bagaimana serikat-serikat buruh yang berkembang dari masa ke masa yang diantaranya adalah SOBSI.

Dalam bukunya Soe Hok Gie yang berjudul *Orang-Orang di Persimpangan Kiri Jalan, Kisah Pemberontakan Madiun September 1948*, juga menjelaskan secara detail tentang sejarah terbentuknya SOBSI yang merupakan organisasi bawah bentukan PKI yang dibentuk untuk mewujudkan cita-cita komunis. Dibicarakan juga bagaimana Peristiwa Madiun 1948 itu dan keterlibatan SOBSI di dalamnya. Buku ini juga banyak memaparkan bagaimana pergerakan kelompok kiri atau komunis dalam mengepakkan sayapnya. Di sini juga paling banyak dibahas tentang peristiwa Madiun itu sendiri yang oleh Soe Hok Gie secara detail menuliskan apa sebenarnya peristiwa Madiun yang militer ikut juga di dalamnya.

Negara Madiun? Kesaksian Soemarsono Pelaku Perjuangan karya Hersri Setiawan berisi tentang apa peristiwa Madiun itu sebenarnya, terutama kesaksian dari pelaku sejarah dalam peristiwa itu. Hersri menuliskan dalam buku

ini, bahwa Peristiwa Madiun tidak direncanakan untuk menggulingkan pemerintah Hatta-Sukiman. Peristiwa itu terjadi semata-mata bertolak dari langkah untuk mencegah pelaksanaan program Re-Ra dan menghentikan ofensif reaksioner pemerintah, Nasution-Siliwangi, dan Masyumi-Murba. Dalam buku ini juga menjelaskan bagaimana konflik antara PKI dengan militer.

Pemogokan buruh menjadi satu permasalahan yang luas, bahkan pemogokan juga berpengaruh besar dalam pergerakan politik di Indonesia. Hal itu menimbulkan pertanyaan, mengapa gerakan buruh dapat menjadi militan dan mendapat simpati yang luas dan kekuatan manakah yang mendukung dan mengendalikan gerakan buruh. Tampaknya itulah yang diungkap dalam buku *Ketika SARBUPRI Mengguncang Pabrik Karung Delanggu 1948* karya Drs.Sarjana Sigit Wahyudi, M.S. Buku ini membahas lebih dalam bagaimana Pemogokan Delanggu, yaitu pemogokan oleh buruh SARBUPRI yang dibalik itu semua ternyata ada kelompok lain yang mendukungnya. Pemogokan Delanggu tersebut diangkat sebagai permulaan dari Pemberontakan Madiun 1948.

Peristiwa Madiun 1948 Kudeta atau Konflik Internal Tentara, karangan David Charles Anderson juga membahas Peristiwa Madiun 1948 itu sendiri yang disebut-sebut sebagai krisis politik sosial dalam negeri paling serius yang dihadapi pada masa revolusi kemerdekaan. Bagaimana Madiun dijadikan basis dari gerakan sayap kiri atau komunis. Selain itu, di sini juga dijelaskan rentetan atau kronologis kejadian-kejadian hingga terjadi dan bermuara dalam peristiwa

Madiun yang juga oleh David Charles Anderson disebutkan bahwa peristiwa Madiun tidak lepas dari konflik internal tentara sendiri.

Dalam *Sengketa Agraria. Pengusaha Perkebunan Melawan Petani* oleh Karl J. Pelzer juga membahas tentang nasionalisasi. Bagaimana masalah Irian Barat yang menjadi sengketa antara Indonesia dan Belanda. Maka akibat masalah Irian Barat tersebut menimbulkan aksi-aksi pengambilalihan terhadap perusahaan-perusahaan Belanda di Indonesia. Aksi-aksi dari buruh dan organisasi massa tersebut menuntut nasionalisasi semua perusahaan Belanda demi kemajuan revolusi.

Sukarno, *Indonesia dan Pembaharuan Gerakan Buruh di Hubungan Perburuhan Pancasila*. Buku ini berisi mengenai perkembangan buruh dari masa ke masa serta bagaimana gerakan buruh-buruh di Indonesia serta perkembangannya.

Dari buku- buku tersebut, semuanya telah dikaji sebagai bahan masukan dalam penelitian ini dan yang sesuai atau relevan dengan tema penulisan.

F. Metodologi Penelitian

1. Kajian Teori dan Pendekatan

Penelitian ini adalah penelitian sejarah dengan mengangkat tema sejarah pergerakan dilihat dari perspektif sosial, politik, dan ekonomi. Penekanan penelitian dalam studi ini adalah menganalisa gerakan buruh pada masa 1957-1959.

Teori yang coba digunakan untuk melihat gerakan massa adalah berasal dari Neil J. Smelser, yaitu "*Theory of Collective Behaviour*".¹⁶ Smelser berpendapat bahwa mobilisasi massa berpijak atas dasar suatu belief atau keyakinan dan gejala sosial itu dapat berwujud perilaku yang tidak terlembaga seperti pergerakan utopis, mesianistis, pemberontakan, serta revolusi. Keyakinan untuk ikut dalam gejala sosial oleh Smelser disebut *generalized belief*. *Generalized belief* tersebut dapat berupa ;

- a. histeria, yaitu bersifat panik (panic rumors)
- b. keinginan yang melahirkan sifat keranjingan
- c. permusuhan, yaitu melahirkan upaya mengkambinghitamkan orang lain atau tindak kekerasan pada orang lain
- d. berorientasi terhadap norma yang berupa gerakan reform/ norm oriented movement
- e. berorientasi terhadap nilai atau value oriented movement

Smelser kemudian menunjukkan bahwa gejala sosial dapat terjadi jika terdapat sejumlah faktor penentu atau *Necesssary Conditions*, yaitu ;

- a. *Structural conduciveness*, yaitu bahwa adanya suatu struktur sosial yang mendukung lahirnya suatu gejala.
- b. *Structural strain*, yaitu adanya ketegangan struktural yang timbul.
- c. *The spread of generalized belief*, yaitu tersebarnya keyakinan umum yang dianut. Situasi harus dibuat bermakna bagi para pelaku potensial, sumber ketegangan dan cara menghadapinya harus diidentifikasi.

¹⁶ Neil .J. Smelser, *Theory of Collective Behaviour*, (New York : The Free Press, 1968)

- d. *The precipitating factor*, yaitu faktor pencetus atau faktor pemercepat yang berupa sesuatu yang dramatik.
- e. *Mobilization into action*, yaitu suatu mobilisasi untuk bertindak. Peranan seseorang sangat menentukan. Situasi dapat berkembang dari kepanikan, timbulnya permusuhan dan kemudian diteruskan dengan agitasi untuk reform/revolusi.
- f. *The operation of social control*, yaitu pengoperasian kontrol sosial/ faktor penentu yang berbalik mencegah, mengganggu, membelokkan, merintangai gejala-gejala dengan cara mencegah terjadinya episode gejala sosial dan mobilitas alat-alat negara setelah gejala sosial mulai terjadi.

Perilaku kolektif tersebut bersifat spontan, emosional, dan dalam suasana yang saling bertentangan serta tidak teratur. Smelser mengungkapkan bahwa keenam faktor tersebut di atas harus saling mendukung dan terkait satu sama lain. Selain itu, teori lain yang juga dapat digunakan adalah **teori konflik** dari Berghe. Sumber konflik menurut Berghe antara lain adalah benturan kepentingan politik, ideologi, dan agama. Konflik tersebut biasa muncul dalam *patron –client*. Benturan ini akan menjurus ke perubahan-perubahan struktural. Misalnya adalah pemogokan buruh. Dahrendorf melalui teori konflik juga menyatakan bahwa sumber konflik antara lain adalah karena adanya perbedaan kepentingan antara kelompok yang menguasai dengan kelompok yang dikuasai.

Dengan memahami bahwa peristiwa-peristiwa masa lampau sebagai fakta sejarah yang masih memerlukan tahapan-tahapan proses, dibutuhkan metode dan pendekatan agar menjadi konstruk atau bangunan sejarah yang memperhatikan aspek ruang dan waktu beserta kausalitasnya, maka digunakan metode dan pendekatan historis. Menurut Nugroho Notosusanto, metode sejarah adalah :

“Merupakan kumpulan prinsip-prinsip atau aturan yang sistematis dimaksudkan untuk memberikan bantuan secara efektif di dalam usaha

*mengumpulkan bahan-bahan bagi sejarah, menilai secara kritis dan kemudian menyajikan dalam bentuk tertulis”.*¹⁷

Dari penjelasan tersebut, metode sejarah mempunyai empat tahapan proses penelitian. Proses pertama adalah melakukan heuristik yang merupakan langkah awal dalam penelitian sejarah. Heuristik adalah proses mencari dan menemukan sumber-sumber atau data-data. Dalam studi ini penulis melakukan proses heuristik dengan mencari dokumen-dokumen atau arsip-arsip yang relevan dengan penelitian. Tahapan yang kedua adalah melakukan kritik sumber. Tahapan ini bertujuan untuk mencari otentisitas atau keaslian data-data yang diperoleh melalui kritik intern dan ekstern. Kritik intern dilakukan untuk mencari keaslian isi sumber (data), sedangkan kritik ekstern bertujuan untuk mencari keaslian sumber.

Proses selanjutnya adalah interpretasi, yaitu penafsiran terhadap fakta-fakta yang dimunculkan dari data-data yang sudah terseleksi dengan disesuaikan pada tema yang dibahas. Dalam studi ini, proses penafsiran atau interpretasi memegang peranan yang sangat penting karena akan menjadi tulang punggung penulisan studi ini. Langkah terakhir adalah historiografi. Historiografi adalah penulisan sejarah sebagai proses akhir dari studi sejarah.¹⁸ Dalam studi ini, historiografi dilakukan dalam bentuk penulisan skripsi.

Pendekatan sejarah yang dipakai dalam penelitian ini menggunakan pendekatan sosial politik. Studi ini bukan hanya menggambarkan apa dan kapan peristiwa sejarah itu terjadi, tetapi juga mengidentifikasikan masalah bagaimana dan faktor-faktor apa yang menyebabkan peristiwa itu terjadi.

2. Teknik Pengumpulan Data atau Sumber

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data atau sumber yang berupa studi dokumen, studi pustaka, dan wawancara.

(a). Studi Dokumen

¹⁷ Nugroho Notosusanto, *Masalah Penelitian Sejarah, Suatu Pengalaman*, (Jakarta : Yayasan Idayu, 1978), hal. 11.

¹⁸ Sartono Kartodirjo, *Pemikiran dan Perkembangan Historiografi Indonesia*, (Jakarta : Gramedia, 1982).

Dalam penelitian sejarah penggunaan dokumen adalah penting. Dokumen diartikan sebagai jejak yang tertinggal dan dapat dilacak, sebab peristiwa atau kejadiannya telah berlangsung. Studi bahan dokumen bertujuan untuk memperoleh dokumen yang berkaitan dengan peristiwa-peristiwa yang benar-benar berkaitan dengan penelitian. Dokumen berfungsi menyajikan data, untuk menguji dan memberikan gambaran kepada teori, sehingga akan memberikan fakta untuk memperoleh pengertian historis tentang fenomena yang unik.¹⁹

Leopold van Ranke mengatakan bahwa “sejarah baru mulai apabila dokumen dapat dipahami, lagipula banyak dokumen yang dapat dipercaya”. Meskipun ucapan ini tidak dapat diartikan secara harfiah, namun teranglah bahwa terutama dalam metode sejarah konvensional, ucapan itu dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu penelitian sejarah pada akhir abad ke-14 terutama berpusat pada studi sumber-sumber sejarah tertulis. Sesungguhnya apa yang pokok bagi penelitian sejarah ialah bukti-bukti, berkas-berkas atau kesaksian-kesaksian.²⁰

Dokumen atau arsip yang digunakan dalam penelitian antara lain : Arsip Konstituante tahun 1956-1959, Arsip SOBSI (1950-1965), Inventaris Arsip Kabinet Presiden (1950-1959), Arsip Kementerian Pertahanan RI, Lembaran Negara RI.

(b). Studi Pustaka

¹⁹ Sartono Kartodirjo, *Op. Cit.*

²⁰ _____, *Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah*, (Jakarta: Gramedia, 1993), hal. 3.

Studi pustaka merupakan bahan pelengkap dalam penelitian ini. Sumber pustaka yang digunakan dalam penelitian ini hanyalah yang terkait dengan tema penelitian. Hal itu dilakukan untuk mendapatkan pemahaman teori dan konsep yang diperlukan dalam penelitian, sehingga dalam penelitian ini dapat diuji kebenarannya serta mencapai hasil yang maksimal dan akurat. Studi pustaka dapat melalui buku-buku, majalah atau sejenisnya.

Studi pustaka dilakukan di Perpustakaan Pusat Universitas Sebelas Maret Surakarta, Perpustakaan Fakultas Sastra dan Seni Rupa UNS, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Perpustakaan Arsip Nasional Republik Indonesia, Perpustakaan Daerah Wonogiri, Perpustakaan Kotamadya Surakarta, Perpustakaan Nasional Museum Pers Surakarta, Perpustakaan Daerah Kota Madiun.

(c). Wawancara

Wawancara adalah percakapan seseorang dengan orang lain dengan tujuan tertentu, yaitu mendapatkan keterangan atau pendirian secara lisan dari yang diwawancarai. Wawancara dilakukan melalui dua tahap, yaitu terhadap informan yang dirasa dapat mengetahui peristiwa tersebut dan yang kedua wawancara dengan informan yang dipilih berdasarkan keterlibatan dan pengetahuannya dengan peristiwa atau hal-hal yang berkaitan dengan data-data yang diperlukan.

Wawancara tersebut dilakukan kepada Marijoen Hardjosoemarto yang merupakan eks Pejuang Veteran 12.012.884 serta Saimin yang merupakan eks Ketua Kesatuan Buruh Marhaenis (KBM). Mereka berdua tinggal di Madiun.

3. Teknik Analisa Data

Teknik yang digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah analisis historis kritis dengan maksud akan berusaha menguraikan setiap kejadian dan mendeskripsikan dalam jalinan kausalitas atau sebab akibat peristiwa tersebut secara kronologis. Pada tahap selanjutnya akan dilakukan eksplanasi atau menerangkan setiap kejadian secara lebih mendalam berdasarkan analisis yang ada. Data-data yang tersedia akan menjadi hidup dan tajam apabila analisis peneliti terhadap sumber yang ada sangat kritis. Sumber yang hidup dan tajam tersebut nantinya akan menentukan seberapa bermutunya tulisan yang disajikan.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk memudahkan dalam penulisan ini dan agar lebih sistematis, maka uraiannya dibagi dalam beberapa bab, yaitu :

BAB I Pendahuluan. Dalam bab ini membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Sejarah Lahirnya Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia. Berisi tentang lahirnya partai politik masa kemerdekaan, lahirnya Partai Sosialis dan Partai Buruh Indonesia, Lahirnya SOBSI, dan Peristiwa Madiun 1948.

BAB III Kehidupan Perburuhan Masa demokrasi Liberal, berisi tentang kondisi perburuhan Indonesia, bagaimana kehidupan buruh di Madiun, kondisi ekonomi politik serta dukungan partai politik terhadap serikat buruh

BAB IV Aksi Pemogokan SOBSI Madiun Tahun 1957-1959. Berisi tentang latar belakang aksi pemogokan SOBSI Cabang Madiun, bagaimana aksi

SOBSI Madiun, dan pengaruh gerakan SOBSI terhadap politik-ekonomi Madiun.

BAB V PENUTUP. Berisi Kesimpulan

BAB II SEJARAH LAHIRNYA SENTRAL ORGANISASI BURUH SELURUH INDONESIA (SOBSI)

A. Lahirnya Partai Politik Masa Kemerdekaan

Kemerdekaan yang diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945 oleh Sukarno-Hatta sebagai pernyataan bangsa yang bebas telah memberi kebahagiaan dan kesadaran seluruh bangsa Indonesia untuk melakukan tindakan-tindakan bersama sebagai usaha untuk mengisi dan mempertahankan kemerdekaan dengan dasar kekuatan sendiri. Tumbuhnya kesadaran ini membawa pengaruh bagi rakyat yang secara serentak bersama-sama membentuk kekuatan untuk mencapai cita-cita yang diinginkan.

Kemerdekaan adalah modal bagi bangsa Indonesia dalam mencari identitas, sesuai dengan yang dicita-citakan. Penjajahan yang lebih dari tiga abad telah melumpuhkan masyarakat kita, menjadikan bangsa kita jauh tertinggal dalam segala segi kehidupan. Bagi bangsa Indonesia pengalaman semasa penjajahan oleh bangsa Barat (Belanda) telah mengajarkan kepada bangsa Indonesia betapa parahnya kehancuran sistem sosial sebagai akibat penjajahan tersebut. Secara politis penjajahan telah merusak sendi-sendi kemasyarakatan,

sehingga memungkinkan rakyat pribumi untuk bangkit memenuhi panggilan jiwanya sesuai dengan harkat, martabat dan hak-hak asasinya untuk berjuang merebut kemerdekaan untuk kemudian mempertahankan kemerdekaan tersebut.

Masa revolusi adalah masa yang penuh gejolak suasana revolusi menimbulkan ketidakpastian pola komunikasi, baik antar individu maupun antargolongan. Pada saat seperti itu, yang sangat dibutuhkan dalam kondisi kehidupan di masa krisis semacam itu adalah suatu identitas baru. Dapat dipahami bahwa dalam masa gejolak seperti itu, terjadinya pergolakan adalah suatu proses yang wajar untuk memperkuat kebersamaan, sehingga lahirlah berbagai badan-badan perjuangan sebagai lembaga atau jembatan antara lapisan masyarakat dengan pemerintah. Pembentukan badan-badan perjuangan tersebut dijiwai oleh semangat rakyat.

Kendatipun kemerdekaan telah diproklamkan, perangkat negara sudah dilengkapi pada tahun 1945 itu juga, yakni tanggal 18 Agustus 1945 dengan disahkannya UUD 1945 sebagai UUD negara serta dipilihnya presiden dan wakil presiden, tidak berarti bahwa semua perangkat lain telah terpenuhi. Oleh karena itu, melalui Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BPKNIP), yang berfungsi sebagai parlemen mengusulkan kepada pemerintah agar rakyat Indonesia diberi kesempatan seluas-luasnya untuk mendirikan partai politik disertai dengan pembatasan dan harapan bahwa partai-partai politik tersebut hendaknya memperkuat perjuangan dalam mempertahankan kemerdekaan dan menjamin keamanan masyarakat.

Arbi Sanit salah seorang pemikir yang banyak mengarahkan perhatiannya terhadap sistem politik Indonesia dengan tidak melepaskan kaitan

antara gejala politik dengan gejala-gejala kemasyarakatan lainnya, yaitu dengan berpijak kepada realitas kehidupan partai itu melihat adanya empat masalah yang perlu dikaitkan tentang bagaimana partai politik itu mengorganisir dirinya.¹⁶

Maklumat Pemerintah tanggal 3 November 1945 yang ditandatangani oleh Wakil Presiden Muhammad Hatta menjelaskan bahwa partai politik memiliki garis tempat berpijak yang kokoh. Pertama, maklumat tersebut memuat keinginan pemerintah akan kehadiran partai politik. Dengan partai politik, aliran paham yang ada dalam masyarakat dapat disalurkan secara teratur. Kedua lebih meyakinkan lagi, paham yang ada dalam masyarakat dapat disalurkan secara teratur. Kedua lebih meyakinkan lagi, berupa batas waktu pendirian partai politik, yakni harus sudah tersusun sebelum dilangsungkan pemilihan umum anggota badan-badan perwakilan rakyat pada bulan Januari 1946.¹⁷ Dilihat dari sudut ideologi dasar, munculnya partai politik di Indonesia secara garis besar adalah sebagai aktualisasi dari tiga aliran atau pandangan politik yang menemukan momentum kelahirannya pada dekade kedua dan ketiga abad ke 20. Ketiga aliran tersebut adalah Islam, Nasionalisme dan Marxisme/Sosialisme.

Dengan dasar Maklumat Pemerintah inilah kemudian berdiri berbagai partai politik, baik meneruskan partai politik yang telah ada sejak jaman penjajahan Belanda dan pendudukan Jepang maupun partai politik yang baru berdiri sama sekali. Sejak dikelurkannya maklumat tersebut, tumbuh dan berlomba-lombalah setiap kelompok untuk mendirikan partai politik. Perkubuan

¹⁶ Arbi Sanit, *Sistem Politik Indonesia Kestabilan, Peta Kekuatan Politik dan Pembangunan*, (Jakarta:Rajawali, 1981), hal. 40 dalam Drs. M. Rusli Karim, *Perjalanan Partai Politik Indonesia. Sebuah Potret Pasang Surut*, (Jakarta:Rajawali, 1988)

¹⁷ Kepartaian di Indonesia (Kementerian Penerangan Republik Indonesia), hal.7

antar partai pun semakin terasa mencuat pada bulan Januari 1946 dan terbentuklah kelompok-kelompok yang saling berseberangan satu sama lain, yaitu antara Masyumi dengan Partai Komunis Indonesia (PKI). Partai Nasional Indonesia (PNI) yang oleh Sukarno ingin dijadikan satu-satunya partai politik, akhirnya tidak disetujui melalui manifes November Hatta, yaitu dengan idenya untuk mendirikan multi-partai.

Pada waktu itu yang paling mencolok menentang PKI adalah Masyumi. Masyumi ini sebenarnya merupakan lanjutan dari partai yang didirikan pada zaman Jepang, yaitu MIAI (Majelis Islam A'la Indonesia).¹⁸ Sedangkan Partai Masyumi sendiri dibentuk pada bulan November 1945. Anggotanya kebanyakan berasal dari golongan sosialis agama serta yang mempunyai peranan penting dalam tubuh partai ini. Masyumi pada tahun 1946 membentuk Sarekat Tani Islam Indonesia (STII) dan melalui STII ini, Masyumi membantu para buruh tani.

B. Lahirnya Partai Buruh Indonesia dan Partai Sosialis

Lahirnya gerakan buruh di Indonesia tidak lepas dari pengaruh di Eropa. Gerakan buruh dari Eropa menjalar kepada pribumi. Pada awal abad 20 banyak bermunculan organisasi pergerakan buruh. Ciri-ciri serikat buruh pada masa ini adalah tidak ada motif-motif ekonomi dalam proses pendiriannya dan

¹⁸ Hersri Setiawan, *Negara Madiun? Kesaksian Soemarsono Pelaku Perjuangan*, (FuSPAD, 2002), hal. 50.

tidak ada masalah pada proses pendirian serikat-serikat buruh. Serikat-serikat buruh yang lahir pada masa itu, antara lain, yaitu Staatsspoor Bond (SS Bond) yang didirikan di Bandung pada tahun 1905, Personeel in Ned-Indie yang berdiri di Semarang pada tahun 1908, Suikerbond didirikan di Surabaya tahun 1909, dan sebagainya. Faktor yang mendorong pembentukan serikat-serikat buruh tersebut adalah karena adanya pertumbuhan pergerakan buruh di Belanda.⁴ Pembentukan serikat-serikat buruh “impor” tersebut, selain merupakan pengaruh dari perkembangan gerakan buruh di Eropa, juga merupakan bagian dari kepentingan ‘politik’ yang berkembang di perkotaan. Perkembangan selanjutnya dalam keanggotaan serikat-serikat buruh tersebut tidak hanya terbatas bagi anggota “impor” saja, tetapi juga merekrut anggota dari bumiputera. Hal itu merupakan pengaruh dari semangat etis, suatu program dalam politik balas jasa (Etische Politiek) di awal tahun 1900.

Dengan adanya politik etis telah memberi nuansa baru dalam perkembangan intelektual bumiputera, apalagi dengan adanya pembentukan serikat-serikat buruh oleh buruh “impor”, telah memicu bumiputera untuk membangun serikat buruh. Beberapa serikat buruh yang didirikan

⁴ Edi Cahyono, *Perburuhan dari Masa ke Masa : Jaman Kolonial Belanda sampai Orde Baru (Indonesia-1998)*, (Jakarta , 2003), diakses dari www.geocities.com

oleh bumiputera antara lain adalah Perkoempoelan Boemipoetera Pabean (PBP) tahun 1911, Persatoean Goeroe Bantoe (PGB) tahun 1912, Perserikatan Goeroe Hindia Belanda (PGHB) tahun 1912, Persatuan Pegawai Pegadaian Boemipoetera (PPPB) tahun 1914, Opium Regie Bond (ORB) dan Vereeniging van Inlandsch Personeel Burgelijk Openbare Werken (VIPBOUW) tahun 1916 dan Personeel Fabriek Bond (PFB) tahun 1917. Selain itu, orang-orang Tionghoa juga ikut mendirikan organisasi buruh, di antaranya yaitu, Federasi Kaum Boeroeh Tionghoa, Perhimpoean Kaoem Boeroeh dan Tani (PKBT) yang berdiri tahun 1917. Organisasi tersebut dikembangkan oleh Porositno yang dibentuk oleh Sarekat Islam (SI) dan ISDV Surabaya. Namun pada akhirnya PKBT pecah menjadi dua pada tahun 1918, yaitu menjadi Perhimpoean Kaoem Tani (PKT) dan Perhimpoean Kaoem Boeroeh Onderneming (PKBO). PKBO ini akhirnya bergabung dengan PFB. Pada masa tersebut juga terjadi berbagai pemogokan yang

dilakukan oleh buruh, terutama dengan gencar dilakukan pada tahun 1920-an. Pemogokan-pemogokan tersebut antara lain, yaitu pemogokan yang dilakukan oleh PFB pada tahun 1920.

Pemogokan oleh PFB ini dikarenakan karena majikan menolak mengakui PFB sebagai organisasi yang mengakui anggotanya. Di Surabaya pada bulan Agustus 1921, terjadi pemogokan di lingkungan buruh pelabuhan Surabaya yang dimotori oleh Red Guardist (Barisan Merah). Pemogokan ini dihentikan oleh tentara kolonial dengan penembakan terhadap buruh. Pemogokan lain terjadi pada VSTP yang dimotori oleh Serikat Islam Semarang, Serikat Buruh Pegadaian, Mesin Jahit dan Kapal Uap dan Pelabuhan. Dalam merespon aksi-aksi buruh tersebut, pemerintah kolonial membentuk peraturan "Dewan Perdamaian untuk Spoor dan Tram di Jawa dan Madura" yang diharapkan dapat menjadi perantara bila terjadi perselisihan. Namun kemudian pemerintah kolonial merasakan bahwa pemogokan yang dilakukan oleh

buruh mempunyai tujuan politik yaitu untuk menggulingkan kekuasaan mereka. Oleh karena itu, pemerintah kolonial mengeluarkan undang-undang larangan mogok oleh buruh. Tetapi walaupun telah dikeluarkan undang-undang tersebut, pemogokan tetap berlangsung.

Tokoh-tokoh buruh pribumi, antara lain Semaoen, Alimin dan Darsono, yang merupakan buruh-buruh kereta api dan trem yang bernaung di bawah VSTP (Vereniging Spoor-Traam Personeel) yang berdiri pada tanggal 14 November 1908 di Semarang. Mereka bersama dengan pembawa ideologi komunis dari Belanda, antara lain Sneevliet, Bergsma, Van Brink, Bandstder, dan H.W. Dekker yang kemudian mendirikan Partai Komunis (komunis). Tahun 1926 saat kepemimpinan Musso, PKI melakukan pemberontakan di berbagai daerah. Akibat dari pemberontakan tersebut, gerakan buruh menjadi melemah karena banyak buruh yang

ditangkap.⁵ Oleh karena itu (pemberontakan buruh tahun 1926), PKI dinyatakan sebagai partai terlarang oleh pemerintah kolonial dan sejak pematangan terhadap gerakan buruh di tahun 1926-1927 tersebut, aktivitas politik buruh menjadi melemah. Kemudian pasca gerakan buruh tahun 1926, muncul upaya untuk membangun kembali gerakan buruh. Pada Juli 1927 di Bandung dibentuk Persatoean Beambte Spoor en Tram (PBST), dibentuk juga federasi dari kalangan guru di Jakarta seperti Hogere Kweekscholieren Bond (HKSB), Perserikatan Normaal School (PNS), Persatoean School Opziener (PSO), Kweekschool Bond (KB) dan lainnya. Di Yogyakarta pada bulan Februari 1930 didirikan Persatoean Vakbonden Pegawai Negeri (PVPN) oleh Soeroso. Selain itu juga didirikan Barisan Kaoem Boeroeh oleh Hindromartono (seorang pengacara) pada tahun 1938. Dr. Soetomo di Surabaya juga membentuk Serikat Kaoem Boeroeh Indonesia (SKBI) pada tanggal 8 Juli 1928. Organisasi ini hanya

⁵ Bambang Setiaji, *Ekonomi Serikat Buruh Di Indonesia*, (Surakarta : Muhammadiyah University Press, 2003), hal. 9-10.

berumur satu tahun, karena menggabungkan diri dengan "Liga menentang kolonialisme serta penindasan". Pada Mei 1930 didirikan Persatoean Serekat Sekerdja Indonesia. Menurut Soetomo, organisasi ini tidak berkaitan dengan partai politik dan agama. Soetomo juga mempunyai gagasan yaitu bahwa serikat buruh menjadi serikat sekerja. Selain itu, Soetomo juga menyatakan bahwa pergerakan kaum buruh harus dipisahkan dari aksi politik.⁶

Perang Dunia II

membawa akibat bagi aktivitas kaum buruh. Dengan berlangsungnya PD II, tanggal 8 Desember 1941 Pemerintah Hindia Belanda menyatakan perang terhadap Jepang, sehingga dapat dikatakan bahwa sejak saat itu aktivitas politik buruh menjadi mati. Jepang akhirnya menduduki Hindia Belanda dan mencanangkan ekonomi perang.

Penindasan

Belanda terhadap seluruh rakyat Indonesia yang

⁶ Edi Cahyono, *Loc. Cit*

kemudian dilakukan secara lebih kejam lagi oleh fasisme Jepang, telah membangkitkan seluruh rakyat Indonesia untuk bersama-sama menggulingkan kekuasaan, baik kekuasaan kolonial dan fasis. Telah disebutkan sebelumnya, bahwa pasca pemberontakan 1926, banyak upaya dilakukan untuk membangkitkan kembali PKI, dan pada tahun 1935, PKI-pun dibangkitkan kembali secara illegal oleh Muso. Selanjutnya, PKI illegal ini melakukan perjuangan anti-fasis selama pendudukan Jepang.

Ketika Musso datang kembali ke Indonesia, ia memusatkan pekerjaannya di Kota Surabaya, karena ia memang berasal dari Jawa Timur dan pernah tinggal di kota tersebut. Menurut sumber-sumber PKI di Surabaya, ia membangun kembali susunan CC PKI di Surabaya. CC PKI yang baru tersebut terdiri dari Musso, Pemuda 21, Azis, Sukajat, dan Djoko Soedjono. PKI 35 tersebut pada akhirnya terbongkar oleh Belanda. Tokoh-tokohnya ditangkap

dan dibuang ke Boven Digul. PKI 35 tersebut akhirnya hilang dari dunia politik komunis.⁷

Banyak anggota PKI waktu itu yang bergabung dengan PKI bukan karena motif ideologis, tetapi karena PKI adalah partai yang berani terang-terangan melawan Belanda dan Jepang. Salah satu yang penting adalah kelompok Menteng 31. Grup ini kemudian mengorganisasikan Barisan Banteng, yang merupakan organisasi pemuda semi-militer dan mempunyai anggota pemuda-pemuda sekitar 15 tahun. Pemuda-pemuda tersebut dilatih berbaris, bermain dengan senjata-senjata kayu, digembleng untuk menanamkan semangat "militan" di dalam kalbu pemuda. Di antara aktivis-aktivis yang mengorganisasikan Barisan Banteng ini terdapat D.N. Aidit, seorang pemuda komunis sejak tahun 1943. Grup Menteng 31 kemudian juga mengorganisasikan tukang-tukang becak dan mendirikan Persatuan Buruh Kendaraan. Di antara aktivis-aktivisnya

⁷ Soe Hok Gie, *Orang-orang di Persimpangan Kiri Jalan. Kisah Pemberontakan Madiun September 1948*, (Yogyakarta : Benteng, 1997), hal. 24- 25.

terdapat D.N. Aidit dan kawan-kawannya. Akan tetapi Barisan Banteng dan Persatuan Buruh Kendaraan dibubarkan oleh Jepang karena dianggap berbahaya.⁸ Pemuda-pemuda tersebut pada akhirnya membentuk Gerakan Indonesia Merdeka (Gerindom) dalam usahanya untuk memperkuat gerakan bawah tanah. Kelompok tersebut kemudian membuat kelompok-kelompok kerja dan mengadakan kontak dengan grup pemuda-pemuda lain.

Ketika persiapan-persiapan proklamasi berlangsung, tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat sejumlah kader komunis yang bekerja keras untuk melicinkan jalannya proklamasi. Aidit merupakan salah satu utusan pemuda yang mendesak Ir. Soekarno-Hatta untuk memproklamsikan kemerdekaan bersama-sama dengan grup Menteng 31. Dalam hal ini sejumlah kader komunis terdorong oleh motif idealisme revolusioner telah ikut membentuk hari-hari pertama Republik Indonesia. Motif bergerak dari kader

tersebut lebih didorong oleh protes sosial atas tindakan-tindakan tidak adil dari Jepang. Pemuda-pemuda komunis yang ada waktu itu tidak berpikir dan bertindak sebagai seorang kader komunis.⁹ Sebagai kader komunis, pemuda-pemuda tersebut membangunkan organisasi-organisasi komunis dan kemudian mengarahkan semangat rakyat yang sedang mendidih. Grup Menteng 31 kemudian mendirikan Barisan Buruh Indonesia (BBI) pada tanggal 15 September 1945¹⁰ dan juga mendirikan Barisan Rakyat (untuk petani).

Barisan Buruh Indonesia merupakan organisasi buruh pertama dalam perjuangan. Pada pidato pendirian BBI menegaskan bahwa dengan semakin cepatnya perubahan yang terjadi dalam masyarakat akan menyebabkan kaum buruh untuk lebih mengutamakan pembentukan Barisan Buruh, karena

⁸ Biro Pemuda Departemen PDK, *Sejarah Pemuda Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1965), hal. 115 dalam Soe Hok Gie, *Op. Cit.*, hal 48-49.

⁹ Soe Hok Gie, *Op. Cit.*, hal. 55.

¹⁰ Benedict Anderson, *Pemuda Revolution*, (New York : Ithaca, Cornell University, 1952), hal. 333.

dengan pembentukan Barisan Buruh akan memudahkan berdirinya serikat sekerja dan partai buruh.¹¹ BBI mengadakan kongres di Solo pada tanggal 7 sampai 9 November 1945.¹² Dalam kongres tersebut terdapat pandangan bahwa BBI akan diubah menjadi partai dan ikut dalam pemilihan umum. Pada akhirnya BBI berubah menjadi Partai Buruh Indonesia (PBI) yang berkedudukan di Surabaya, berasaskan sosialisme Marx-Lenin dengan tujuan terwujudnya masyarakat sosialis, tetapi sejumlah cabang tidak menerima keputusan tersebut dan akhirnya keputusan tersebut dikoreksi kembali melalui konferensi PBI pada tanggal 31 Desember 1945 di Blitar yang akhirnya memutuskan bahwa BBI menjadi PBI, sedangkan BBI tetap berdiri.¹³

Baik Aidit maupun Lukman dalam gerakan-gerakan pemuda dan buruh pada waktu itu aktif

¹¹ Sandra, *Sejarah Pergerakan Buruh Indonesia*, (Jakarta : PT. Pustaka Rakyat, 1961), hal. 66.

¹² Drs. Sarjana Sigit Wahyudi, M.S. *Ketika SARBUPRI Mengguncang Pabrik Karung Delanggu 1948*, (Semarang : Bendera, 2001), hal. 73.

¹³ Edi Cahyono, *Loc. Cit.*

memimpin pengisian kemerdekaan Indonesia bersama-sama pemuda-pemuda lain. Namun pada akhirnya Aidit dan kawan-kawannya ditangkap dan dimasukkan ke penjara. Demikianlah kelompok-kelompok PKI yang ada di Indonesia ikut dalam arus revolusi. Kelompok tersebut lebih berpikir sebagai seorang patriot Indonesia daripada sebagai seorang fungsionaris PKI. Hal itu karena aparat organisasi PKI waktu itu tidak mempunyai garis komando dan hanya satu kelompok saja yang memikirkan tentang pembangunan kembali partai yaitu Jusuf. Jusuf menggunakan kesempatan untuk membangun kembali PKI secara legal dan pada tanggal 21 Oktober 1945, PKI Jusuf secara resmi didirikan kembali.¹⁴ PKI Jusuf ini mendapat sambutan di daerah-daerah lain. Sampai akhir tahun 1945, cabang-cabangnya telah berdiri di Sukabumi, Cirebon, Solo, Pekalongan, Madiun, Malang dan Surabaya.

¹⁴ Soe Hok Gie, *Op.Cit.*, hal. 56.

Telah disebutkan sebelumnya, bahwa Proklamasi 17 Agustus 1945 merupakan kesempatan bagi rakyat untuk melaksanakan cita-cita proklamasi agar kemerdekaan lebih berarti. Oleh karena itu mulai bermunculan tokoh-tokoh politik. Sutan Sahrir adalah salah seorang tokoh politik Indonesia yang anti fasis. Pandangan-pandangannya kemudian diterapkan dalam kondisi-kondisi kongkret setelah ia menjadi Perdana Menteri, yaitu KNIP diubah dari sebuah badan penasihat menjadi badan legislatif dengan ditambahkan kekuatan-kekuatan demokratis lainnya. Demikian pula dibentuk dewan-dewan rakyat di daerah-daerah. Partai-partai dan organisasi-organisasi diizinkan berdiri agar semua aspirasi rakyat dapat disalurkan, hal ini bertujuan untuk mengurangi fanatisme dan ekstremisme.¹⁵

Tokoh politik

lainnya adalah Amir Syarifudin yang sama-sama anti fasis. Amir dan Sahrir, keduanya pada akhirnya mendirikan partai politik. Selain itu juga terdapat tokoh Tan Malaka. Tan Malaka adalah tipe lain dari Sahrir. Ia adalah seorang guru yang belajar di negeri Belanda, tetapi hidup dalam lingkungan keluarga-keluarga buruh yang miskin. Antara Sahrir dan Tan Malaka terdapat perbedaan pandangan, yaitu bagi Sahrir dan kawan-kawannya berpandangan bahwa

¹⁵ *Ibid.*, hal. 69.

Republik Indonesia belum ada secara material. Sahrir dan kawan-kawannya ingin menunjukkan bahwa Indonesia mempunyai goodwill di mata internasional. Sahrir juga menyetujui perundingan-perundingan antara Indonesia dengan negara lain, karena dengan itu Indonesia akan dikenal oleh luar. Sedangkan Tan Malaka adalah tipe orang yang selalu ingin belajar tentang sesuatu. Tan Malaka cenderung menjadi sosok yang misterius. Tan Malaka tidak menyetujui perundingan apapun, terutama yang hanya akan merugikan bangsa Indonesia.¹⁶

Lahirnya Partai

Sosialis dan Partai Buruh Indonesia tidak lepas dari Proklamasi Kemerdekaan. Untuk mengisi kemerdekaan, segenap golongan masyarakat dengan membawa ideologi mereka masing-masing saling berusaha untuk mengisi kemerdekaan Republik Indonesia. Bermula dari hal itu, maka bermunculan tokoh-tokoh dengan ideologi masing-masing. Seperti

¹⁶ *Ibid*, hal. 70-75.

telah disebutkan diatas bahwa tokoh-tokoh tersebut dengan membawa ideologi masing-masing berusaha mengisi kemerdekaan ini, tokoh-tokoh tersebut diantaranya adalah Sutan Sahrir. Sutan Sahrir adalah seorang tokoh politik Indonesia yang pandangan-pandangan politiknya ditempa dalam lingkungan masyarakat sosialis (sosial demokrat) di negara Belanda ketika ia masih menjadi mahasiswa.

Tokoh lainnya adalah Amir Syarifuddin yang sangat anti Jepang. Sutan Sahrir dan Amir Syarifuddin keduanya mempunyai rencana untuk menyusun barisan-barisan politik untuk mencapai cita-cita ideologis mereka. Pada tanggal 20 November 1945 lahirlah Partai Rakyat Sosialis (Paras) yang didirikan oleh Sutan Sahrir dan lahir juga Partai Sosialis Indonesia (Parsi) beberapa minggu sebelumnya yang didirikan oleh Amir Syarifuddin. Mereka mencoba untuk mendapatkan kader-kader pemuda revolusioner waktu itu. Sahrir

dan Amir pada akhirnya melakukan fusi partai mereka yang kemudian menjadi Partai Sosialis (PS).¹⁷

Lahirnya Partai

Sosialis dikarenakan antara Sahrir dan Amir mempunyai kesibukan masing-masing, maka atas usaha beberapa aktivis pemuda diadakanlah kongres fusi Parsi dan Paras yang melebur menjadi Partai Sosialis. Atas dukungan inilah Sutan Sahrir menjabat sebagai Perdana Menteri RI dari 15 November 1945 sampai 3 Juli 1947. Dalam Partai Sosialis terdapat empat kelompok yang bergabung menjadi satu. Mayoritas dari Partai Sosialis terdiri dari dua kelompok besar, yaitu grup Amir dan grup Sahrir. Walaupun pertentangan intern waktu itu tidak muncul dalam Partai Sosialis, tetapi antara Amir dan Sahrir telah mempunyai rencana-rencana sendiri untuk mencapai tujuan masing-masing. Dengan adanya perbedaan ideologi dan politik dalam Partai Sosialis

¹⁷ *Ibid*, hal. 77

(PS), akhirnya Partai Sosialis pecah dan tidak dapat disatukan lagi.¹⁸

Di antara kedua tokoh tersebut, waktu itu tidak ada perbedaan yang prinsipil, karena memiliki kesamaan rencana untuk menyusun barisan politik dalam mencapai cita-cita ideologis, namun persatuan di antara keduanya lebih didasarkan oleh sikap anti fasis dan kepentingan bersama untuk menghadapi Tan Malaka dengan persatuan perjuangan, sehingga setelah bahaya itu hilang persatuan yang ada juga akan meretak.¹⁹

Persatuan antara Amir dan Sahrir tidak berlangsung lama yaitu dari 20 November 1945 hingga 12 Februari 1948 dan tidak dapat disatukan lagi. Sutan Sahrir menjabat sebagai ketua Partai Sosialis, beserta Johan Syahrusah, Wijono, Soemartojo, Soebadio, Sitorus,

¹⁸ Perbedaan faham tersebut menyangkut : a). Pembubaran Kabinet Sahrir dan kelanjutan sikap partai, b). Sikap dan cara pimpinan partai di waktu perang, bahkan pimpinan organisatoris yang tegas sama sekali tidak ada, c). tentang siaran penjelasan keadaan politik sayap kiri tanggal 22 Januari 1948, yang ditanda tangani juga oleh anggota dewan partai dn berakibat memecah persatuan dan kekuatan nasional, d). tentang sikap pendirian terhadap presidentil terhadap kabinet Hatta. (M. Fadjroel Rahman, *Partai Sosialis Indonesia dan Perjuangan Ideologi Sosilaisme Kerakyatan*, dikutip dari www.msnet.com)

¹⁹ Soe Hok Gie, *Op. Cit*, hal. 79.

Soepono, Tedjakusuma, Tobing, Soejono, Murad, Wangsawijada, Itji, Soehadi, Nurullah, Rochan, Kusnaeni, Kartamuhari, Soegondo, Soenarno, Sukanda, Rusni dan Sastra keluar dari Partai Sosialis dan mendirikan PSI (Partai Sosialis Indonesia) pada tanggal 12 Februari 1948. PSI ini menolak komunisme, PKI, Uni Soviet dan mendukung Kabinet Hatta.²⁰

Partai Sosialis Indonesia (PSI) mewakili gagasan dan gerakan sosialisme, secara tegas membedakan diri dengan Partai Komunis Indonesia (PKI) yang mewakili gagasan dan gerakan komunis Indonesia, baik secara ideologis, tujuan, strategi maupun program kepartaian. PSI melalui pemikiran dan analisa historis tentang masyarakat Indonesia oleh Sutan Sahrir, menetapkan sosialisme kerakyatan sebagai basis ideologinya, perumusan singkatnya sebagai berikut ;

“Sosialisme yang kita maksudkan adalah sosialisme berdasarkan kerakyatan, yaitu sosialisme yang menjunjung tinggi derajat

²⁰ M. Fadjroel Rahman, *Loc.Cit*

kemanusiaan dengan mengakui dan menjunjung tinggi persamaan derajat tiap manusia orang seorang. Penghargaan pada pribadi orang seorang dinyatakan pada penghargaan serta perilaku pribadi orang seorang dalam pikiran serta di dalam pelaksanaan sosialisisme. Penghargaan pribadi manusia serta pandangan yang demikian ini sebenarnya menjadi inti dari segala pencipta sosialisisme yang besar seperti Marx-Engels, dan lain-lain. Sosialisisme semestinya tiada lain daripada penyempurnaan dari segala cita-cita kerakyatan yaitu kemerdekaan serta kedewasaan manusia yang sebenarnya.”²¹

Keterkaitan

langsung sosialisisme dengan demokrasi atau kerakyatan, membuat Sutan Sahrir menekankan secara tegas perbedaan tujuan dan strategi kaum sosialis dengan komunis, yaitu ;

“Kaum komunis di dalam keadaan manapun menganggap diktator proletar itu mesti dijalankan sebagai masa perantara, sedangkan kaum sosialis menganggap demokrasi selalu mungkin sebagai jalan untuk mencapai sosialisisme meskipun sesudah melakukan revolusi atau pemberontakan terhadap golongan fascist, feodal atau penjajah yang tadinya tidak memungkinkan berkembangnya demokrasi”.²²

Amir Syarifuddin

dan pengikutnya seperti Setiadjit, Tan Ling Djie, Abdul Majid bergabung dengan PKI dan membentuk Front Demokrasi Rakyat (FDR) pada tanggal 28 Juni 1948. FDR menerapkan kebijakan kelas dalam bentuk

²¹ Penjelasan Azas dan Garis Politik Partai Sosialis Indonesia, *Suara Sosialis* No. 13 Th. III, 15 Desember 1952, hal 6 dalam M. Fadjoel Rahman, *Loc. Cit.*

²² Sutan Sahrir, *Sosialisisme di Eropa Barat*, *Suara Sosialis*, No. 13 Th. III, 15 Desember 1951, hal 2

class warfare, wujudnya revolusi menentang Republik Indonesia. FDR sendiri merupakan fusi dari tiga partai kelas buruh, yaitu PKI Jusuf, Partai Buruh Indonesia dan Partai Sosialis.²³

Euforia

Kemerdekaan mendorong kelahiran berbagai organisasi di masyarakat, dari mulai organisasi persatuan yang sederhana hingga organisasi bersenjata. Babak ini sebagai masa merintis pergerakan buruh yang tersusun. Organisasi pergerakan-pergerakan buruh bermunculan bagaikan cendawan di musim hujan. Organisasi-organisasi yang ada dalam masyarakat tersebut muncul sebagai cita-cita kemerdekaan. Lahirnya pergerakan buruh di Indonesia sebenarnya merupakan suatu aksi yang muncul dari harga diri kebangsaan yang dikobarkan oleh partai politik, dan tidak mengherankan jika dalam perkembangannya, pasang-surut pergerakan buruh sebagian ditentukan oleh

²³ FDR terdiri dari Partai Sosialis (kelompok Amir Syarifuddin), Pemuda Sosialis Indonesia (Pesindo), Partai Buruh Indonesia (PBI), PKI dan SOBSI. (Edi Cahyono, Perburuhan dari Masa Ke Masa diakses dari www.geocities.com)

gelombang politik kebangsaan dalam perjuangan pembebasan diri dari penindasan kolonialisme.

Dalam menghadapi (tentara-tentara) Inggris dan Belanda dibentuk pula Laskar Buruh Indonesia (LBI), yaitu organisasi buruh bersenjata yang lepas dari BBI. Koordinasi LBI dilakukan oleh Badan Pimpinan yang pada waktu itu dikepalai oleh Sudiono Djajaprajitno.²⁴ Selain itu, untuk membangun organisasi dikalangan perempuan juga dibentuk Barisan Buruh Wanita (BBW) dengan ketuanya Trimurti. Pada kongres di Madiun tahun 1946 BBI berganti nama menjadi Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GASBI). Pada bulan Juli 1946 BBI pecah menjadi dua, yaitu menjadi Gabungan Serikat Buruh Indonesia pimpinan Syamsu Haryo Hudoyo dari Partai Masyumi dan Gabungan Serikat Buruh Vaksentral (GSBV).²⁵ Sebagian dari PBI memisahkan diri dan membentuk Partai Buruh Merdeka (PBM). PBI di kemudian hari bergabung dengan PKI dan

²⁴ Ensiklopedi Nasional Indonesia Jilid 3, hal 568.

PBM dan mengubah nama menjadi Partai Murba.²⁶

Partai Murba, anggotanya terdiri dari kelompok yang telah tereksploitasi oleh pihak-pihak kapitalis Belanda dan bangsa asing lainnya. Asas Partai Murba adalah anti-fasisme, anti-imperialisme dan anti-kapitalisme.

Peranan Tan Malaka dalam Partai Murba sangat besar, karena Tan Malaka adalah tokoh yang menonjol pada masa Jepang.

Di samping

mendirikan partai, kelompok komunis juga mendirikan organisasi-organisasi pemuda, buruh, tani, laskar dan gerakan-gerakan massa lain yang dapat mendukung cita-cita kaum komunis dalam masyarakat. Pada awal Desember 1945, Barisan Tani Indonesia (BTI) didirikan dibawah pimpinan Wijono (ketua grup Sahrir).²⁷

C. Lahirnya SOBSI (Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia)

²⁵ Drs. Sarjana Sigit Wahyudi, M.S., *Loc. Cit*

²⁶ Suri Suroto, *Gerakan Buruh dan Permasalahannya*, Prisma nomor 11 hal. 29.

²⁷ Soe Hok Gie, *Op. Cit.*, hal. 81-82.

a. SOBSI sebagai Saluran Gerakan Buruh

Pembinaan buruh tidaklah berjalan dengan lancar. Hal itu terlihat bahwa sejak tanggal 15 September 1945 yang mana BBI berdiri dan untuk kemudian berganti nama menjadi FBI, tetapi banyak diantara BBI tidak mau membubarkan diri karena tidak mau menjadi partai. Pada akhirnya BBI tidak dapat dipertahankan. Pada tanggal 21 Mei 1946, BBI berganti nama menjadi Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GASBI), namun walaupun begitu persoalan organisasi ke dalam masih kacau balau. Dalam keadaan seperti itu GASBI pecah lagi, karena golongan vaksentral keluar dan mendirikan Gabungan Serikat Buruh Vaksentral (GSBV). Pada akhirnya kedua golongan tersebut dapat disatukan lagi dalam wadah Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia (SOBSI) yang didirikan pada tanggal 29 November 1946 di Yogyakarta dan disahkan dalam Kongres Nasional I tanggal 18 Mei 1947 di Malang. Organisasi SOBSI lahir pada saat pasangunya revolusi, di mana seluruh rakyat Indonesia berperang melawan musuh revolusi kaum militeris Jepang dan tentara kolonial Belanda yang dibantu oleh tentara imperialis Inggris, sehingga SOBSI terbentuk sebagai hasil persatuan kaum buruh Indonesia yang anti-fasis dan anti-kolonialisme, yang tingkat hidupnya masih rendah, upah dan jaminan sosial tidak mencukupi. SOBSI sebagai organisasi buruh merupakan organisasi yang berdiri sendiri, bebas dan bersifat non-

partai, namun tak berarti anti partai atau non-politik.²⁸ Keanggotaan SOBSI berasal dari kaum buruh yang terorganisasi dalam serikat buruh-buruh, baik yang berada di pusat maupun lokal. Tugas SOBSI secara kongkrit adalah menggerakkan massa untuk melaksanakan aksi-aksi dalam berbagai kepentingan, seperti aksi sosial, aksi ekonomi, kebudayaan, dan aksi politik yang dipadukan dengan pekerjaan untuk menarik massa kaum buruh ke dalam keanggotaan serikat buruh dan SOBSI.²⁹

Telah dikemukakan sebelumnya bahwa pada bulan Juli 1946 BBI pecah menjadi dua, yaitu GASBI dan GSBV. Dengan melalui berbagai hambatan, pada akhirnya kedua golongan tersebut dapat disatukan kembali dalam sebuah wadah yaitu SOBSI. SOBSI adalah kemajuan besar dalam pergerakan buruh. Organisasi ini berhasil mengkonsolidasi 34 pusat serikat buruh. SOBSI menyatakan diri bukan sebagai partai politik, tetapi dalam menjalankan aksinya, buruh tidak terlepas dari gelombang politik, SOBSI dalam perjuangannya bekerjasama dengan golongan dan partai politik yang sehaluan. Bentuk organisasinya adalah demokratis sentralisme. SOBSI bukan partai dari kelas buruh, tetapi SOBSI adalah bentuk organisasi tingkat pertama dari kelas buruh. Oleh karena kepentingan yang sama dari kelas buruh serta diperlukan suatu organisasi yang dapat digunakan sebagai alat untuk

²⁸ Arsip SOBSI (1950-1965), Bag. Pendahuluan

mencapai kepentingan tersebut, maka lahirlah SOBSI yang mewakili kelas buruh dan dirasa tepat sebagai wadah organisasi atau saluran gerakan bagi kelas buruh.³⁰ Selain itu untuk dapat mencapai tuntutan kepentingan kelas buruh, sehingga diperlukan suatu organisasi yang mengatur sedemikian rupa permasalahan kelas buruh yang berasal dari lapangan industri yang berbeda-beda, maka organisasi yang dirasa tepat adalah SOBSI.³¹

Pengurus sentral dalam SOBSI harus bertanggungjawab kepada kongres. Cabang-cabang SOBSI menyebar di berbagai daerah. Pada kongresnya di Malang, tanggal 18 Mei 1947 atas desakan Alimin, SOBSI mengangkat Setiadjid sebagai ketua kongres I SOBSI, demikian juga tokoh-tokoh lain seperti Maruto Darusman, Moewaladi dan lain-lainnya juga dimasukkan dalam kongres tersebut.³² SOBSI juga mempunyai saluran internasional.

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Arsip SOBSI (1950-1965) No. 63

³¹ *Ibid.*

³² Komposisi SB SOBSI kongres (*Soeara Boeroeh*, 12 Juli 1947 dalam Soe Hok Gie, *Op. Cit.*, hal 84-85 adalah sebagai berikut :

1. Sentral Biro : Harjono (Ketua Umum, Setiadjid (wakil ketua), Njono (sekum), S. Widjodinoto (wakil sekum), hartono (bendahara), Soekirno (wakil bendahara) mencakup pembelaan.
2. Organisasi : Soerjosoepadmo (ketua), Oemar Said (wakil ketua), Sardjoe, Moh. Sastradiraja.
3. Sosial : Affandi (ketua), Koeshartini (wakil), J. Soedjaprawira, Soenarjo mangunpoespito.
4. Ekonomi : E. Coedeoan (ketua), Soedjoko (wakil), Hardipranoto dan Sabariman.
5. Penerangan : Oei Gee Hwat (ketua), Wahjono (wakil), Boejoeng Saleh dan Islan.
6. Wanita : Soeparmi (ketua), Arsiyah (wakil), Ny. Soemadi.
7. Luar Negeri : Harjono (ketua), Soehadinoto, Setiadi, Handojo, Maruto Darusman, Bambang Susilo, Achamd Soemadi.

Kongres I SOBSI di Malang tersebut juga memutuskan bahwa SOBSI akan bergabung dengan World Federation of Trade Union (WFTU) di Praha. SOBSI mengirimkan perutusannya dan di sana dijelaskan persoalan-persoalan Indonesia dari visi SOBSI (komunis). SOBSI juga membangun lagi laskar seperti Laskar Minyak untuk pabrik minyak di Cepu. Jika kita melihat tokoh-tokoh berat komunis yang ada di SOBSI (Akhmad Sumadi, Oei Gee Hwat, Harjono, Setiadjid, Maruto Darusman, Sabariman, dan lain-lainnya) dapatlah diduga bahwa kaum komunis secara serius mencoba untuk membina buruh-buruh Indonesia. Relasi antara SOBSI dengan PKI bukanlah afiliasi. Di PKI dikembangkan relasi keanggotaan, yaitu siapapun yang duduk dalam Politbiro adalah mereka yang berposisi sebagai pimpinan dalam organisasi serikat, vaksentral, dan organisas-organisasi massa. Dengan demikian, berbagai program yang diputuskan dalam rapat-rapat Politbiro PKI dapat dijadikan sebagai kebijakan serikat, vaksentral dan organisasi-organisasi massa lainnya.³³

Pekerjaan-

pekerjaan membina buruh itu semua memerlukan pelaksanaan-pelaksanaan terlatih dan pada waktu itu oleh pihak kiri dirasakan adanya kekurangan yang besar terhadap kader-kader. Secara kecil-kecilan

8. Perencanaan : Asrarodin (ketua), Djoko Soedjono (wakil), Drs. Danuhusodo, Harjadi, maruto darusman, K. Werdojo, Koernan, Mr. Dt. Soeripto, Harjono, SK. Trimurti.

pendidikan kader-kader Marxist telah dimulai di Madiun di bawah pimpinan Moewaladi dan Abdurahman (eks. Nefis dan eks. Let. Laut AL Belanda). Pendidikan kader-kader Marxist ini direorganisasi secara sistematis, mereka disediakan pondokan untuk memudahkan proses belajar. Kader-kader dididik selama beberapa bulan dan dengan pengetahuan teori sekadarnya dilepas di tengah masyarakat. Dari peserta-peserta Marx House tidak ada yang menjadi tokoh utama, tetapi banyak diantara mereka menjadi pekerja-pekerja yang gigih dan praktis. Sebagian besar dari mereka ikut PKI bekerja di SOBSI, dan lain-lainnya.³⁴ Pada bulan April 1947, Marx House telah mencetak 400 kader³⁵ dan dua bulan kemudian menjaring 140 kader baru. Melalui Marx House, kaum komunis dapat mensuplai sebagian dari kebutuhan kader-kader untuk tugas-tugas di lapangan.

³³ Edi Cahyono, *Loc Cit.*

³⁴ Soe Hok Gie, *Op. Cit.*, hal. 85

³⁵ *Harian Boeroeh*, 10 April 1947 dalam Soe Hok Gie, *Op. Cit.*, hal. 86

Selama proses pelebaran jaring-jaring komunis, tokoh-tokoh “berat” PKI, seperti Maruto Darusman, Setiadjud, Soeripno, dan Alimin mulai berdatangan. Pimpinan-pimpinan kelas berat tersebut kemudian dibagi-bagi. Tokoh-tokoh tersebut ada yang di-“drop” di PKI dan ada yang masuk dalam PBI dan SOBSI.³⁶ Demikianlah PKI yang bekerja sama dengan golongan kiri lainnya tetapi secara diam-diam menyebarkan orang-orangnya di sektor yang vital dalam Republik Indonesia. Melihat tokoh-tokoh “berat” PKI yang duduk dalam SOBSI, maka di satu sisi dapat dikatakan bahwa SOBSI merupakan organisasi buruh terbesar yang didirikan oleh kelompok-kelompok revolusioner dari berbagai golongan yang anti-fasis dan anti kolonialis. Tetapi di satu sisi yang lain, SOBSI menyatakan diri bukan sebagai onderbow dari partai politik manapun, namun dalam setiap kegiatannya SOBSI bekerja sama dengan kelompok yang sehaluan, yang diantaranya

³⁶ Soe Hok Gie, *Op. Cit.*, hal. 87.

adalah PKI, sehingga tampak bahwa SOBSI identik dengan komunis atau sebagai onderbow komunis.

Dalam setiap

kegiatan yang berkaitan dengan perburuhan, SOBSI selalu tampil dimuka, terutama dalam hal pemogokan buruh, karena bagi serikat-serikat buruh, SOBSI-lah yang berani menentang segala bentuk kolonialisme dan kapitalisme asing serta dalam setiap aksinya, SOBSI memperjuangkan nasib buruh. Kader-kader yang duduk dalam SOBSI adalah kader-kader yang telah mendapat pelatihan, yaitu pelatihan melalui Marx House.³⁷ Seperti telah dikemukakan sebelumnya, bahwa dengan didirikannya Marx House meningkatkan jumlah kader buruh yang masuk dalam SOBSI. Pelatihan kader-kader tersebut dimulai di Madiun. Madiun pada masa permulaan revolusi, perkembangan politiknya didominasi oleh kelompok yang berorientasi pada Partai Sosialis, sehingga secara dominan mewarnai pergerakan rakyat Madiun

³⁷ *Ibid*, hal. 85-86.

terutama di kalangan pemudanya. Madiun dijadikan pusat pelatihan bagi golongan kiri, yaitu melalui Marx House tersebut, selain itu juga dikarenakan bahwa dukungan terbesar kepada golongan kiri di Madiun tersebut berasal dari serikat buruh, sehingga dengan didirikannya tempat pelatihan bagi golongan kiri di Madiun mendukung untuk dapat mencetak kader yang nantinya dapat mendukung cita-cita kaum komunis.

Dengan didirikannya Marx House di Madiun, maka perkembangan serikat buruh di karesidenan ini meningkat. Serikat-serikat buruh yang berkembang dalam karesidenan ini terutama berasal dari serikat dagang, yaitu serikat-serikat buruh perekertapian, serikat buruh perkebunan dan serikat pegawai pemerintahan.³⁸ Serikat-serikat buruh tersebut semuanya tergabung dalam SOBSI. SOBSI Madiun dalam perkembangannya juga terjun ke dalam politik,

hal ini terlihat dengan banyaknya tokoh-tokoh SOBSI yang terjun ke arena politik. Dengan semakin dalamnya SOBSI terjun ke arena politik inilah yang merupakan salah satu sebab mengapa dalam tubuh SOBSI terjadi perpecahan yang melemahkan kesatuan SOBSI.

6. Perpecahan dalam Tubuh SOBSI

Perpecahan dan kemunduran SOBSI juga karena kemunduran dalam komunis. SOBSI atau serikat buruh merupakan bagian dari PKI, maka jika partai tersebut mengalami kemunduran, berarti juga kemunduran bagi serikat buruhnya. SOBSI sebagai organisasi terbesar yang berkiprah ke kiri dan terlalu dalam terlibat dalam politik, membuat organisasi atau serikat buruh lainnya tidak begitu suka terhadap SOBSI. Hal itu terutama datang dari serikat buruh Islam. Walaupun SOBSI telah menyatakan diri tidak terlibat dalam politik,

³⁸ David Charles Anderson, *Peristiwa Madiun 1948. Kudeta atau Konflik Internal Tentara?*, (Jakarta : Media Pressindo, 2003) hal. 45-46.

tapi dalam menjalankan aksinya, SOBSI tidak lepas dari kegiatan politik, karena serikat buruh tidak lepas dari perjuangan politik, terutama dalam perjuangan untuk kemajuan buruh dan dalam perjuangannya itu, SOBSI bekerjasama dengan serikat buruh atau golongan dan partai politik yang sehaluan.

Perpecahan yang dihadapi SOBSI cukup serius, karena banyak anggota yang keluar dari SOBSI. Dengan demikian ciri-ciri gerakan buruh dalam periode revolusi fisik ini sedikit banyak masih mewarisi sifat-sifat gerakan buruh sebagai gerakan politik dan mereka juga menginginkan gerakan buruh yang perjuangannya bersifat non politik, sehingga terlihat tidak jelasnya arah gerakan buruh yang akan dituju, karena masih ada perbedaan pendirian dalam gerakan buruh. Namun dari semua itu, serikat-serikat atau gerakan-gerakan buruh Indonesia tidak lepas dari persoalan-persoalan yang melanda Indonesia, terutama dalam hal perjuangan kemerdekaan. Serikat-serikat buruh tersebut,

bagaimanapun juga telah banyak berperan dalam perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia.

Persoalan-persoalan

yang muncul dalam SOBSI sebenarnya tidak hanya berasal dari tubuh SOBSI itu sendiri, tetapi juga dari serikat buruh lain yang sudah menyebut SOBSI sebagai gerakan buruh yang beraliran kiri.. Adanya perbedaan pendirian dan sikap dalam anggota-anggota SOBSI sangat memudahkan terjadinya perpecahan di dalamnya. Dalam hal ini, perbedaan pendapat dan sikap mengenai arah gerakan buruh dalam SOBSI, sebenarnya tidak hanya terjadi masa itu saja, tetapi pada masa penjajahan atau sekitar tahun 1900-an (awal abad 20), gerakan-gerakan buruh pada masa itu sudah ada perbedaan pandangan dan perpecahan dalam menentukan pola gerakan buruh.

SOBSI sebagai

organisasi buruh terbesar juga mengalami pasang surut dalam perjalanannya. Perbedaan pandangan dalam tubuh SOBSI menjadikan SOBSI lemah, sehingga

akan sangat mudah untuk dipecah-belah oleh kelompok-kelompok yang menyatakan diri tidak suka terhadap arus pergerakan SOBSI.

SOBSI sebagai

wadah organisasi buruh bersifat vaksentral, artinya menghimpun organisasi buruh yang ada dengan maksud untuk menjadi wadah dari semua organisasi buruh vak di seluruh Indonesia. Perkembangan politik yang terjadi pada pertengahan tahun 1948, yaitu sehubungan dengan Persetujuan Renville membawa dampak bagi persatuan SOBSI, yaitu perpecahan dalam SOBSI semakin meluas. Setelah ditandatangani perjanjian Renville, SOBSI mengalami perpecahan hebat, karena 19 dari 34 anggotanya menyatakan diri keluar dari SOBSI.³⁹ Oleh karena itu secara apriori dapat dikatakan bahwa tahun 1947 merupakan tahun konsolidasi dari organisasi buruh dan tahun 1948 merupakan periode perpecahan.

³⁹ Sandra, *Sedjarah Pergerakan Buruh Indonesia*, (Djakarta : PT. Pustaka Rakyat, 1961), hal. 66

Dengan demikian

secara organisatoris, SOBSI kehilangan popularitasnya sejajar dengan kemunduran Partai Sosialis sayap kiri pimpinan Amir Syarifudin. Penandatanganan Perjanjian Renville betul-betul telah membawa pengaruh yang merugikan bagi golongannya serta bagi popularitas Partai Sosialis yang menjadi merosot di mata rakyat. Hal itu juga dikarenakan dibentuknya Front Demokrasi Rakyat (FDR) pada tanggal 28 Juni 1948. Dengan dibentuknya FDR yang merupakan fusi dari PKI Jusuf, Partai Buruh, dan Partai Sosialis yang mengakui Marxisme-Leninisme, mengakibatkan semakin rumitnya gerakan buruh. Jusuf

yang mendirikan PKI di luar PKI Musso yang illegal semakin memperlemah gerakan komunis. Selain itu juga karena ketidakpahaman kaum buruh yang menganggap bahwa komunis adalah pemimpin mereka, serta kurang sadarnya buruh sebagai

pemimpin Revolusi Nasional yang anti-imperialisme dan anti-feodalisme.⁴⁰

Di tahun 1946, sekelompok orang yang tidak setuju dengan SOBSI-setelah menerima Perjanjian Linggarjati-memisahkan diri dari SOBSI. Di dalam lapangan perburuhan, kemunduran itu berakibat bagi keutuhan SOBSI, sehingga SOBSI terpecah menjadi tiga golongan yang masing-masing memiliki pendirian yang berbeda-beda. Golongan itu adalah :

- a. SOBSI yang menolak keputusan pelaksanaan Linggarjati dan Renville.
- b. Gabungan Serikat Buruh Revolusioner Indonesia (GASBRI), yang menerima pelaksanaan keputusan Linggarjati dan Renville.
- c. Serikat Buruh, yang merdeka yang merupakan pendukung ide tentang pemisahan Serikat Buruh dengan Politik.⁴¹

SOBSI dan GASBRI sebenarnya mula-mula merupakan pendukung utama dari perjuangan politik sayap kiri, tetapi dengan penandatanganan perjanjian Renville oleh pemerintah sayap kiri, GASBRI menjadi orang efektif dari gerakan Revolusioner Rakyat, yakni bagian partai sayap kiri dan Partai Sosialis yang berlandaskan ide-ide Tan Malaka. Oleh karena itu keduanya cenderung untuk melakukan persaingan dan mencari landasan berpijak yang berbeda.

⁴⁰ Edi Cahyono, *Loc. Cit.*

⁴¹ Drs. Sarjana Sigit Wahyudi, M.S., *Op. Cit*, hal.

GASBRI memperoleh landasan berpijak di kalangan militer, sebaliknya SOBSI memperoleh landasan berpijak di kalangan buruh.

Partai Amir Syarifudin pada hakekatnya tinggal memperoleh dukungan dari PKI, Partai Buruh dan Pesindo, sebagaimana terbukti dalam *triumvirat* yang duduk dalam kepemimpinan FDR, yaitu Amir Syarifuddin, Tan Liang Jie dan Abdul Masdjid.⁴² Tampaknya FDR memahami kemundurannya dalam bidang politik dan sisa-sisa pengaruhnya yang semakin menipis di kalangan militer. Oleh karena itu FDR tidak lagi menggantungkan perjuangannya secara parlementer, tetapi menempuh saluran yang bersifat ekstra parlementer. Dengan sendirinya FDR dapat memperbaiki kembali reputasinya dengan mencari dukungan baik dari kalangan rakyat, buruh, petani kecil ataupun dari kalangan militer atau paling tidak mempersiapkan kekuatan dari laskar Pesindonya. Dengan usaha ini nampaknya FDR yakin dapat menggulingkan pemerintahan Hatta yang dianggapnya dalam keadaan lemah dikarenakan Republik Indonesia baru hangat-hangatnya menghadapi agresi Belanda.⁴³

Pada tahun-tahun 1946-1947 kaum komunis Indonesia karena sikapnya sendiri telah diserang dari segala arah, baik oleh tentara, golongan Islam, golongan pamong praja dan juga oleh sejumlah tokoh-tokoh pemuda '45 bersama-sama lawan lamanya, Tan Malaka. Selama tahun itu pula ketegangan antara kelompok kiri dengan TRI/TNI terus menerus terjadi. Di samping menghadapi tentara, grup kiri juga menghadapi oposisi yang kuat dari grup Tan

⁴² George Mc. Turnan Kahin, *Nasionalisme and Revolution in Indonesia*, (New York Ithaca : Cornell University Press, 1952), hal. 259

Malaka yang disokong oleh sejumlah lawan-lawan PKI yang tidak senang dengan komunis. Selain itu Tan Malaka juga mendapat sokongan dari tokoh-tokoh tua, seperti Iwa Kusumasumantri, Mr. Soebardjo dan kawan-kawannya, tetapi dukungan terkuat terhadap Tan Malaka berasal dari sejumlah tokoh-tokoh pemuda '45 seperti Sukarni, Chaerul Saleh, Adam Malik. Dukungan mereka merupakan identifikasi diri dari grup Tan Malaka, bahwa mereka adalah penerus cita-cita revolusioner dari para pemuda.⁴⁴

Telah dijelaskan sebelumnya, bahwa salah satu penyebab kemunduran atau perpecahan dalam tubuh SOBSI salah satunya adalah dengan adanya Persetujuan Linggarjati. Dalam pandangan SOBSI, Linggarjati adalah sebagai konsolidasi kemenangan.⁴⁵ Amir Syarifuddin (pada waktu itu adalah Menteri Pertahanan) menyatakan bahwa mereka tidak takut jika melalui perundingan tersebut, Indonesia akan kehilangan daerah⁴⁶, karena mereka melihat bahwa kemerdekaan Indonesia terletak dalam jalan diplomasi.

Sikap komunis dengan sendirinya bertentangan dengan sikap golongan-golongan pemuda seperti Chairul Saleh dan kawan-kawannya serta bertentangan dengan sikap Tan Malaka. Selain itu PKI juga mendapatkan tantangan dari "front kanan" yang diwakili oleh Masyumi dan PNI. Pertentangan PKI dan golongan Islam juga merupakan pertentangan lama sejak tahun 1917, yaitu pada waktu kongres Sarekat Islam. Sikap ini kemudian ditambah lagi dengan "kesan

⁴³ *Ibid*, hal 207

⁴⁴ Soe Hok Gie, *Op. Cit*, hal. 96.

⁴⁵ *Ibid*, hal. 98.

atheis” pada kaum komunis. Dalam menghadapi PKI, Tan Malaka menghimpun 138 organisasi massa, politik, laskar dan juga pimpinan TRI dalam sebuah front yang bernama Persatuan Perjuangan. Tan Malaka juga menyusun sebuah panitia yang terdiri dari Pesindo, Masyumi, Dewan Pusat Perjuangan Jawa Tengah, Serindo, Partai Sosialis, Markas Besar TRI, TLRI, Perwari, Tan Malaka dan Panitia Musyawarah Solo. Dalam rapat panitia itu, Menteri Pertahanan dan Presiden Sukarno tidak hadir dan tidak mengirimkan wakil.⁴⁷

Dari pihak Partai Sosialis sendiri telah menyadari bahwa Tan Malaka akan menyulitkan mereka dan akhirnya Partai Sosialis mengajak masyarakat untuk membentuk Barisan Nasional untuk menyusun program perjuangan bersama, tetapi hal itu tidak berhasil. Pada akhirnya Sutan Sahrir sebagai ketua Partai Sosialis sekaligus sebagai Perdana Menteri meletakkan jabatannya pada tanggal 28 Februari 1946 sebagai pilihan satu satunya, karena grupnya tidak setuju dengan garis Persatuan Perjuangan. Dengan mundurnya Sutan Sahrir sebagai Perdana Menteri, Presiden meminta pimpinan Persatuan Perjuangan untuk membentuk kabinet baru, tetapi justru mereka terpecah-pecah karena kelompok-kelompok yang berada dalam Persatuan Perjuangan mempunyai ambisi sendiri-sendiri. Akhirnya Presiden meminta Sutan Sahrir untuk membentuk lagi kabinetnya yang kedua. Dengan ini, posisi Sahrir menjadi kuat. Tan Malaka berusaha mengorganisasi kembali Persatuan Perjuangan di Madiun pada tanggal 15 Maret 1946, sementara itu golongan-golongan kiri mulai keluar dari Persatuan Perjuangan. Pandangan masyarakat terhadap Persatuan Perjuangan

⁴⁶ *Boeroeh*, 1 Februari 1947 dalam Soe Hok Gie, *Op. Cit.*, hal.

menjadi buruk. Setelah pertemuan Persatuan Perjuangan berakhir, Pesindo mulai unjuk gigi di alun-alun Madiun, sedangkan laskar Hizbullah yang pro Tan Malaka berada dalam posisi yang terjepit. Sejak saat itu Tan Malaka bukan lagi menjadi bahaya “maut” bagi grup komunis, karena Tan Malaka ditangkap dan dipenjarakan atas usaha “*coup d’etat*” pada tanggal 3 Juli 1946.

Dari peristiwa penangkapan atas Tan Malaka tersebut, telah lahir sebuah grup baru dari kaum komunis. Kelompok tersebut menyadari bahwa dalam menghadapi lawan politiknya diperlukan suatu tindakan yang terarah dan kerjasama yang kuat. Dalam menghadapi Tan Malaka di Madiun, grup-grup tersebut telah mengikat diri dalam sebuah kelompok yang dinamakan blok Sosialis. Pada bulan Juni, blok Sosialis ini kemudian berganti nama menjadi Front Sosialis untuk kemudian berganti nama menjadi ‘sayap kiri’ pada bulan September 1946 di Madiun.⁴⁷ Dalam Sayap Kiri terdiri dari Partai Sosialis, Partai Buruh Indonesia, PKI dan Pesindo. Sayap kiri tersebut kemudian berganti nama menjadi FDR (Front Demokrasi Rakyat) pada tanggal 28 Juni 1948. FDR semakin tegas sebagai partai politik ekstrem kiri, sehingga membawa seluruh organisasi di bawahnya, tak terkecuali SOBSI, sehingga mau tidak mau organisasi yang terkandung di dalamnya juga mengandung sikap ekstrem kiri. Secara *de facto*, semenjak Februari 1948, SOBSI merupakan bagian dari FDR.

⁴⁷ Soe Hok Gie, *Op. Cit.*, hal. 101.

⁴⁸ *Ibid*, hal 105

c. Pemogokan Buruh

Di samping bidang kelaskaran, di bidang perburuhan dan pertanian PKI/FDR mempunyai pengaruh yang kuat. Pengaruh ini terutama sekali berakar pada organisasi Barisan Tani Indonesia (BTI) dan SOBSI. Waktu itu SOBSI mempunyai anggota kurang-lebih 200.000 sampai 300.000 orang. Perjuangan politik FDR terlihat dalam aksi FDR melawan pemerintah yang terjadi di Delanggu. Delanggu adalah sebuah tempat yang banyak terdapat usaha penanaman kapas dan pabrik karung goni oleh pemerintah. Daerah Delanggu adalah daerah yang cukup menghasilkan dan tidak terlalu miskin. Suatu momen yang penting dalam Pemogokan Delanggu ialah terjadi pada tanggal 26 Mei 1948. Pemogokan Delanggu dalam pandangan masyarakat Delanggu yang merupakan masyarakat pedesaan adalah bahwa pemogokan tersebut masih dianggap sebagai peristiwa yang baru terjadi di Delanggu, yaitu di mana kaum buruh perkebunan kapas pertama kali berkenalan dengan model pemogokan yang sistematis

Pemogokan ini hampir melibatkan seluruh pekerja non staf yang bekerja pada perusahaan karung Delanggu serta memperoleh dukungan luas dari partai politik, khususnya partai kiri di dalam forum nasional. Hal ini telah menjadikan pemogokan Delanggu sebagai suatu peristiwa yang kompleks dan bersifat multidimensional. Pemogokan ini bukan saja digerakkan oleh faktor ekonomi dan sosial semata, tetapi juga digerakkan oleh faktor politik (meskipun tidak secara terang-terangan) serta digerakkan oleh faktor militer.⁴⁹

⁴⁹ Drs. Sarjana Sigit Wahyudi M.S., *Op. Cit.* hal. 71-72.

Suatu hal yang menonjol dari Pemogokan Delanggu adalah peranan Sarbupri (Sarikat Buruh Perkebunan Republik Indonesia) dan SOBSI. Sekitar 60 persen dari buruh yang terlibat dalam pemogokan pada pabrik karung Delanggu adalah pengikut Sarbupri. Persoalan-persoalan perselisihan buruh dan tuntutan telah dimulai sejak bulan Februari 1948. Pihak buruh di Delanggu dipimpin oleh Lembaga Buruh Tani yang bernaung di bawah SOBSI. Mereka menuntut agar buruh tetap dan buruh lepas (musiman) diberikan gaji in natura (disamping uang) sebanyak 3 meter kain untuk tahun 1947 dan 20 kilogram (maksimum 35 kg) beras sekeluarga per bulan. Pemerintah pada prinsipnya setuju untuk meluluskan permintaan buruh, tetapi soal-soal praktis menghalanginya, misalnya tidak adanya persediaan tekstil yang cukup dan juga kerugian-kerugian yang timbul dan membahayakan nasib perusahaan tersebut.⁵⁰

Pendapatan yang diperoleh buruh Delanggu tidak memenuhi kelayakan hidup. Upah buruh non staf, khususnya buruh lapangan pada umumnya upah hanya untuk membeli beras saja. Bagi FDR harus ada usaha untuk merealisasikan peningkatan popularitas dengan jalan memasukkan kader-kader FDR ke dalam gerakan buruh yang ada. Popularitas ini sangat penting untuk membangkitkan sentimen rakyat sejalan dengan kebutuhan bagi sebuah revolusi. Untuk tujuan ini, Sarbupri merupakan saluran formal yang strategis bagi FDR, karena secara formal Sarbupri merupakan pendukung SOBSI yang ada di bawah pengaruh FDR. Sarbupri sebagai organisasi resmi dari buruh perkebunan sangat potensial sebagai penggerak massa. Dengan tampilnya kader-kader FDR seperti

K. Werdoyo, Maruto Darusman dan Suryahman, tidak diragukan lagi bahwa keterlibatan Sarbupri dalam pergolakan politik pada saat itu semakin dalam.⁵¹

Dalam Pemogokan Delanggu, PKI melancarkan politik pergerakan massa. Pemogokan berjalan lancar dan tertib, sementara kader-kader FDR memberikan bantuan dengan jalan menteror golongan yang hendak mengisi kekosongan sebagai akibat berlangsungnya pemogokan. Beberapa pertikaian darah terjadi, misalnya di daerah Juwiring dan Delanggu kota. Bentrokan ini terjadi antara pendukung FDR dengan pendukung Masyumi, sehingga daerah Delanggu ditempatkan di bawah pengawasan langsung pemerintah militer. Apabila diperhatikan dan diamati, Pemogokan Delanggu memang sangat unik. Secara lokal pemogokan ini ditampilkan sebagai kejadian yang digerakkan oleh faktor lokal, yaitu faktor sosial dan ekonomi, tetapi di lain pihak pemogokan ini juga berskala nasional. Pemogokan Delanggu ditampilkan sebagai peristiwa yang digerakkan oleh faktor politik, karena pada saat itu juga diwarnai dengan jatuhnya Kabinet Amir Syarifuddin pada Januari 1948 yang memberikan kesan bahwa kepemimpinan sayap kiri dari Partai Sosialis itu jauh lebih lemah dari pada Partai Sosialis sayap kanan.⁵²

Pemogokan Delanggu pada dasarnya merupakan sebuah peristiwa politik. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa pemogokan itu menjadi landasan perjuangan politik dari partai-partai oposisi dalam menghadapi pemerintah.

⁵⁰ Soe Hok Gie, *Op. Cit.*, hal. 201.

⁵¹ Drs. Sarjana Sigit Wahyudi, *Op. Cit.*, hal. 80.

⁵² *Ibid*, hal. 82.

Pemogokan Delanggu kemudian tidak dapat dipandang sebagai gerakan buruh yang memperjuangkan segi sosial dan ekonomi semata-mata, melainkan juga sebagai sarana untuk landasan perjuangan politik. Pemogokan Delanggu dijumpakan sebagai bagian dari kampanye untuk meningkatkan prestise FDR dan sekaligus untuk memobilisasi massa di dalam mencari dukungan politik dalam perjuangan menghadapi pelaksanaan kebijakan Kabinet Hatta.⁵³

Tindakan pemogokan tersebut yang mengatasnamakan hak-hak buruh, dikecam dengan hebat oleh golongan-golongan lain. Golongan yang mengecam pemogokan tersebut menanyakan mengapa dalam keadaan Republik yang sulit ini SOBSI masih mencari keuntungan politik. Di satu pihak pemerintah menyatakan bersedia menerima tuntutan-tuntutan buruh, tetapi di pihak lain menegaskan akan adanya realitas-realitas yang harus dimengerti. Akhirnya tokoh-tokoh buruh datang pada Hatta dengan agar penyelesaian tercapai. Hatta meminta pada mereka untuk kerja terus, sedangkan pihak FDR setuju dan meminta agar tuntutannya diakui sebagai “kebenaran dan keadilan” dan pada tanggal 18 Juli 1948 jam 07.00 pagi, Pemogokan Delanggu berakhir.⁵⁴

Selain terjadi Pemogokan Delanggu, di daerah lain juga terjadi pemogokan yang dilakukan buruh di bawah naungan SOBSI. Ketegangan antara pemerintah dengan buruh juga terjadi di Madiun. Pada tanggal 23 Juli 1948, Wirosudarno, seorang buruh kereta api ditembak oleh seorang anggota tentara. Selain itu, juga terjadi aksi pemukulan terhadap seorang buruh kantor Balai Kota Madiun oleh

⁵³ *Ibid*, hal. 87.

⁵⁴ Soe Hok Gie, *Op. Cit.*, hal 205.

seorang perwira. Peristiwa-peristiwa itu diprotes oleh SBKA dan SOBSI yang pada akhirnya berdampak bagi hubungan antara tentara dengan golongan kiri yang semakin memburuk.⁵⁵ Terjadi juga pemogokan di pusat penyulingan minyak di Cepu, yaitu suatu basis PKI, yang terjadi pada awal September. Alasan pemogokan ini bukan semata-mata karena masalah ekonomi, tetapi juga bermuatan politis. Di kota praja Madiun juga terjadi suatu pemogokan oleh pegawai administrasi kotapraja yang dimulai pada tanggal 13 September 1948 dengan alasan karena adanya perlakuan kasar terhadap pekerja oleh anggota-anggota tentara.⁵⁶

D. Peristiwa Madiun 1948

Pada tahun 1948, Madiun berpenduduk sekitar dua ratus ribu jiwa, merupakan kota terbesar ketiga di wilayah Republik setelah Yogyakarta dan Solo. Di masa lalu, Madiun seringkali menjadi pangkalan tempat para pangeran Jawa yang membangkang dalam melakukan serangan ke Solo. Kemudian kota ini berkembang sebagai suatu pusat komunikasi utama, yang bukan hanya dihubungkan dengan adanya jalan raya trans Jawa dan jalan kereta api., namun juga memiliki banyak persawahan, daerah-daerah perkebunan, dan adanya pelabuhan di Pacitan di pantai selatan. Terutama oleh karena posisi strategisnya pada persilangan antara Jawa Tengah dengan Jawa Timur, Madiun berkembang dengan budaya priyayi perkotaan yang cukup cangih dan menjadi kota politik dan pemerintahan yang cukup penting. Pada permulaan masa revolusi, perkembangan politik dalam karesidenan ini berada di bawah dominasi kelompok-kelompok perjuangan yang berorientasi pada Partai Sosialis. Mereka secara dominan mewarnai pergerakan pemuda setempat. Pada tahun 1946, pemimpin komunis Maruto Darusman mendirikan sebuah *Marx House* di Madiun yang berfungsi sebagai pusat pendidikan dan pelatihan politik bagi golongan kiri. Dukungan terhadap golongan kiri dalam karesidenan ini berasal dari serikat-serikat dagang, terutama dari serikat-serikat perkeretaapian yang kuat, serikat-serikat buruh perkebunan dan serikat pegawai pemerintahan.⁵⁷

Sebelum terjadi perebutan kekuasaan di Madiun oleh PKI Muso cs., telah terjadi kekacauan, penculikan, dan lain sebagainya di beberapa tempat, terutama di Solo di mana terjadi penculikan-penculikan terhadap pemimpin-pemimpin terkemuka, baik dari kalangan militer maupun dari kalangan partai politik.

Adanya empat butir program pemerintahan Hatta, yaitu menyelenggarakan Renville, mencapai Negara Indonesia Serikat, rasionalisasi, dan pembangunan, namun keempat-empatnya sejatinya bertumpu di atas dua prioritas saja, ialah pelaksanaan Perjanjian Renville dan rasionalisasi Angkatan Perang Republik Indonesia. Jelaslah bahwa politik "mencla-mencle" Masyumi-PNI terhadap masalah Renville yang seiring sejalan pula dengan langkah kebijakan pemerintah Hatta-Sukiman, tidak lain untuk menyingkirkan sayap kiri dari gelanggang politik nasional. Dengan begitu kabinet baru yang tersusun hanya didukung oleh parpol-parpol yang siap kompromi dan dipimpin oleh Hatta.⁵⁸

⁵⁵ *Ibid*, hal. 234.

⁵⁶ Anthoni J.S. Reid, *Revolusi Nasional Indonesia*, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1966), hal. 237.

⁵⁷ David Charles Anderson, *Op. Cit.*, hal. 45-51.

⁵⁸ Hersri Setiawan, *Negara Madiun? Kesaksian Soemarsono Pelaku Perjuangan*, (FuSPAD, 2003), hal. 6-7.

Pada rapat raksasa di Solo, Sayap Kiri diubah menjadi FDR (Front Demokrasi Rakyat) yang merupakan fusi dari tiga partai kelas buruh (PKI Jusuf, PBI, dan Partai Sosialis). Dalam rapat tersebut, karakter Kabinet Hatta yang presidensial dikecam dan dituntut agar kembali ke parlementer dan ditawarkan sebuah program baru yang lebih bertekanan pada kepentingan kaum buruh dan kaum tani, namun tetap sepakat agar perjanjian Renville dilaksanakan.⁵⁹

Adanya fusi tiga partai kelas buruh (PKI Joesoef, PBI, dan Partai Sosialis) yang mengakui Marxisme-Leninisme dan tergabung dalam FDR (Front Demokrasi Rakyat) yang dibentuk pada tanggal 28 Juni 1948, telah mengakibatkan ruwetnya gerakan buruh. Joesoef yang mendirikan PKI di luar PKI Moeso yang ilegal semakin memperlemah gerakan komunisme. Bersandar pada Lenin yang meletakkan komunis sebagai pemimpin gerakan buruh (serikat buruh), sedang serikat buruh dipahami sebagai sekolah untuk komunisme, melalaikan propaganda komunisme di kalangan kaum buruh, berarti dengan langsung menghalangi bertambah sadarnya kaum buruh sebagai pemimpin Revolusi Nasional yang anti-imperialisme dan anti-feodalisme. PKI Moeso memperhatikan keruwetan dan kekacauan ini dan berusaha mencari jalan keluar dari jurang reformis dengan mengadakan kritik dan *self* kritik, terutama dalam rapat pleno CC PKI 10 sampai 11 Juni 1948 dan dalam rapat Politbiro tanggal 2 Juli 1948. Semua anggota Politbiro mengakui kesalahan-kesalahannya dengan terus terang dan akan memperbaiki secepatnya. Rapat Politbiro memutuskan untuk mengadakan perubahan yang radikal, yang bertujuan supaya secepat-lekasnya mengembalikan kedudukan PKI sebagai pelopor gerakan kelas buruh dan secepat-lekasnya mengembalikan tradisi PKI yang baik pada waktu sebelum dan selama perang dunia kedua.⁶⁰

Benturan yang kedua mengambil bentuk dalam politik rasionalisasi Hatta, yang oleh pers dan awam masa itu dikenal juga dalam istilah "Re-Ra" kependekan dari "Reorganisasi" dan "Rasionalisasi" angkatan perang. Meskipun alasan dasar Re-Ra menurut A.H. Nasution sebagai cara untuk menjadikan angkatan perang Indonesia profesional dan untuk mendapatkannya di bawah satu komando, tapi sebenarnya melalui kebijaksanaan Re-Ra tersebut, Hatta berusaha membersihkan anasir komunis dari tubuh Angkatan Perang.

Pengaruh sosial dalam Front Demokrasi Rakyat (FDR) ditopang atas dua sendi, yaitu kemiliteran (laskar rakyat, yang biasa disebut TNI Masyarakat) dan serikat-serikat buruh (mayoritas SOBSI). FDR pun menepuh jalan politik praktis. FDR menawarkan sebuah program nasional yang mendorong untuk terbentuknya pemerintah baru yang bersedia menerima program nasional sebagai program politiknya. Semua tuntutan FDR ditolak, tetapi program nasional disahkan dan diterima oleh Kabinet Hatta. Dengan begitu program nasional FDR telah menjadi pedoman politik bagi semua parpol (kecuali Masyumi dan PNI).

Gelombang politik nasional sepanjang akhir tahun 1947 sampai September 1948 penuh dilanda gelombang intrik, fitnah, dan provokasi. Seperti telah disebutkan di atas bahwa pada masa itu tengah terjadi berbagai pemogokan buruh, antara lain pemogokan di Delanggu (Sarbupri/PKI) melawan STII, laskar Pesindo dan laskar Hizbullah. Selain itu bertolak antara pekerja kotapraja di Madiun dengan tentara yang pada akhirnya membawa akibat semakin renggangnya hubungan antara PKI dengan militer.

Pada hari kemerdekaan RI ke-3, 17 Agustus 1948, Soekarno memberikan amnesti pada tokoh-tokoh Persatuan Perjuangan, tapol-tapol gembong *coup d'etat* 3 Juli 1946, Tan Malaka, Subarjo, Iwa Kusumasumantri, Sukarni, dan Abikusno Tjokrosuryo. Kelompok Tan Malaka ini lalu menamai dirinya Gerakan Revolusi Rakyat (GRR). Mulai minggu pertama bulan September dan selanjutnya, banyak perwira pro-FDR yang dipecat dari kedudukan penting dalam satuan-satuan tentara regular. Pada tanggal 7 September 1948, Muso, Amir Syarifudin, dan Setiadji berada di Solo. Tokoh-tokoh tersebut ikut ambil bagian dalam Kongres Luar Biasa Serikat Buruh Gula (SBG). Kongres ini mendukung Presidium SOBSI tanggal 23 Agustus 1948, sehubungan dengan Jalan Baru yang ditempuh PKI. Dalam "Jalan Baru" (Resolusi CC PKI di bulan Agustus tersebut), diterangkan bahwa tiap-tiap komunis harus yakin, bahwa dengan tidak adanya Front Nasional, maka kemenangan tidak akan diperoleh oleh komunis. Oleh karena itu dijelaskan juga dalam resolusi tersebut bahwa kewajiban PKI dan serikat-serikat buruh adalah untuk ikut mengambil bagian dan berperan penting dalam perjuangan dalam membela kepentingan-kepentingan kaum buruh. Perjuangan tersebut oleh kelompok komunis harus dilakukan sedemikian rupa agar kemenangan yang diperoleh tidak hanya untuk kaum buruh saja, tetapi juga memberi inspirasi bagi kelas-kelas lain dan golongan-golongan lain, kepada kaum tani, pengusaha-pengusaha kecil dan menengah, golongan intelektual, dan rakyat. Selain itu dalam resolusi tersebut juga disebutkan, bahwa perjuangan dalam membela kepentingan-kepentingan kaum buruh harus terlebih dahulu mempersatukan seluruh buruh di bawah pimpinan organisasi-organisasi buruh, di mana kaum komunis harus membuktikan pembelaannya terhadap kepentingan-kepentingan ekonomi dan politik dari kaum buruh. Dalam resolusi itu diungkapkan juga bahwa front buruh adalah front terkuat, paling bersatu, paling maju, dan paling sadar dalam front persatuan nasional. Front buruh dan front tani juga diharuskan ikut mengambil bagian dalam perjuangan untuk menggalang front persatuan nasional (front demokrasi atau front pembela tanah air), yaitu persatuan dari seluruh rakyat Indonesia untuk melaksanakan cita-cita politiknya, di mana sumber kekuatan ada pada rakyat dengan terbentuknya Republik Demokrasi Rakyat. Dalam Front Persatuan Nasional ini, kaum buruh dan tani adalah basisnya.⁶¹ Kemudian pada tanggal 8 September 1948, Muso dan kawan lainnya

⁵⁹ *Ibid.*

⁶⁰ Edi Cahyono, *Loc. Cit.*

⁶¹ Resolusi CentralCommite PKI, *Kewajiban Front Persatuan Buruh*, (Jakarta: Yayasan Pembaharuan, 1952)

kembali ke Madiun. Dalam rapat umum, Muso berpidato di depan masanya mengenai masalah-masalah penting yang dihadapi revolusi nasional waktu itu. Selain itu juga disampaikan oleh Muso tentang usaha-usaha dan propaganda dari dalam maupun dari luar negeri yang memusuhi kaum komunis, memfitnah komunis, dan mendeskripsikannya di mata rakyat, sebagai kaum yang tidak patriotik. Pada kesempatan pidato itu Muso juga memaparkan tentang garis umum PKI yang bertolak dari kepentingan pokok rakyat Indonesia. Muso menginginkan bahwa dalam situasi tersebut harus disatukan semua kekuatan anti-imperialis dalam satu front nasional untuk memenangkan perjuangan dalam menghadapi agresi Belanda. Muso juga menekankan bahwa program ekonomi kaum komunis Indonesia sejalan dengan pasal 33 Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945. Sementara itu kelompok GRR juga meningkatkan aksi-aksi provokasi. Dalam rapat-rapat raksasa mereka menyebut pemimpin-pemimpin FDR PKI sebagai “komunis-komunis Ratu Wilhelmina”, menuduh FDR telah menjual Indonesia pada kolonialis Belanda, memalsu dokumen-dokumen PKI dan tanda tangan pimpinan PKI sebagai upaya untuk membuktikan “rencana kudeta” mereka. Pada tanggal 16 September 1948, markas besar Pesindo di Solo diserbu oleh Pasukan Siliwangi dengan memakai kedok Barisan Banteng dan semua arsip dan dokumen Pesindo hilang dicuri. Kemudian pada tanggal 17 September 1948 di mana pada saat itu sedang berlangsungnya Konferensi Serikat Buruh Kereta Api (SBKA) di gedung SOBSI, Tugu, Yogyakarta, dikepung oleh pasukan-pasukan pemerintah dan pemimpin-pemimpin SBKA ditangkap. Pada tanggal 18 September diadakan Rapat CC PKI di Yogyakarta yang juga dihadiri oleh anggota-anggota Politbiro, seperti Maruto Darusman, Lukman dan Njoto. Namun sesudah semua peserta hadir, rapat tersebut terpaksa dibubarkan karena mengingat pengalaman yang terjadi dalam Konferensi SBKA tanggal 17 September 1948 yang diserbu oleh tentara. Pada waktu itu rombongan Muso dan Amir Syarifudin cs. sampai di Cepu, sedangkan Soeripno dari Yogyakarta berangkat ke Madiun. Sementara itu keadaan di Madiun, sejak beberapa waktu telah memanas, karena pasukan-pasukan yang dikirim langsung oleh pemerintah pusat telah menduduki pabrik-pabrik gula, mengadakan “latihan-latihan” sendiri dan memukuli buruh Balai Kota, dan menembak mati seorang buruh kereta api Madiun.⁶² FDR mempunyai posisi yang sangat kuat di Madiun. Dewan Pusat FDR memutuskan untuk menggunakan Madiun sebagai daerah basis, apabila situasi menjadi kritis. Hal itu terjadi pada sekitar bulan September. Madiun inilah merupakan kubu terbesar dan terakhir bagi FDR atau PKI. Jika Madiun jatuh, hampir bisa dipastikan akan hancurlah semua posisinya yang lebih lemah di seluruh tanah air. Perhitungan demikian tampaknya juga ada pada A.H. Nasution-Divisi Siliwangi dan pemerintah Hatta-Sukiman, bahkan setelah mematahkan Panembahan Senopati di Solo pada 17 September 1948, satuan-satuan Siliwangi dan Barisan Banteng telah bersiap-siap menyerbu benteng Pesindo di Madiun untuk melengkapinya.⁶³

Tanggal 19 September, mulai pukul 01.00 sampai pukul 08.00, di Madiun, pasukan TNI setempat (Brigade 29) melucuti pasukan-pasukan yang dikirim oleh pemerintah pusat. Hal itu bukan merupakan insiden yang pertama kalinya, tetapi sudah beberapa kali terjadi. Peristiwa yang terjadi di Madiun pada waktu itu oleh pemerintah Hatta, yaitu melalui siaran radio oleh Presiden Sukarno, dikatakan bahwa PKI-Muso mengadakan *coup* di Madiun dan berusaha mendirikan Pemerintahan Soviet di bawah pimpinan Muso. Pada waktu itu juga sedang berlangsung Kongres PBI di Kediri yang memutuskan bahwa PBI bergabung dengan PKI, para peserta kongres setelah mendengar berita siaran radio dari pemerintah, kongres segera dibubarkan. Mereka tidak setuju dengan pernyataan pemerintah yang menuduh komunis mengadakan kudeta di Madiun, karena para pemimpin-pemimpin mereka tidak sedang berada di Madiun. Sedangkan yang terjadi di Madiun pada saat tersebut adalah pengangkatan Residen baru, karena pada waktu itu Residen Madiun sedang berpergian, padahal harus ada yang bertanggungjawab atas keamanan di daerah itu, maka, Supardi, wakil walikota Madiun, atas usul organisasi-organisasi rakyat dan disetujui oleh Letnan Kolonel Sumantri (komandan sub teritorial), Isdarto (Wakil Residen), Purbo (Walikota), Hasanuddin (Ketua SOBSI Daerah Madiun), Istam (Ketua Seksi PKI), Sukiran (Ketua PKI cabang Madiun), Sastrodarmodjo (Ketua Partai Sosialis cabang Madiun), Singomentolo (Ketua Komisariat Daerah Komando), diangkat sebagai pemangku residen sementara yang berkuasa dalam urusan sipil dan militer.⁶⁴

Peristiwa Madiun tidak direncanakan untuk menggulingkan pemerintahan Hatta-Sukiman. Peristiwa itu terjadi karena bertolak dari langkah untuk mencegah pelaksanaan program Re-Ra dan menghentikan ofensif reaksioner pemerintah, Nasution-Siliwangi dan Masyumi-Murba.⁶⁵ Peristiwa Madiun juga merupakan konflik tersendiri antara pasukan-pasukan pemerintah pusat dengan pasukan daerah setempat. Peristiwa itu juga bertujuan untuk “membersihkan” kelompok komunis.

⁶² *Peristiwa Madiun 1948*, diakses dari www.londoh.com dari

www.xs4all.nl/peace/pubind/mr/provo.2.html.

⁶³ Hersri Seriawan, *Op. Cit.*, hal. 14-15.

⁶⁴ Arsip Kementerian Pertahanan Republik Indonesia No. 1121 tentang ‘*Sekitar Coup di Madiun*’

⁶⁵ Hersri Setiawan, *Loc. Cit.*, hal. 15

BAB III

KEHIDUPAN PERBURUHAN MASA DEMOKRASI LIBERAL

A. Kehidupan Perburuhan Indonesia

Masa Demokrasi Liberal banyak terjadi intrik, baik yang berasal dari dalam maupun dari luar. Berbagai persoalan, baik politik maupun ekonomi mewarnai masa itu, sehingga dapat dikatakan bahwa persoalan-persoalan tersebut menghambat jalannya roda pemerintahan. Kondisi yang demikian itu menjadikan suasana perpolitikan dalam negeri menjadi tidak stabil. Masa itu juga ditandai dengan jatuh banggunya kabinet serta dominannya peranan partai politik. Menurut Herbert Feith dikatakan bahwa pada periode Demokrasi Liberal, muncullah pemikir-pemikir politik baru. Selain itu, dalam arena politik sering terjadi konflik antar partai serta pertentangan ideologi. Dengan adanya persaingan antara partai politik tersebut berarti juga merupakan pertentangan antara sistem gagasan.¹

Pada tanggal 17 Agustus 1950, Negara RIS kembali dibentuk kesatuan lagi, tetapi mulai saat itu juga Indonesia tidak memakai UUD 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia sejak tanggal 17 Agustus 1950 menggunakan sistem pemerintahan sebagaimana tercantum dalam UUD-Sementara 1950 pengganti Konstitusi RIS. Dalam transformasi dari bentuk federal dibentuk kesatuan, muncul beberapa usaha ekstrim bersenjata yang ingin mempertahankan bentuk federal, yaitu berupa pemberontakan dan percobaan kudeta di Bandung, Jakarta, Makasar, dan Maluku.² Dalam menanggulangi kejadian tersebut, maka peran militer besar sekali. Setelah Indonesia kembali ke negara kesatuan dengan sistem Demokrasi Liberal atau Demokrasi Parlementer, tidak berarti Indonesia aman dari berbagai persoalan. Di daerah-daerah juga terkena dampak dari kondisi perpolitikan dalam negeri yang semakin memanas. Situasi politik yang demikian itu juga berpengaruh bagi perekonomian negara yang juga mengalami krisis.

Dengan semakin parahnya kondisi perpolitikan dan perekonomian negara, serta persaingan antara berbagai partai politik, maka hal itu akan berpengaruh bagi kehidupan perburuhan di Indonesia. Walaupun Indonesia sudah melaksanakan kemerdekaannya, akan tetapi dengan masih bercokolnya Belanda di Indonesia, maka itu semua akan menghambat jalannya roda pemerintahan. Salah satu bukti bahwa Belanda masih "menguasai" Indonesia adalah terlihat dengan semakin meluasnya perusahaan-perusahaan Belanda yang ada di Indonesia. Hal itu tentu saja merugikan perusahaan-perusahaan nasional dan menimbulkan monopoli dan kapitalisme di Indonesia. Akibatnya adalah rakyat mengalami kesengsaraan, buruh-buruh diperlakukan secara sewenang-wenang dan semakin maraknya pengangguran. Upah yang diterima buruh yang jauh dari standar, sehingga tidak dapat mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari karena semakin meningkatnya harga-harga bahan pokok.

Di tambah lagi persoalan perselisihan di kalangan buruh yang kurang mendapat perhatian serius dari pemerintah, karena kurang tegasnya sikap pemerintah tersebut akan semakin menguntungkan pengusaha-pengusaha

¹ Herbert Feith, *Pemikiran Politik Indonesia 1945-1965 Suatu Pengantar*, Dikutip dari Buku *Partisipasi dan Partai Politik, Sebuah Bunga Rampai*, Oleh Meriam Budiardjo, (Jakarta : Djambatan, 1982), hal. 206-207.

² Nugroho Notosusanto, *Sejarah dan Hankam*, (Jakarta : Pertahanan dan Keamanan, Lembaga Sejarah Hankam, 1968), hal. 82-86 dikutip dari buku *Perkembangan Militer dalam Politik di Indonesia 1945-1966* oleh Yahya A. Muhaimin (Gadjah Mada University Press, 1982), hal. 66.

asing. Berangkat dari persoalan kehidupan buruh tersebut, maka kehidupan buruh di Indonesia diwarnai dengan berbagai aksi pemogokan oleh buruh yang menuntut perbaikan nasib kaum buruh.

1. Kondisi Perburuhan di Madiun

Pada masa lalu, Madiun seringkali menjadi pangkalan tempat para Pangeran Jawa yang membangkang dalam melakukan serangan ke Solo. Kemudian kota ini berkembang sebagai suatu pusat komunikasi utama, yang bukan hanya dihubungkan dengan adanya jalan raya trans Jawa dan jalan kereta api yang menghubungkan Surabaya dan Jawa Barat, namun juga karena memiliki banyak persawahan, daerah-daerah perkebunan, dan adanya pelabuhan di Pacitan di pantai selatan. Terutama oleh karena posisinya yang strategis yaitu pada persilangan antara Jawa Tengah dan Jawa Timur, Madiun berkembang dengan budaya priyayi perkotaan yang cukup canggih dan menjadi kota politik dan pemerintahan yang cukup penting. Pada masa kolonial, Madiun juga telah menjadi pusat pendidikan barat pada tingkat dasar dan menengah yang penting, yang murid-muridnya berasal dari keluarga-keluarga priyayi kaya dari kota-kota lain di Jawa yang lebih kosmopolitan dan ada yang berasal dari dalam karesidenan sendiri.³

Pada permulaan masa revolusi, perkembangan politik dalam karesidenan ini telah berada di bawah dominasi kelompok-kelompok perjuangan yang berorientasi pada Partai Sosialis. Secara dominan kelompok tersebut mewarnai pergerakan pemuda setempat. Akibatnya, dalam waktu yang lama golongan sosialis menjadi lebih memiliki pengaruh daripada golongan nasionalis dan golongan Islam (Masyumi).⁴ Selain itu, di Madiun juga didirikan sebuah *Marx House* oleh seorang pemimpin komunis yang bernama Maruto Darusman. *Marx House* adalah sebuah tempat yang berfungsi sebagai pusat pendidikan dan pelatihan politik bagi golongan kiri.⁵ Dukungan terhadap golongan kiri dalam karesidenan ini berasal dari serikat-serikat dagang, terutama dari serikat-serikat perkertaaipian, serikat-serikat buruh perkebunan, dan serikat pegawai pemerintahan.

Dominannya peranan serikat-serikat buruh yang mendukung kelompok kiri, maka di Madiun ini berkembanglah serikat-serikat buruh dengan pesatnya. Sejak didirikannya Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia (SOBSI) di Yogyakarta pada tanggal 29 November 1946 dan disahkan dalam Kongres Nasional I tanggal 18 Mei 1947 di Malang, maka SOBSI pun memiliki berbagai cabang di daerah-daerah termasuk di antaranya adalah di Madiun. Pada awalnya SOBSI terbentuk sebagai hasil persatuan kaum buruh Indonesia yang tingkat hidupnya masih rendah. Keanggotaan SOBSI berasal dari kaum buruh yang terorganisasi dalam serikat-serikat buruh, baik yang berada di pusat maupun di daerah.⁶ SOBSI merupakan saluran gerakan buruh bagi klas buruh, karena dirasa bahwa SOBSI adalah wadah yang tepat bagi serikat-serikat buruh dalam memperjuangkan tuntutannya dan adanya kesamaan kepentingan dari klas buruh.

Perkembangan serikat buruh, terutama SOBSI di Madiun sendiri juga terpengaruh dengan bangkitnya kembali komunis di bawah pimpinan Aidit. Walaupun PKI dinyatakan sebagai pemberontak dan mengalami kekalahan dalam Peristiwa Madiun 1948, di mana SOBSI juga ikut terlibat di dalamnya, hal tersebut tidak menjadikan SOBSI mundur begitu saja, apalagi setelah Aidit berhasil merehabilitasi PKI di mata masyarakat, sehingga menjadikan PKI bisa terus bergerak.

SOBSI Madiun dalam hal ini kedudukannya adalah Dewan Cabang SOBSI wilayah Jawa Timur. Serikat-serikat buruh yang berkembang di Madiun antara lain adalah Serikat Buruh Kereta Api (SBKA), Serikat Buruh Gula (SBG), Serikat Buruh Angkatan Udara (SERBAUD), Serikat Buruh Kendaraan Bermotor (SBKB). Selain itu, di Madiun juga berkembang serikat-serikat buruh non-SOBSI, yaitu antara lain Kesatuan Buruh Marhaenis (KBM) yang dibentuk oleh Partai Nasional Indonesia (PNI), Serikat Buruh Muslimin Indonesia (Sarbumusi) yang dibentuk oleh Nahdatul Ulama (NU), dan Serikat Buruh Islam Indonesia (SBII) yang dibentuk oleh Masyumi.⁷

SOBSI Madiun pada masa itu berada di Jalan Dr. Sutomo No. 64 Madiun. Sedangkan untuk Dewan Daerah SOBSI Jawa Timur berada di Surabaya, yaitu di Jl. Tidar No. 52 Surabaya.⁸ Untuk Dewan Cabang SOBSI wilayah Jawa

³ David Charles Anderson, *Peristiwa Madiun 1948 Kudeta atau Konflik Internal Tentara?*, (Yogyakarta : Media Pressindo, 2003), hal. 49-50.

⁴ *Ibid.*

⁵ *Ibid.*, hal. 51.

⁶ Arsip SOBSI (1950-1965) No. 63.

⁷ Wawancara dengan Saimin (eks Ketua Kesatuan Buruh Marhaenis Madiun) tanggal 28 Januari 2004.

⁸ Arsip SOBSI (1950-1965) No. 5 tentang *Daftar Alamat Dewan Cabang/Dewan daerah SOBSI dan DPP SB Anggota SOBSI serta Anggota Dewan Nasional SOBSI*, tanggal 20 Juni 1959.

timur sendiri memiliki 30 cabang, yaitu ; (1). Surabaya, (2). Lamongan, (3). Pamekasan-Madura, (4). Madiun, (5). Jombang, (6). Mojokerto, (7). Tuban, (8). Gresik, (9). Sumenep, (10). Nganjuk, (11). Kediri, (12). Sidoarjo, (13). Bojonegoro, (14). Bangkalan-Madura, (15). Ngawi, (16). Kertosono, (17). Pare, (18). Pasuruan, (19). Probolinggo, (20). Banyuwangi, (21). Malang, (22). Trenggalek, (23). Situbondo, (24). Jember, (25). Blitar, (26). Ponorogo, (27). Bondowoso, (28). Lumajang, (29). Tulungagung, (30). Magetan.⁹

a. Hubungan SOBSI dengan Serikat Buruh Non-SOBSI

Dengan berdirinya serikat-serikat buruh lain selain SOBSI, tidak membuat SOBSI hilang dari peredaran. SOBSI sendiri dengan lahirnya organisasi buruh lain tidak membuat SOBSI hilang dari arena politik setelah mengalami perpecahan akibat peristiwa Madiun 1948. Dalam perkembangannya di tahun 1950-an, SOBSI berkembang menjadi organisasi buruh terbesar pada jamannya. Beranggotakan 2,5 juta orang, dari 34 serikat buruh. Serikat-serikat buruh pendukung kelangsungan SOBSI antara lain ; Serikat Buruh Bea dan Tjukai (SBBT), Serikat Buruh Djawatan Pertanian Rakyat (SBDPR), Serikat Buruh Pendidikan Pengajaran Dan Kebudayaan (SBPPK), Serikat Buruh Garam dan Soda Dalam Negeri (SBGSDN), Persatuan Pamong desa Indonesia (PPDI), Organisasi Buruh Umum (ORBU), Serikat Buruh Kehewan, Serikat Buruh Kantor Urusan Gerakan Tani (SBKUGT), Serikat Sekerja Kabinet Perdana Menteri (SSKPM), Serikat Sekerja Bank Rakyat Indonesia (SSBRI), Gabungan Buruh Indonesia (GBI), Serikat Buruh Biro Rekonstruksi Nasional (SBBRN), Persatuan Guru Teknik Indonesia (PGTI), Serikat Buruh Perkabaran Antara, Serikat Buruh Bank Seluruh Indonesia (SBBSI), Persatuan Djuru Kesehatan Seluruh Indonesia (PDK), serikat Buruh Pos Telegraf Telepon dan Radio (SB Postel), Serikat Buruh Kereta Api (SBKA), Serikat Buruh Kendaraan Bermotor (SBKB), Serikat Buruh Pelabuhan dan Pelayaran (SBPP), dan Serikat Buruh Angkatan Udara (SERBAUD).¹⁰

Dalam suasana yang penuh kebingungan setelah menjalani kepahitan dalam pergerakan buruh, dikalangan pemimpin-pemimpin Islam memunculkan gagasan untuk mendirikan organisasi-organisasi buruh yang berdasarkan Islam, karena dirasakan bahwa sejak berdirinya Sarekat Islam (SI), dulu orang-orang Islam kurang memperhatikan massa aksi di kalangan buruh. Sehingga pada tanggal 27 September 1948 mereka mendirikan Serikat Buruh Islam Indonesia (SBII) yang dibentuk oleh Masyumi. SBII mempunyai prinsip bahwa perjuangan buruh berbeda dengan perjuangan politik. Bila gerakan buruh berhasil memperjuangkan tuntutannya, maka yang menikmati langsung adalah buruh yang bersangkutan, misalnya mengenai kenaikan upah. SBII menyerukan kepada kaum buruh agar berpegang teguh pada persatuan dan diharapkan tidak ada permusuhan antara buruh dengan majikan. Untuk mencapai tujuan tersebut, pengurus besar SBII mengusahakan bantuan sarana dan prasarana, baik berupa uang maupun kebutuhan lainnya. Maksud dari upaya tersebut adalah agar lambat laun di setiap pusat buruh, seperti di pabrik-pabrik dan tempat-tempat kerja lainnya terdapat keharmonisan antara buruh satu dengan buruh lainnya.¹¹

Sejak berdirinya SBII, membawa pengaruh bagi kalangan buruh, yaitu bahwasannya jika para buruh saling berselisih maka yang rugi adalah buruh itu sendiri. Oleh karena itu lahirlah Ikatan Sentral Organisasi Serikat Sekerja (ICOSS) yang didirikan oleh Sudiro dari Serikat Sekerja Kementerian Islam Negara (SSKIN). Lalu lahir pula Persatuan Organisasi Buruh (POB) yang didirikan oleh Mr. Suropto. Kedua organisasi tersebut berusaha untuk membentuk induk organisasi, tetapi sebelum terlaksana, terjadilah aksi militer Belanda pada bulan Desember 1949. Dengan adanya aksi militer Belanda tersebut, kaum buruh tidak ketinggalan ikut berjuang bergabung dengan para pejuang dalam menghadapi aksi belanda. Selain itu dengan adanya persetujuan Konferensi Meja Bundar (KMB) di permulaan tahun 1950, telah merestorasi (menghidupkan) kembali susunan ekonomi kolonial di Indonesia, sehingga kaum buruh juga ikut mengambil bagian dalam perjuangan untuk merebut kedaulatan Indonesia dari tangan kolonial. Kaum buruh ikut mengambil bagian dalam peperangan melawan kolonialis dan walaupun Belanda telah menyerahkan kedaulatan Indonesia, kaum buruh tetap berjuang dalam arena politik.¹²

Serikat-serikat buruh merupakan sasaran empuk dari para partai politik untuk mengembangkan sayapnya. Oleh karena itu jika terjadi ketegangan dalam partai politik, maka serikat-serikat buruh juga ikut tegang, sehingga hal itu menjadikan tidak jelasnya arah yang akan dituju oleh serikat-serikat buruh. Berawal dari persoalan-persoalan tersebut, maka muncullah gagasan untuk membentuk induk organisasi yang bertujuan agar buruh mempunyai kejelasan dalam perjuangannya dan untuk menghindarkan pertentangan di kalangan buruh. Upaya-upaya tersebut dirintis oleh beberapa

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Edi Cahyono, *Perburuhan dari Masa ke Masa: Jaman Kolonial Belanda sampai Orde Baru-1998*, diakses dari www.geocities.com/penebar/essay/kronikperburuhan.htm.

¹¹ Edi Cahyono, *Loc.Cit.*

¹² Suprpto, *Peranan Federasi Buruh Seluruh Indonesia Cabang Surakarta Terhadap Kedudukan Buruh*, (Skripsi Jurusan Ilmu Sejarah Fakultas Sastra dan Seni Rupa UNS, 1988), hal. 109-111.

pengurus serikat buruh yang diawali dengan membentuk Panitia Koordinasi Serikat-Serikat Buruh, tapi tidak lama kemudian berubah nama menjadi Himpunan Serikat-Serikat Buruh Indonesia (HSSBI). HSSBI bertugas dalam hal pembentukan organisasi. Selain itu juga dibentuk Pusat Sementara Organisasi Buruh Seluruh Indonesia (PSOBSI), yang bertugas untuk menyelenggarakan adanya induk organisasi yang sudah ada. HSSBI dan PSOBSI mengadakan kerjasama untuk membentuk induk organisasi buruh dan sebagai permulaan dibentuklah Komisi Kerja yang bertugas untuk mempersiapkan bahan untuk konferensi buruh.

Di Yogyakarta pada bulan Juli 1950 diadakan suatu konferensi yang dihadiri oleh hampir semua organisasi buruh, kecuali SOBSI. Dalam konferensi tersebut dicapai keputusan yang antara lain, yaitu ; dicapai kesepakatan untuk dibentuknya induk organisasi melalui kongres umum dan untuk melaksanakannya dibantu oleh badan Permusyawaratan Buruh Seluruh Indonesia (BPBSI), untuk merealisasikan tujuan tersebut, maka dibentuk Badan Koordinasi Buruh Indonesia (BKBI).¹³ Pada akhirnya SOBSI menyatakan keluar dari HSSBI karena adanya perbedaan garis politik. Segala bentuk perbedaan membawa pengaruh ke arah diferensiasi aliran persatuan serikat-serikat buruh yang ada. Aliran-aliran yang dominan dalam pergerakan buruh waktu itu adalah nasionalis, Islam dan kiri. Sedangkan gerakan buruh aliran kiri direpresentasikan oleh SOBSI.

Pada tanggal 21 Agustus 1950, Presiden Sukarno dalam rangka pembentukan kabinet mengundang kelompok-kelompok kiri, yaitu Partai Komunis Indonesia (PKI), Partai Buruh Indonesia (PBI), SOBSI, Barisan Tani Indonesia (BTI), Partai Murba, dan Partai Sosialis. Dalam pertemuan itu dibicarakan mengenai keikutsertaan partai-partai dalam kabinet, calon-calon perdana menteri yang diusulkan dan syarat-syaratnya sert program-program yang harus dilaksanakan. Akhirnya kabinet yang terbentuk setelah jatuhnya Kabinet Natsir adalah Kabinet Sukiman yang dibentuk pada bulan April 1951. Kabinet tersebut merupakan koalisi antara Masyumi dengan PNI. Program kerja Kabinet Sukiman antara lain adalah menyiapkan undang-undang tentang pengakuan serikat buruh, perjanjian kerjasama, penetapan upah minimum, dan penyelesaian pertikaian buruh.

Setelah diadakan kongres buruh pertama di Yogyakarta oleh HSSBI dan PSOBSI, selanjutnya diadakan kongres yang kedua pada tahun 1951 yang menghasilkan keputusan, yaitu dibentuknya vaksentral baru yang bernama Sentral Organisasi Buruh Republik Indonesia (SOBRI). Pada kongres buruh tersebut masuklah pengaruh Partai Murba. Kiprah vaksentral non SOBSI pada tahun-tahun tersebut mulai mendukung "pemagaran" peran pegawai negeri yang berada di luar buruh.

c. Masalah-Masalah dalam Perburuhan

Jika melihat berbagai usaha yang dilakukan oleh para buruh untuk membentuk induk organisasi buruh, maka usaha-usaha tersebut tidak lepas dari bermacam-macam hambatan, yaitu antara lain semakin intensifnya pengaruh partai politik dalam serikat buruh, situasi negara yang labil karena sering bergantinya kabinet, masih adanya pandangan yang berbeda dalam perjuangan buruh, yang terlihat dalam sikap SOBSI, BPBSI, dan PSOBSI yang tetap pada pendirian masing-masing sehingga timbullah perselisihan di kalangan buruh. Oleh karena itu, maka dalam Kongres SOBSI pada tanggal 28 September 1953, melalui penjelasan oleh D.S Atmo (utusan Sentral Biro SOBSI) diungkapkan bahwa masalah kesatuan aksi buruh adalah masalah yang sangat penting bagi buruh, karena kekuatan buruh terletak pada persatuannya. Persatuan itulah yang menjamin keberhasilan kaum buruh secara kesatuan dalam menjalankan aksi-aksi memperjuangkan nasib buruh.¹⁴ Selain itu dalam kongres tersebut juga disebutkan berbagai masalah yang dihadapi oleh buruh, yaitu antara lain ; 1). Masalah gaji atau upah buruh yang minim, sehingga tidak cukup untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari apalagi mengingat naiknya harga-harga bahan pokok, 2). Masalah jaminan sosial, seperti tunjangan hari raya, 3). Masalah pengangguran, dan sebagainya.¹⁵

Persoalan-persoalan yang dihadapi buruh tersebut mendorong buruh untuk melakukan aksi-aksinya dalam menuntut perbaikan nasib buruh. Apalagi ditambah dengan semakin maraknya monopoli asing di Indonesia dan semakin meluasnya perusahaan-perusahaan Belanda yang berdiri di Indonesia yang merugikan perusahaan-perusahaan nasional dan buruh. Aksi-aksi buruh tersebut di dorong oleh karena tidak adanya kepedulian pemerintah terhadap kehidupan buruh, semakin meluasnya perusahaan-perusahaan asing yang berdiri di Indonesia yang mengakibatkan tersingkirnya perusahaan-perusahaan nasional, apalagi melihat dari kondisi negara yang labil, termasuk diantaranya dibidang ekonomi yang menyebabkan naiknya harga-harga kebutuhan hidup, serta kurang seriusnya pemerintah untuk menyelesaikan perselisihan diantara buruh, sehingga dipicu oleh hal tersebut, buruh-buruh melancarkan pemogokan. Oleh karena itu diperlukan kesatuan aksi buruh dalam memperjuangkan nasibnya. Namun aksi pemogokan buruh tersebut mendapat larangan dari pemerintah, bahkan pemerintah mengeluarkan undang-undang larangan mogok pada Februari 1951.

Dengan dikeluarkannya undang-undang larangan mogok oleh pemerintah, Sekretariat Sentral Biro SOBSI menyatakan protes keras dan menuntut pemerintah untuk segera mencabut undang-undang tersebut. Sekretariat Sentral Biro SOBSI berpendapat bahwa larangan mogok tersebut berarti ;

(1) memperkosa hak-hak demokrasi dan melanggar UUD Sementara RI 1950 yang menjamin adanya hak mogok;

¹³ Suprpto, *Op.Cit.*, hal.111-112.

¹⁴ Arsip SOBSI No. 360.

¹⁵ *Ibid.*

- (2) melanggar kemerdekaan serikat buruh yang berjuang untuk perbaikan nasib mengingat semakin merosotnya tingkat penghasilan buruh;
- (3) dengan adanya undang-undang larangan mogok bagi buruh, berarti pemerintah telah membantu para pemilik modal asing untuk menambah keuntungan mereka dan membenarkan pemecatan-pemecatan terhadap buruh sehingga meningkatkan pengangguran;
- (4) membiarkan semakin meningkatnya harga kebutuhan pokok sehari-hari, karena lebih diutamakan produksi seperti timah, karet, minyak dan sebagainya;
- (5) membiarkan perusahaan-perusahaan nasional gulung tikar karena semakin banyaknya perusahaan-perusahaan asing yang berdiri.¹⁶

Walaupun pemerintah telah mengeluarkan undang-undang larangan mogok bagi buruh, namun hal tersebut tidak menjadikan buruh untuk berhenti dalam memperjuangkan tuntutan mereka. Serikat-serikat buruh pendukung SOBSI juga melakukan aksi pemogokan pada bulan Juli 1951, yaitu pemogokan yang dilakukan oleh Serikat Buruh Kendaraan Bermotor (SBKB) dalam menentang Gabungan Perusahaan Otobis. Aksi tersebut tidak hanya mendapat simpati dan dukungan dari golongan buruh lain, tetapi juga mendapat simpati dan dukungan dari pengusaha-pengusaha angkutan bis nasional. Selain itu terjadi pula aksi pemogokan buruh kapal dan pelabuhan di Belawan pada tahun 1951. Dalam melakukan aksi pemogokan, tidak semuanya berakhir dengan kemenangan, tetapi juga mengalami kegagalan dan menyebabkan terisolasinya perjuangan-perjuangan buruh tersebut. Buruh-buruh tersebut tidak hanya terisolasi dari organisasi buruh lain, tetapi juga dari rakyat. Pemogokan-pemogokan yang dilancarkan oleh buruh bukan hanya itu saja, tetapi masih banyak pemogokan lainnya, yaitu pemogokan yang dilakukan oleh buruh percetakan (Serikat Buruh Percetakan Indonesia/SBPI), pemogokan oleh buruh minyak kelapa (Serikat Buruh Minyak Kelapa Seluruh Indonesia/SARBUMIKSI), pemogokan oleh buruh gula (Serikat Buruh Gula/SBG), pemogokan oleh buruh angkatan udara (Serikat Buruh Angkatan Udara/SERBAUD), dan pemogokan oleh buruh minyak (Persatuan Buruh Minyak/PERBUM). Tuntutan-tuntutan yang diajukan oleh buruh beragam, antar lain adalah menuntut hadiah lebaran.¹⁷ Pemogokan-pemogokan tersebut sebagian besar diikuti oleh serikat buruh yang tergabung dalam SOBSI, sehingga secara otomatis serikat buruh yang tergabung dalam SOBSI Madiun juga tidak ketinggalan melakukan aksi tersebut. Demikian halnya dengan seluruh cabang SOBSI Jawa Timur juga ikut terjun dalam pemogokan buruh, meskipun dilarang oleh pemerintah melalui undang-undang larangan mogok bagi buruh.

Ketakutan akan kekuatan kelas buruh, ketakutan akan pemogokan buruh yang semakin berkembang, dan kekhawatiran bahwa walaupun sudah dikeluarkan undang-undang yang berbaur fasis tidak bisa menghancurkan kelas buruh, maka didirikanlah serikat-serikat buruh kuning. Dengan melemparkan tuduhan-tuduhan kepada SOBSI, seperti SOBSI a-nasionalis, SOBSI dikendalikan oleh kekuatan asing, SOBSI organisasi "komunis", maka kelompok-kelompok yang tidak suka terhadap SOBSI berusaha menggagalkan buruh untuk anti mogok, memecah belah buruh, anti-komunis, anti-sosialis, anti demokrasi rakyat, yang pada hakikatnya tidak lain adalah untuk menunjukkan bahwa kelompok tersebut anti-buruh dan anti-rakyat. Sedangkan menurut SOBSI, kelompok-kelompok yang tidak suka terhadap SOBSI itulah sebenarnya yang dikendalikan oleh kekuasaan asing, oleh imperialis Belanda, Amerika dan Inggris.¹⁸

2. Undang-Undang Darurat No.16 Tahun 1951

Undang-Undang Darurat No. 16 Tahun 1951 adalah undang-undang yang dikeluarkan oleh Menteri Perburuhan, Tedjokusukmana pada masa Kabinet Sukiman. Pada intinya undang-undang tersebut berisi tentang larangan mogok bagi kaum buruh. Undang-undang tersebut juga menghapuskan hak-hak kaum buruh untuk melakukan perjuangan nasib buruh. Undang-Undang Darurat No. 16 Tahun 1951 dikeluarkan pada bulan September 1951. Dengan dikeluarkannya undang-undang tersebut, maka menimbulkan reaksi keras dari berbagai serikat buruh, karena pada intinya undang-undang tersebut sama halnya dengan undang-undang terdahulu yang juga mengekang kebebasan buruh. Selain itu undang-undang tersebut tidak berhasil mengatasi perselisihan di antara kaum buruh dan semakin memberi kesempatan bagi monopoli asing. Bahkan melalui undang-undang tersebut, banyak tokoh dari serikat buruh ditangkap dan ditahan oleh pemerintah dengan alasan tidak mematuhi larangan mogok dari pemerintah.

Tokoh-tokoh yang ditangkap dan ditahan kebanyakan berasal dari serikat buruh SOBSI. Pemerintah dinilai tidak lagi mengutamakan kepentingan rakyat, bahkan tindakan pemerintah tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia (UUDS RI), serta tindakan tersebut tidaklah a-nasional dan tidak berdemokrasi. Protes mengalir di mana-mana, serikat-serikat buruh melayangkan protes dan berbagai resolusi kepada pemerintah. Protes tersebut kebanyakan berasal dari serikat buruh SOBSI, karena sebagian besar dari SOBSI-lah yang menjadi tahanan pemerintah. Protes-protes tersebut antara lain berasal dari Serikat Buruh Kendaraan Bermotor (SBKB) cabang

¹⁶ Arsip SOBSI (1950-1965) No. y.176, "*Protes SOBSI terhadap Larangan Mogok*".

¹⁷ Resolusi Central Commite Partai Komunis Indonesia, *Kewajiban Front Persatuan Buruh*, (Jakarta : Yayasan Pembaharuan, 1952), diakses dari www.geocities.com

¹⁸ *Ibid.*

Malang. Serikat buruh tersebut menyerukan dukungannya kepada seluruh serikat buruh, rakyat, pengusaha nasional, dan golongan lain yang menjunjung demokrasi untuk terus berjuang dan memprotes tindakan pemerintahan yang telah menahan tokoh-tokoh serikat buruh, karena tindakan tersebut tidak mencerminkan sikap demokrasi.¹⁹ Selain itu, SBKB cabang Malang ini juga mengeluarkan statemen (pernyataan) yang ditujukan kepada Menteri Perburuhan, Menteri Kehakiman, Pemerintahan Pusat, dan Presiden Republik Indonesia berkaitan dengan undang-undang darurat tersebut. Dalam pernyataannya SBKB mengutarakan bahwa Undang-Undang Darurat No. 16/1951 adalah sama halnya dengan undang-undang larangan mogok terdahulu, karena undang-undang tersebut telah menghapuskan hak-hak buruh, sehingga SBKB menuntut kepada pemerintah untuk segera mencabut undang-undang tersebut.²⁰

Dalam perkembangan selanjutnya, berkaitan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Darurat No. 16/1951, maka berbagai kaum buruh mengadakan rapat raksasa pada tanggal 1 Mei 1952 bertempat di alun-alun Jember yang diikuti oleh kaum buruh, kaum tani, pemuda/pelajar, kaum wanita, dan golongan intelektual. Dalam rapat raksasa tersebut, kaum buruh menyatakan pendapatnya berkenaan dengan Undang-Undang Darurat No. 16/1951, yaitu antara lain ;

- (1) bahwa Undang-Undang Darurat No. 16/1951 adalah undang-undang yang hanya menguntungkan bagi pemilik modal asing, tetapi sebaliknya undang-undang tersebut sangat merugikan kaum buruh, sehingga undang-undang tersebut ditentang oleh rakyat dan undang-undang tersebut harus segera dicabut;
- (2) bahwa dengan adanya undang-undang tersebut berarti ada kesewenang-wenangan dari pihak pemilik modal kapital asing terhadap kaum buruh, sehingga mengakibatkan semakin meningkatnya pengangguran yang akan memungkinkan timbulnya kekacauan-kekacauan dalam masyarakat;
- (3) bahwa dengan berlakunya undang-undang darurat tersebut, berarti telah mengekang perkembangan demokrasi, sehingga oleh karena itu perlu segera dihapuskan;
- (4) melalui Resolusi Tjugoto cs tanggal 29 Januari 1952, yaitu pernyataan kepada pemerintah untuk meningkatkan kehidupan kaum buruh;
- (5) bahwa berhubung dengan naiknya harga-harga kebutuhan hidup sehari-hari, maka pemerintah diharapkan meningkatkan gaji buruh seperti yang telah dituntut oleh Sentral Biro SOBSI tanggal 1 Maret 1952;
- (6) bahwa sampai kini ternyata Irian Barat belum masuk ke dalam wilayah Indonesia, yang mana hal ini dimungkinkan oleh adanya perjanjian Konferensi Meja Bundar (KMB).²¹

Selain beberapa pendapat di atas, dikatakan pula oleh kaum buruh bahwa dengan semakin meluasnya modal-modal asing di Indonesia akan membawa pada bahaya perang baru dan fasisme yang ditimbulkan oleh negara-negara kapitalis yang akan menuju pada bencana kemanusiaan. Dalam rapat raksasa tersebut juga dihasilkan beberapa keputusan, yaitu ;

- (1) menuntut supaya UU Darurat No. 16/1951 segera dicabut;
- (2) memprotes tiap-tiap usaha modal asing dan mendesak kepada pemerintah supaya bersikap tegas terhadap pemilik modal asing;
- (3) membenarkan dan memperkuat Resolusi Tjugito cs tanggal 29 Januari 1952 dan mendesak kepada pemerintah supaya resolusi tersebut segera dilaksanakan;
- (4) membenarkan dan memperkuat Resolusi Sentral Biro SOBSI tanggal 1 Maret 1952 No. 2/S.O/1952 tentang kenaikan gaji buruh dan mendesak kepada pemerintah supaya resolusi tersebut segera dilaksanakan.²²

Serikat-serikat buruh yang melayangkan protes terhadap pemerintah dengan dikeluarkannya undang-undang darurat tersebut juga berasal dari Serikat Buruh Pelabuhan Pelayaran (SBPP) cabang Surabaya, Serikat Buruh Industri

¹⁹ Inventaris Arsip Kabinet Presiden RI (1950-1959), Agenda No. 7027, tentang *Protes Serikat Buruh Kendaraan Bermotor (SBKB) Cabang Malang* tanggal 30 September 1951.

²⁰ Inventaris Arsip Kabinet Presiden RI (1950-1959), Agenda No. 9094, tanggal 22 Desember 1951.

²¹ Inventaris Arsip Kabinet Presiden RI (1950-1959) Agenda No. 3703.

²² *Ibid.*

Metal (SBIM) cabang Surabaya, dan serikat buruh lainnya yang tergabung dalam Dewan Cabang SOBSI Jawa Timur.²³ Serikat-serikat buruh SOBSI Madiun yang termasuk di dalam Dewan Cabang SOBSI Jawa Timur juga ikut memprotes dikeluarkannya UU Darurat No. 16/1951, karena pada dasarnya undang-undang tersebut mengekang hak-hak buruh, sehingga serikat buruh SOBSI Madiun menuntut agar undang-undang tersebut segera dicabut. Selain itu, dengan dikeluarkannya undang-undang tersebut yang menimbulkan berbagai kontra, membawa pengaruh pula bagi perekonomian buruh, karena undang-undang tersebut telah memotong hak-hak buruh, memunculkan kapitalis-kapitalis sehingga melahirkan banyak pengangguran.²⁴

B. Kondisi Ekonomi-Politik Madiun

Telah dikemukakan di atas bahwa kondisi Indonesia sedang mengalami ketidakstabilan. Kekacauan demi kekacauan terjadi di mana-mana yang semuanya itu bermuara pada ketidakstabilan dalam pemerintahan atau dalam negeri, sehingga berdampak pula bagi bidang kehidupan lainnya, salah satunya adalah di bidang perekonomian. Kondisi perekonomian Indonesia masa ini mengalami krisis. Hal itu disebabkan karena situasi negara yang sarat akan konflik. Selain itu juga dikarenakan oleh semakin meluasnya perusahaan-perusahaan asing yang berdiri di Indonesia. Kapitalis-kapitalis asing hampir menguasai semua sumber vital negara. Pemilik-pemilik modal asing tersebut menjalankan monopolinya. Semua itu karena masih kuatnya dominasi Belanda di Indonesia. Meskipun secara teoritis dapat dikatakan bahwa setelah merdeka, Indonesia memiliki peralatan untuk melucuti ekonomi kolonial dan menggantikannya dengan ekonomi nasional, tetapi dengan apa yang tercantum dalam Konferensi Meja Bundar (KMB), Indonesia tidak dapat berbuat apa-apa, bahkan dominasi perusahaan Belanda begitu kuat, sehingga berdampak pada terhambatnya pembangunan di Indonesia.

Dengan hasil KMB tersebut menimbulkan kekacauan dalam negeri, terutama dalam bidang ekonomi, karena sebagian besar sumber-sumber kekayaan negara dan perusahaan-perusahaan negara masih dikuasai oleh modal asing. Tidak mengherankan apabila Indonesia selalu mengalami defisit dalam anggaran belanja tiap tahunnya, sehingga melihat hal itu berdasarkan Kongres Serikat-Serikat Buruh Jawa Timur dicapai keputusan yaitu mendesak kepada pemerintah untuk segera menasionalisasi segala sumber-sumber kekayaan alam dan perusahaan-perusahaan vital yang semuanya itu nantinya untuk kemakmuran rakyat dan pembangunan nasional.²⁵

Semakin meningkatnya harga-harga barang kebutuhan hidup sehari-hari, meningkatnya pengangguran karena banyak buruh yang dipecat secara sewenang-wenang, kesejahteraan rakyat dan buruh tidak diperhatikan, dan lainnya, semua itu mendorong buruh untuk melakukan aksi-aksinya. Kondisi perekonomian Madiun pada saat itu, yaitu di awal Demokrasi Liberal, juga menunjukkan ketidakstabilan. Hal itu terlihat dari pemogokan-pemogokan yang dilakukan oleh serikat-serikat buruh. Serikat-serikat buruh yang sebagian besar tergabung dalam SOBSI Madiun, menuntut kepada pemerintah agar meningkatkan taraf hidup buruh, menuntut kenaikan gaji karena gaji yang diterima jauh dari kelayakan hidup, memprotes tindakan pemecatan buruh-buruh, dan menuntut kepada pemerintah agar membatasi adanya pemilik modal asing dan kapitalis asing karena itu merugikan pengusaha-pengusaha nasional.²⁶

Adanya pemogokan-pemogokan dan protes-protes dari serikat-serikat buruh menjadikan situasi negara semakin rawan. Melihat kondisi yang demikian itu, pemerintah mengeluarkan undang-undang larangan mogok bagi buruh. Meskipun demikian, aksi-aksi dari serikat-serikat buruh terus berlanjut, serikat-serikat buruh tersebut tidak mengindahkan adanya undang-undang tersebut, bahkan mereka memprotes adanya undang-undang tersebut, karena dirasa oleh buruh undang-undang tersebut telah mengekang kebebasan demokrasi. Melihat keadaan yang demikian itu, maka pemerintah sekali lagi mengeluarkan Undang-Undang Darurat No. 16/1951 seperti tersebut dijelaskan dimuka. Dengan dikeluarkannya undang-undang tersebut menimbulkan reaksi keras di mana-mana. Hal itu semakin kacaunya kondisi negara. Perekonomian masih dalam keadaan labil, tuntutan-tuntutan dari rakyat dan serikat buruh untuk perbaikan hidup tidak segera terlaksana.

Perekonomian negara semakin kacau, bahkan banyak perusahaan negara yang gulung tikar dan ditutup, antara lain yaitu perusahaan rokok kretek yang hampir 100% modalnya adalah modal milik nasional. Hal itu dikarenakan tidak adanya perlindungan yang tegas dari pemerintah terhadap modal nasional, sehingga dengan ditutupnya perusahaan-perusahaan nasional mengakibatkan bertambahnya pengangguran. Semua itu juga berdampak bagi kesejahteraan hidup

²³ Inventaris Arsip Kabinet RI (1950-1959), Agenda No. 3733 dan 4052, tanggal 17 Mei dan 23 Mei 1952.

²⁴ Wawancara dengan Saimin (eks Ketua Kesatuan Buruh Marhenis) di Madiun pada tanggal 28 Januari 2004

²⁵ Inventaris Arsip Kabinet Presiden RI (1950-1959), No. 771 "**Resolusi tentang Nasionalisasi Sumber-Sumber/Perusahaan-Perusahaan Vital**", tanggal 24 Agustus 1953.

²⁶ *Ibid.*

rakyat yang semakin tidak terpenuhi. Dengan gulung tikar dan ditutupnya perusahaan-perusahaan nasional tersebut berarti memberikan kesempatan bagi modal asing untuk lebih menguasai segala produksi dalam negeri dan mengambil keuntungan yang sebesar besarnya. Semakin terbuka kesempatan bagi pemilik modal asing, maka berakibat bagi tenaga kerja atau buruh dengan bayaran yang murah. Selain itu dengan ditutupnya perusahaan-perusahaan nasional berarti pula hilangnya tenaga dan pembangunan nasional yang mengakibatkan lemahnya potensi ekonomi nasional.²⁷ Oleh karena itu serikat-serikat buruh menuntut kepada pemerintah agar memberikan perlindungan terhadap modal nasional atau pengusaha-pengusaha nasional dan menghapuskan segala bentuk undang-undang atau peraturan yang berbau kolonial.²⁸

Peta politik Madiun pada awal Demokrasi Liberal masih memperlihatkan keadaan yang traumatik, karena sebelumnya masyarakat Madiun dihadapkan pada pengalaman-pengalaman yang menyakitkan akibat dari Peristiwa Madiun 1948. Hampir keseluruhan daerah Madiun dalam pengawasan militer pasca Peristiwa Madiun 1948.²⁹ Pihak pemerintah sudah menyerukan kepada segenap rakyat Jawa Timur pada umumnya dan rakyat Madiun pada khususnya untuk melupakan pengalaman-pengalaman pahit yang telah dialami serta menyerukan kepada segenap rakyat untuk tidak saling menyalahkan satu sama lainnya, karena sudah saatnyalah berusaha untuk memperbaikinya dan diharapkan agar semua berkonsentrasi untuk menghadapi kolonialisme Belanda yang masih mendominasi di Indonesia.³⁰

Persoalan-persoalan politik yang melanda negara Indonesia juga merupakan persoalan politik yang melanda daerah-daerah di Indonesia. Pergolakan-pergolakan di daerah-daerah mewarnai masa itu. Terjadinya kekacauan di bidang ekonomi yang merupakan imbas dari kekacauan di bidang politik yang keduanya saling terkait. Permasalahan di bidang ekonomi menimbulkan pemogokan-pemogokan dan berbagai protes dari segenap lapisan rakyat yang diantaranya adalah serikat-serikat buruh. Berbagai undang-undang dan peraturan telah dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengatasi segala bentuk kekacauan, tetapi tidak membawa hasil justru merugikan rakyat sendiri. Segala bentuk protes dari berbagai lapisan masyarakat dan serikat buruh terus berlanjut. Serikat-serikat buruh memprotes keras terhadap dikeluarkannya Undang-Undang Darurat No. 16/1951 tersebut, karena undang-undang tersebut berbau kolonial, merugikan perekonomian nasional, dan mengekang hak-hak demokrasi. Protes semakin meluas di mana-mana, bahkan satu sama lain saling mendukung untuk terus menuntut kepada pemerintah untuk segera mencabut undang-undang tersebut.³¹ Serikat-serikat buruh yang tergabung dalam SOBSI Cabang Malang juga mengajukan protes berkitan dengan dikeluarkannya undang-undang tersebut yang sangat mengekang hak berdemokrasi rakyat. Serikat buruh tersebut menuntut kepada pemerintah untuk segera mencabut undang-undang tersebut.³²

Selain itu, terdapat juga resolusi dari Serikat Buruh Kereta Api (SBKA) Cabang Bojonegoro yang juga merupakan anggota SOBSI. Resolusi tersebut mendukung pernyataan Sentral Biro SOBSI untuk terus berjuang dan mendesak kepada pemerintah untuk segera mencabut Undang-Undang Darurat No. 16/1951 dan menggantinya dengan undang-undang yang lebih menjamin kesejahteraan buruh.³³

C. Dukungan Partai Politik terhadap Buruh

Pada tahun 1953, kondisi perpolitikan Indonesia diwarnai dengan jatuhnya Kabinet Wilopo. Setelah Kabinet Wilopo jatuh, PKI mengeluarkan pernyataan yang menuntut pembentukan kabinet baru sesuai dengan Front Persatuan yang di dalamnya termasuk PKI, tetapi tanpa Masyumi dan PSI. Krisis kabinet berlangsung agak lama dan beberapa formatur telah menemui kegagalan. Dalam pernyataan berikutnya, PKI membatalkan tuntutan untuk duduk dalam kabinet baru. Setelah satu bulan, terbentuklah kabinet baru di bawah pimpinan Mr. Ali Sastroamijoyo (PNI) dengan menteri-menteri dari berbagai partai kecil, tetapi tanpa Masyumi dan PSI. Kabinet tersebut disebut Kabinet Ali

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Inventaris Arsip Kabinet Presiden RI (1950-1959), No. 771, "**Resolusi tentang Pencabutan Ontslag-Recht**", tanggal 24 Agustus 1953.

²⁹ Wawancara dengan Marijoen Hardjosoemarto (eks Pejuang Vetaran), tanggal 28 Januari 2004.

³⁰ David Charles Anderson, *Op.Cit.*, hal. 124

³¹ Inventaris Arsip Kabinet Presiden RI (1950-1959), Agenda No. 3596, tertanggal 5 Mei 1952.

³² Inventaris Arsip Kabinet Presiden RI (1950-1959), Agenda No. 3104, tertanggal 23 April 1953.

³³ Inventaris Arsip Kabinet Presiden RI (1950-1959), Agenda No. 4898, "**Resolusi Tentang Pengganti UU. Darurat No. 16/1951**", tertanggal 30 April 1955.

Sastroamijoyo I atau Kabinet Ali-Wongso.³⁴ Dalam pernyataan PKI ketika mendukung kabinet tersebut disebutkan bahwa kabinet itu sebagai suatu “kemenangan gemilang dari demokrasi terhadap fasisme”.

Dengan terbentuknya Kabinet Ali-Wongso tersebut, serikat buruh yang tergabung dalam Dewan Cabang Jawa Timur menyatakan bahwa kabinet yang terbentuk adalah kabinet yang lebih maju daripada kabinet sebelumnya, karena terbukti dengan tidak ikut sertanya unsur-unsur yang tidak dikehendaki oleh kaum buruh dan rakyat yang menjunjung demokrasi, serta bahwa dengan terbentuknya Kabinet Ali-Wongso adalah merupakan dukungan, dorongan, dan tuntutan dari kaum buruh dan rakyat.³⁵ Pada intinya, dengan terbentuknya Kabinet Ali-Wongso tersebut, kaum buruh sangat mendukung dan menyambut dengan gembira. Persoalan-persoalan politik yang terjadi di Indonesia pada masa tersebut tidak berhenti begitu saja. Masalah lain yang muncul adalah mengenai persoalan Irian Barat yang termasuk dalam perjanjian KMB, karena Irian Barat belum dapat dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia.

Pada tahun 1954 dibentuklah peraturan mengenai pengertian buruh oleh pemerintah, yaitu PP. No. 31 Tahun 1954. Peraturan Pemerintah tersebut hanya membatasi pengertian buruh hanya pada tenaga kerja perusahaan swasta yang mempunyai hubungan kerja yang bersifat perdata. Maksudnya adalah tenaga kerja pemerintah adalah pegawai atau karyawan yang dibayar dengan Anggaran Belanja Negara dan hubungan kerjanya bersifat publik atau umum.³⁶

Pada tanggal 9 sampai dengan 20 Januari 1955, di Jakarta telah berlangsung Kongres Nasional ke II SOBSI. Kongres tersebut tidak hanya dikunjungi oleh wakil-wakil serikat buruh pusat, wakil-wakil serikat buruh daerah, utusan kaum buruh Belanda, dan buruh sedunia, tapi juga dikunjungi oleh wakil-wakil serikat buruh non vaksentral. Komposisi dari utusan-utusan tersebut berasal dari berbagai elemen, ada yang menjadi anggota PKI, PNI, Masyumi, PSII, Permai, PSI, dan sebagainya.³⁷ Dalam kongres Nasional ke II SOBSI tersebut dibahas mengenai beberapa persoalan, diantaranya adalah masalah memperluas persatuan kaum buruh. Persoalan-persoalan itu dilaporkan oleh Sekjen Sentral Biro SOBSI, Njono, yaitu :

1. Kegiatan-kegiatan SOBSI untuk perbaikan upah, jaminan sosial, dan pelaksanaan hak-hak serikat buruh.
2. Perlu adanya perbaikan ekonomi.
3. Mengembangkan kesatuan aksi buruh dan mempererat kerjasama dengan semua golongan rakyat.
4. Konsolidasi organisasi yang merupakan syarat penting bagi SOBSI untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan baik.³⁸

Tentang kegiatan-kegiatan SOBSI yang disebutkan dalam laporan Njono di atas, yaitu untuk lebih mendesak pemerintah agar mengambil berbagai tindakan, yaitu :

- a. Membatalkan Undang-Undang Darurat No. 16/1951 dan menyusun undang-undang penyelesaian perselisihan perburuhan yang demokratis dan yang menjamin hak pemogokan oleh kaum buruh dan hak-hak kebebasan serikat buruh lainnya.
- b. Menghentikan tindakan-tindakan yang mengekang hak-hak demokrasi di daerah-daerah dan mencabut larangan demonstrasi dan hak-hak demokrasi lainnya.
- c. Menjamin dispensasi bagi pemimpin-pemimpin serikat-serikat buruh dalam mengurus tugasnya.³⁹

³⁴ Sekretariat Negara Republik Indonesia, *Gerakan 30 September Pemberontakan Partai Komunis Indonesia, Latar Belakang, Aksi, dan Penumpasannya*, (Jakarta : 1994), hal.26-27.

³⁵ Inventaris Arsip Kabinet RI (1950-1959) No. 771 tentang ‘*Pernyataan terhadap Terbentuknya Kabinet Ali-Wongso*’ tanggal 24 Agustus 1953

³⁶ Suri Suroto, *Gerakan Buruh dan Permasalahannya*, Prisma No. 11, hal. 29

³⁷ Kongres Nasional ke II SOBSI Untuk Memperluas Persatuan Buruh, *Berita Organisasi SARBUPRI* 20 Januari 1955

³⁸ *Ibid.*

³⁹ *Ibid.*

Selama pemerintahan Kabinet Ali Sastroamijoyo I, PKI memberikan dukungannya secara gigih kepada PNI. Walaupun diketahui oleh umum bahwa kabinet tersebut tidak berhasil mengatasi kesulitan ekonomi yang dihadapi bangsa Indonesia, tetapi PKI tetap membela Kabinet Ali Sastroamijoyo I. Setiap kali kabinet terancam perpecahan dari dalam, PKI mengadakan pembelaan keras dan menyerang kelompok-kelompok yang hendak menjatuhkannya. Pada akhirnya Kabinet Ali-Wongso juga jatuh dan digantikan oleh Kabinet Burhanuddin Harahap pada tanggal 12 Agustus 1955. Kabinet ini adalah koalisi antara Masyumi sebagai intinya dan PNI menjadi partai oposisi.⁴⁰

Menjelang pemilihan umum yang akan diadakan pada bulan September dan Desember 1955, PKI semakin intensif melakukan propaganda. Dari hasil pemilu 1955, terjadi kejutan besar, yaitu PKI setelah bangkit dari Peristiwa Madiun 1948 berhasil mengantongi suara yang cukup besar dan termasuk dalam partai empat besar yaitu PNI, Masyumi, Nahdlatul Ulama (NU), dan PKI. PKI meraih banyak suara dalam pemilu tersebut terutama di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Dari 22 partai atau organisasi peserta pemilu, ada empat partai besar, enam organisasi menengah, dan 12 dari 18 organisasi kecil, yang memperoleh kursi dalam Parlemen, yaitu :

A. Partai Besar

1. PNI (Partai Nasional Indonesia)
2. Masyumi (Majelis Syuro Muslimin Indonesia)
3. Nahdlatul Ulama (NU)
4. PKI (Partai Komunis Indonesia)

B. Partai Menengah

1. PSII (Partai Sarikat Islam Indonesia)
2. Parkindo (Partai Kristen Indonesia)
3. Partai Khatolik
4. PSI (Partai Sosialis Indonesia)
5. Perti (persatuan Tarbiyah Islamiyah)
6. IPKI (Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia)

C. Kelompok Kecil yang Bercakupan Nasional

1. PRN (Partai Rakyat Nasional)
2. Partai Buruh
3. GPPS (Gerakan Pembela Panca Sila)
4. PRI (Partai Rakyat Indonesia)
5. PPPRI (Persatuan Pegawai Polisi Republik Indonesia)
6. Partai Murba
7. Baperki (Badan Permusyawaratan Kewarganegaraan Indonesia)
8. PIR (Partai Indonesia Raya) Wongsonegoro
9. Permai (Persatuan Marhaen Indonesia)
10. PIR (Partai Indonesia Raya) Hazairin
11. PPTI (Partai Persatuan Tharikat Islam)
12. Acoma (Angkatan Communis Muda)

⁴⁰ Sekretariat Negara Republik Indonesia, *30 Tahun Indonesia Merdeka 1950-1964*, (Jakarta : PT. Citra Lamtoro Gung Persada, 1988), hal. 86

D. Kelompok Kecil yang Bercakupan Daerah

1. Gerindo-Yogyakarta
2. Partai Persatuan Daya-Kalimantan Barat
3. AKUI-Madura
4. PRD (Partai Rakyat Desa)-Jawa Barat
5. PRIM (Partai Rakyat Indonesia Merdeka)-Jawa Barat
6. R. Soedjono Prawirosoedarso dan Kawan-kawan-Madiun
7. Gerakan Pilihan Sunda-Jawa Barat
8. Partai Tani Indonesia-Jawa Barat
9. Raja Kaprabonan dan Kawan-kawan-Cirebon, Jawa Barat
10. Gerakan Banteng-Jawa Barat
11. PIR (Persatuan Indonesia Raya) Nusa Tenggara barat-Lombok
12. PPLM Idrus Effendi (Panitia Pendukung Pencalonan L.M. Idrus Effendi)-Sulawesi Tenggara.⁴¹

Dengan kemenangan PKI tersebut, berarti bangkitnya kembali komunis di Indonesia setelah mengalami kekalahan dan perpecahan dalam Peristiwa Madiun 1948. Selain itu dengan kemenangan PKI dalam pemilu 1955, berarti juga kemajuan dalam gerakan buruh terutama SOBSI. Kemenangan PKI dalam pemilu 1955 telah menjadikan PKI yang semula kelompok kecil menjadi kelompok besar. Pada tahun 1955 juga dikeluarkan peraturan oleh Menteri Perburuhan No. 90 Tahun 1955 tentang pendaftaran serikat buruh yang sifatnya sangat liberal karena menurut peraturan itu untuk mendirikan serikat buruh syaratnya sangat ringan, cukup dengan memiliki anggaran dasar, susunan pengurus, dan jumlah anggota, maka serikat-serikat buruh pun berkembang dengan pesat.⁴²

Walaupun sudah dikeluarkan peraturan tentang perburuhan oleh Menteri Perburuhan pada tahun 1955, tetapi kehidupan buruh belum ada peningkatan kesejahteraan. Tingkat hidup kaum buruh yang makin hari makin merosot akibat semakin meningkatnya harga kebutuhan pokok sehari-hari, padahal upah yang mereka terima tidak lagi mencukupi kebutuhan hidup, maka guna mencukupi kebutuhan hidup tersebut kaum buruh mengajukan tuntutan-tuntutan kenaikan upah, jaminan sosial, dan sebagainya. Sekretariat Dewan Daerah SOBSI Jawa Timur yang merupakan anggota GSS (WFTU) pada bulan Januari 1956 melayangkan pernyataan protes kepada pemerintah, karena pemerintah dinilai lamban dalam menyelesaikan masalah perburuhan dan mereka juga mengajukan tuntutan melalui aksi-aksi pemogokan, terutama terhadap monopoli asing.⁴³ Akan tetapi aksi-aksi tersebut dibatasi dan dikekang oleh adanya Undang-Undang Darurat No. 16 tahun 1951 yang belum juga dicabut oleh pemerintah. Sejak dikeluarkannya undang-undang tersebut, kaum buruh terus-menerus menuntut untuk dicabutnya undang-undang yang telah mengekang demokrasi. Kaum buruh menghendaki undang-undang tersebut dicabut dan diganti dengan undang-undang atau peraturan perburuhan yang demokratis dan menguntungkan kaum buruh.⁴⁴ Pemogokan buruh terjadi dan tidak dapat dihindarkan. Mereka menuntut supaya pemerintah selekasnya mengambil sikap tegas terhadap modal-modal asing di Indonesia.

Dari hasil pemilihan umum yang telah diselenggarakan pada tahun 1955, setelah Kabinet Burhanuddin Harahap yang telah menyerahkan mandatnya, maka dibentuklah kabinet baru. PKI yang mendapat suara cukup besar dalam pemilu 1955 tidak berhasil duduk dalam kabinet yang akan dibentuk. Dalam suasana yang kurang menguntungkan bagi

⁴¹ Herbert Feith, *Pemilihan Umum 1955 di Indonesia*, (Jakarta : Kepustakaan Populer Gramedia, 1999), hal. 89-90.

⁴² Peraturan Menteri Perburuhan No. 90 Tahun 1955 dalam buku *Indonesia dan Pembaharuan Gerakan Buruh dan Hubungan Perburuhan Pancasila* oleh Sukarno, (Jakarta), hal. 10.

⁴³ Inventaris Arsip Kabinet Presiden RI (1950-1959) No. 1472 tentang "*Pernyataan Protes tentang Penghambatan Penyelesaiannya tuntutan Kaum Buruh*" tanggal 16 Januari 1956

⁴⁴ *Ibid*

PKI tersebut, Presiden Sukarno secara terbuka menyatakan keinginannya agar PKI diikutsertakan dalam kabinet. Presiden Sukarno berpendapat bahwa PKI perlu diikutsertakan dalam kabinet karena partai tersebut termasuk dalam partai empat besar pemenang pemilu 1955.⁴⁵ Akan tetapi keinginan Presiden Sukarno tersebut tidak terwujud. Kabinet baru yang terbentuk pada Maret 1956 adalah Kabinet Ali Sastroamijoyo II yang merupakan koalisi antara PNI-Masyumi-NU. Program kerja Kabinet Ali Sastroamijoyo II antara lain adalah pembatalan perjanjian KMB dan meneruskan perjuangan mewujudkan kekuasaan *de facto* atas Irian Barat.⁴⁶

Salah satu program kerja Kabinet Ali Sastroamijoyo II adalah pembatalan perjanjian KMB. Pada tanggal 3 Mei 1956 Indonesia membatalkan hubungan Indonesia-Belanda berdasarkan Perjanjian KMB. Pembatalan tersebut dilakukan secara sepihak oleh Indonesia dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 1956.⁴⁷ undang-undang tersebut menetapkan bahwa hubungan antara Indonesia dan Belanda adalah hubungan yang lazim antara negara-negara yang berdaulat penuh berdasarkan hukum internasional. Kepentingan Belanda di Indonesia diperlakukan sesuai dengan ketentuan dan hukum yang berlaku di Indonesia. Sementara itu hubungan Indonesia-Belanda semakin memburuk karena keterlibatan orang-orang Belanda dalam berbagai pemberontakan dan karena Belanda tidak mau juga menyerahkan Irian Barat ke tangan Indonesia, maka sesuai dengan programnya, Kabinet Ali II membentuk Propinsi Irian Barat yang ibu kotanya berkedudukan di Soa Siu dan peresmian pembentukan propinsi Irian Barat dilakukan bertepatan dengan hari ulang tahun kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1956.⁴⁸

Situasi politik Indonesia pada masa tersebut belum menunjukkan kestabilan. Permasalahan tentang perubahan juga belum teratasi, ditambah lagi persoalan-persoalan politik yang cukup kompleks masih mewarnai kehidupan bangsa Indonesia. Persaingan antara partai politik semakin ketat, sehingga hal itu juga akan berakibat bagi serikat buruh., sehingga diperlukan adanya dukungan dari partai politik terhadap serikat buruh untuk memperjuangkan nasibnya. Hal ini terlihat dari Partai Komunis Indonesia yang menempatkan tokoh-tokohnya di dalam buruh, terutama SOBSI selalu berusaha menghimpun kaum buruh untuk terus menuntut kesejahteraan hidup dan memperjuangkan hak-haknya serta anti-kolonialisme dan anti-kapitalisme asing. Bukan hanya SOBSI saja yang bekerjasama dengan partai dalam mencapai tujuannya, tetapi juga serikat buruh lain, antara lain SBII yang merupakan bentukan Masyumi yang turut serta memperhatikan kaum buruhnya.

BAB IV

AKSI PEMOGOKAN SOBSI CABANG MADIUN TAHUN 1957-1959

Latar Belakang Pemogokan SOBSI Tahun 1957-1959

Telah disebutkan pada pembahasan sebelumnya, bahwa dengan kemenangan PKI dalam pemilu 1955 sebagai empat besar, maka terbuka jalan lebar bagi PKI untuk mewujudkan cita-citanya. Dari hasil pemilu tersebut, PKI ingin ikut duduk dalam kabinet baru yang akan dibentuk. Keinginan PKI tersebut semakin terbuka jalan menuju ke arah sana, karena Presiden Sukarno

⁴⁵ Sekretariat Negara Republik Indonesia, *Gerakan 30 September Pemberontakan Partai Komunis Indonesia, Loc.Cit.*

⁴⁶ _____, *30 Tahun Indonesia Merdeka*, hal. 97.

⁴⁷ *Ibid*, hal. 99.

secara terbuka menyatakan keinginannya agar PKI perlu diikutsertakan dalam kabinet, karena PKI telah berhasil tampil sebagai salah satu dari empat besar dalam pemilu.¹ Akan tetapi keinginan Presiden Sukarno tersebut tidak terwujud, karena kabinet baru yang terbentuk pada masa itu adalah koalisi antara PNI-Masyumi-NU. Kabinet tersebut dinamakan Kabinet Ali Sastroamijoyo II. Meskipun PKI mendapat suara yang cukup besar dalam pemilu, namun PKI tidak berhasil duduk dalam kabinet yang terbentuk.

Kabinet Ali Sastroamijoyo II ini juga tidak berlangsung lama dan tidak lebih dari satu tahun. Pemilihan umum ternyata tidak membawa perbaikan dalam kehidupan politik. Kestabilan pemerintah tidak dapat tercapai karena DPR hasil pemilu, seperti juga DPRS terpecah-pecah dalam sekian banyak partai. Keadaan yang dihadapi Kabinet Ali Sastroamijoyo II memang sulit. Suasana politik yang rumit semakin rumit dengan pengunduran diri Hatta sebagai wakil presiden pada tanggal 1 Desember 1956. Berpisahnya dwitunggal Sukarno-Hatta tersebut merupakan perkembangan yang menguntungkan bagi PKI, karena setelah itu PKI lebih leluasa gerakannya dalam upaya menarik Presiden Sukarno agar lebih dekat kepada PKI.² Meskipun Hatta telah mengundurkan diri sebagai wakil presiden, namun banyak orang Indonesia yang menghendaki agar Hatta aktif kembali. Hal itu terlihat dalam Musyawarah Nasional yang diselenggarakan pada bulan September 1957 yang membahas pula “Masalah Dwitunggal Sukarno-Hatta”. Demikian juga di DPR, beberapa

⁴⁸ *Ibid*, hal. 100.

¹ Sekretariat Negara Republik Indonesia, *Gerakan 30 September Pemberontakan Partai Komunis Indonesia*, (Jakarta, 1994), hal. 27

² *Ibid*, hal. 28.

anggota DPR mengajukan mosi mengenai “pemulihan kerjasama dwitunggal Sukarno-Hatta”.³ Akan tetapi kesemuanya itu tidak membawa hasil. Selain menghadapi persoalan politik yang terjadi dalam pemerintahan, Kabinet Ali II juga harus menghadapi masalah-masalah yang muncul di daerah-daerah, yaitu terjadinya pergolakan di daerah-daerah.

Situasi negara dapat dikatakan sedang mengalami pergolakan yang cukup serius. Dinamika politik Indonesia yang mengalami krisis, ditambah lagi persoalan ekonomi yang kacau dan mencekik masyarakat, karena naiknya segala macam kebutuhan hidup sehari-hari. Di samping itu, dengan masih bercokolnya Belanda di Indonesia dan dominannya kapitalisme asing, menjadikan terhambatnya pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Keadaan yang demikian tersebut akan sangat terasa di kalangan rakyat Indonesia dan buruh pada khususnya. Kehidupan politik dan ekonomi yang belum menunjukkan kestabilan memunculkan berbagai reaksi di beberapa daerah Indonesia, sehingga menimbulkan pergolakan dan gejolak di berbagai daerah. Dalam *Theory of Collective Behaviour* oleh Neil J. Smelser, situasi ini menunjukkan suatu *Necessary Conditions* atau faktor penentu yang memunculkan gejolak sosial atau *structural conduciveness*.⁴ Kondisi yang seperti itu bertambah sulit dikarenakan masih dominannya peranan Belanda dalam kehidupan ekonomi Indonesia. Pengaruh kolonialis Belanda masih kuat di Indonesia, tentu saja hal itu sangat mengganggu jalannya roda pemerintahan

³ Sekretariat Negara Republik Indonesia, *30 Tahun Indonesia Merdeka 1950-1964*, (Jakarta : PT. Citra Lamtoro Gung Persada, 1988), hal. 101

⁴ Neil. J. Smelser, *Theory of Collective Behaviour*, (New York : The Free Press, 1968).

dan perekonomian negara. Banyak berdirinya perusahaan-perusahaan Belanda di Indonesia dan campur tangan Belanda dalam kehidupan ekonomi menyebabkan kesenjangan sosial dalam masyarakat. Dengan maraknya perusahaan Belanda di Indonesia, hal itu juga berarti munculnya monopoli asing dan kapitalisme di Indonesia. Hal itu memicu ketegangan dalam masyarakat, sehingga segenap lapisan masyarakat, terutama buruh melakukan berbagai aksi protesnya. Banyaknya perusahaan milik Belanda yang berdiri di Indonesia, secara otomatis maka berpengaruh pada kehidupan buruh yang diperlakukan secara sewenang-wenang oleh majikan, sehingga hal itu memicu suatu konflik atau ketegangan antara buruh dengan majikan, yaitu buruh melakukan mogok kerja. Faktor-faktor munculnya berbagai aksi protes dan pemogokan oleh buruh selain yang disebutkan di atas, juga dipicu oleh :

1. Masalah Irian Barat

Kondisi negara pada waktu tersebut dapat dikatakan dalam kondisi kritis dan menghadapi perpecahan. Suasana politik makin memburuk dengan meluasnya pemberontakan-pemberontakan di daerah dan tidak tercapainya pemerintahan yang stabil meskipun telah dilakukan pemilihan umum, ditambah lagi dengan adanya persoalan Irian Barat yang tak kunjung selesai, sehingga mengakibatkan hubungan Indonesia dengan Belanda semakin memburuk. Situasi politik yang demikian tersebut juga berdampak bagi perekonomian negara, yaitu terjadinya krisis moneter di Indonesia. Oleh karena Belanda tidak selekasnya menyerahkan Irian Barat ke dalam wilayah Indonesia, maka secara

sepihak Indonesia membatalkan Perjanjian Konferensi Meja Bundar (KMB) pada tanggal 3 Mei 1956. Pada dasarnya Perjanjian KMB tersebut merugikan Indonesia, karena hasil-hasil dari KMB tersebut hanya menguntungkan pihak Belanda. Dominasi kolonial Belanda masih tetap berada di Indonesia meskipun Indonesia telah menjadi bangsa yang merdeka, sehingga semua itu menyebabkan kekacauan-kekacauan dalam negara dan terhambatnya pembangunan nasional.

Pergolakan di daerah tak dapat dihindarkan, di mana-mana terjadi aksi pemogokan dan protes-protes yang dilakukan oleh berbagai golongan dalam masyarakat. Keadaan semakin memanas setelah diketahui bahwa di Irian Barat yang masih menjadi persengketaan antara Indonesia dengan Belanda, di sana telah terjadi tindakan pembunuhan terhadap tujuh orang Indonesia.⁵ Tindakan kejam yang dilakukan oleh tentara Belanda di Irian Barat semakin mendorong dan memicu segenap rakyat Indonesia untuk mengadakan perlawanan sengit terhadap kekejaman-kekejaman kolonial Belanda. Peristiwa itu merupakan faktor pencetus atau faktor pemercepat (*the precipitating factor*)⁶ untuk mengadakan perlawanan dan aksi-aksi oleh segenap rakyat Indonesia untuk melawan kolonial Belanda yang masih bercokol di Indonesia. Berdasarkan persoalan tersebut, maka serikat-serikat buruh yang anti-kolonialisme dan anti-kapitalisme pada awalnya telah memelopori berbagai aksi protes dan pemogokan menyerukan kepada segenap lapisan masyarakat dan serikat-serikat

⁵ Inventaris Arsip Kabinet Presiden RI (1950-1959), Agenda No. 649, tanggal 28 Desember 1956.

⁶ Neil. J. Smelser, *Loc. Cit.*

buruh untuk menuntut kepada pemerintah kolonial Belanda melalui perwakilan pemerintah Belanda agar menarik kembali semua tentara Belanda yang ada di Irian Barat.⁷ Serikat-serikat buruh akan bertindak lebih tegas lagi apabila tuntutan serikat buruh tersebut tidak dilaksanakan. Dijelaskan pula oleh serikat-serikat buruh, bahwa serikat-serikat buruh akan tetap terus mengadakan pembelaan dan tidak gentar akan hambatan atau ancaman yang bakal menimpanya.

Telah dijelaskan di muka, bahwa pada bulan September 1951, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Darurat No. 16 Tahun 1951 sebagai pengganti undang-undang larangan mogok bagi buruh. Dengan dikeluarkannya undang-undang tersebut justru mendatangkan reaksi keras dari rakyat dan serikat-serikat buruh. Hal itu disebabkan karena pada dasarnya undang-undang tersebut mengekang hak-hak buruh dan hak berdemokrasi. Apalagi dengan dikeluarkannya undang-undang tersebut justru semakin memberikan keleluasan bagi kolonial Belanda dan kapitalis asing untuk semakin menguasai segala sumber-sumber vital negara.⁸ Oleh karena itu rakyat dan serikat-serikat buruh memprotes undang-undang tersebut dan menuntut kepada pemerintah agar mencabut undang-undang itu. Karena sampai saat itu tuntutan-tuntutan tersebut tidak diperhatikan oleh pemerintah, maka aksi-aksi oleh serikat-serikat buruh semakin deras mengalir, tuntutan-tuntutan terus dilancarkan, bahkan serikat-serikat buruh yang tergabung dalam SOBSI Jawa Timur mendukung

⁷ Inventaris Arsip Kabinet Presiden (1950-1959), Agenda No. 649, Loc. Cit.

sepenuhnya atas protes-protes dan aksi-aksi tersebut serta diharapkan pemerintah untuk segera mengganti undang-undang tersebut dengan undang-undang atau peraturan yang lebih demokratis dan menguntungkan kaum buruh.⁹

Situasi sosial politik di Madiun yang juga mengalami pergolakan sebagai akibat dari berbagai persoalan politik yang melanda Indonesia. Apalagi mengingat latar belakang kehidupan politik Madiun sebelumnya, yaitu telah mengalami pergolakan akibat dari Pemberontakan di Madiun 1948 yang melibatkan Partai Komunis Indonesia dan SOBSI, maka dengan adanya aksi-aksi dari serikat-serikat buruh di Madiun terutama dari SOBSI adalah sesuatu yang sudah tidak mengherankan lagi. Meskipun pasca Peristiwa Madiun 1948 telah mengakibatkan kehancuran bagi komunis dan perpecahan dalam tubuh SOBSI, namun di masa Demokrasi Liberal ini keduanya telah bangkit kembali, bahkan komunis berhasil menjadi salah satu partai besar dari hasil pemilu 1955 terutama di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Melihat sejarah kehidupan politik Madiun dan latar belakang kehidupan buruh terutama SOBSI tersebut, maka semua itu mendorong serikat-serikat buruh terutama serikat buruh yang tergabung dalam SOBSI Cabang Madiun untuk ikut terjun dan bergabung dalam aksi-aksi tersebut dan menyerukan untuk membebaskan Irian Barat dari Belanda, sehingga dapat dikatakan aksi-aksi dari SOBSI yang paling dominan. Hal itu dikarenakan bahwa SOBSI adalah saluran gerakan yang pas

⁸ Inventaris Arsip Kabinet Presiden RI (1950-1959), Agenda No. 691, tertanggal 28 Januari 1956.

⁹ Inventaris Arsip Kabinet Presiden RI (1950-1959), Agenda No. 1089, tertanggal 8 Februari 1956.

bagi serikat buruh dan SOBSI yang paling berani dalam menentang segala bentuk kapitalisme dan kolonialisme asing.

Aksi-aksi untuk merebut Irian Barat dari Belanda menggema di mana-mana. Serikat-serikat buruh dari berbagai lapangan kerja adalah kelompok yang paling dominan aksi-aksi tersebut. Serikat Buruh Perkebunan Republik Indonesia (SARBUPRI) mengajak semua golongan untuk bersatu dalam merebut Irian Barat. Tindakan pemerintah Belanda yang memasukkan Irian Barat dalam Undang-Undang Dasar Negara Belanda sebagai bagian dari Negara Kerajaan Belanda merupakan pelanggaran hukum dan pendudukan tentara dari Pemerintah Belanda di Irian Barat adalah tidak sah dan menyebabkan penderitaan bagi rakyat Indonesia karena tindakan tentara Belanda yang sewenang-wenang di Irian Barat.¹⁰

Perebutan Irian Barat memicu serikat-serikat buruh dan rakyat untuk melakukan aksi-aksi pembebasan Irian Barat, namun di samping itu aksi-aksi oleh serikat-serikat buruh juga dipicu oleh adanya Undang-Undang Darurat No. 16/1951 seperti disebutkan di atas, karena antara persoalan Irian Barat dengan undang-undang tersebut ada keterkaitan, yaitu bahwa dengan adanya undang-undang tersebut yang dirugikan adalah kaum buruh dan para pengusaha nasional, sedangkan para kapitalis asing atau pemilik modal asing, di antaranya adalah Belanda, mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dan menguasai sumber-sumber vital dalam negeri, termasuk menguasai Irian Barat dan tidak mau menyerahkannya kepada Indonesia. Undang-undang tersebut

¹⁰ *Berita Organisasi SARBUPRI*, tanggal 19 Oktober 1957

belum juga dicabut oleh pemerintah, bahkan melarang kaum buruh untuk melakukan pemogokan, padahal dari pandangan buruh, pemogokan adalah hak kaum buruh dalam negara yang berdemokrasi dan dijamin melalui Undang-Undang Dasar Sementara RI (UUDS RI) 1950 dan pemogokan merupakan senjata bagi kaum buruh dalam melawan kapitalis-kapitalis asing di Indonesia.¹¹

Walaupun pemogokan-pemogokan buruh dilarang oleh undang-undang tersebut, tetapi kaum buruh tidak memperdulikannya dan melanggar larangan tersebut, sehingga menyebabkan banyaknya tokoh buruh yang ditangkap dan dihukum, sedangkan tindakan-tindakan pemilik modal asing yang dinilai melanggar hak asasi buruh dibiarkan begitu saja. Oleh karena semakin meluasnya tuntutan-tuntutan buruh dan rakyat untuk mencabut undang-undang darurat tersebut, maka pemerintah pun menyampaikan konsepsi pengganti undang-undang tersebut, tetapi konsepsi tersebut lebih tidak demokratis, padahal dari pihak buruh, yaitu dari Dewan Nasional SOBSI telah menyampaikan amandemen yang dinilai cukup baik dan menguntungkan bagi serikat-serikat buruh.¹² Oleh karena tuntutan-tuntutan buruh tidak dipenuhi, maka aksi-aksi dari serikat-serikat buruh semakin merajalela..Undang-undang Darurat No. 16 tahun 1951 yang dinilai merugikan buruh oleh pemerintah tidak segera diganti, tetapi pemerintah telah mempunyai konsep tentang pengganti undang-undang tersebut dan hasilnya sama saja, karena lebih tidak demokratis dan merugikan kaum buruh. Hal itu mendorong Serikat Buruh Minyak Kelapa

¹¹ Inventaris Arsip Kabinet Presiden RI (1950-1959), Agenda No. 649, tertanggal 21 Januari 1957.

¹² *Ibid*

Seluruh Indonesia (SARBUMIKSI) yang merupakan anggota SOBSI Jawa Timur juga melayangkan resolusi dan protes kepada pemerintah. Serikat buruh tersebut juga mendukung usul amandemen dari Dewan Nasional SOBSI tentang rancangan undang-undang pengganti Undang-Undang Darurat No. 16/1951.¹³

Situasi politik dalam negeri bertambah kacau. Gerakan-gerakan di daerah-daerah semakin meningkat, maka dengan alasan untuk menyelamatkan negara dan bangsa dari bahaya perpecahan dan untuk memperbaiki pemerintahan, Presiden Sukarno yang pada waktu itu juga mulai didekati oleh PKI mengeluarkan sebuah konsepsi dalam pidatonya yang berjudul “Menyelamatkan Republik Proklamasi” di hadapan para pemimpin partai dan tokoh masyarakat di Istana Merdeka pada tanggal 21 Februari 1957, yang kemudian konsepsi tersebut dikenal sebagai “Konsepsi Presiden”.¹⁴ Konsepsi Presiden pada intinya berisi :

1. Sistem Demokrasi Parleментар secara Barat tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia, karena itu harus diganti dengan sistem Demokrasi Terpimpin.
2. Untuk pelaksanaan sistem Demokrasi Terpimpin perlu dibentuk suatu kabinet gotong royong yang anggotanya terdiri dari semua partai dan organissi berdasarkan perimbangan kekuatan yang ada dalam masyarakat. Konsepsi Presiden tersebut menetengahkan pula perlunya pembentukan “Kabinet Kaki Empat” yang

¹³ Inventaris Arsip Kabinet Presiden RI (1950-1959), Agenda No. 2396, tertanggal 4 Maret 1957.

¹⁴ Sekretariat Negara Republik Indonesia, *Gerakan 30 September Pemberontakan Partai Komunis Indonesia, Op. Cit*, hal. 29.

mengandung arti bahwa keempat partai besar, yakni PNI, Masyumi, NU, dan PKI, turut serta didalamnya untuk menciptakan kegotong-royongan nasional.

3. Pembentukan Dewan Nasional yang terdiri dari golongan fungsional dalam masyarakat. Tugas utama Dewan Nasional tersebut adalah memberi nasihat kepada kabinet baik diminta maupun tidak diminta.¹⁵

Konsepsi Presiden tersebut menimbulkan perdebatan yang hangat dalam masyarakat dan dalam DPR. Partai-parti politik seperti Masyumi, NU, PSII, Katholik, dan PRI menolak konsepsi tersebut dan berpendapat, bahwa mengubah sistem pemerintahan dan susunan ketatanegaraan secara radikal seperti itu adalah wewenang konstituante.¹⁶ Suasana pun semakin menegang setelah usaha-usaha untuk melaksanakan Konsepsi Presiden (berpusat di ibu kota) mendapat tantangan dari daerah-daerah yang mengakibatkan gerakan-gerakan di daerah semakin memuncak dan meluas. Hampir setiap daerah mengadakan rapat, seperti rapat serikat buruh, mahasiswa, kelompok politik, dan golongan-golongan lain yang menyambut baik rencana Presiden Sukarno. Slogan-slogan yang ditulis dengan cat dan terpampang di dinding-dinding kantor, pada kaca-kaca etalase toko dan tiang-tiang telepon di Jakarta.¹⁷ Slogan “Laksanakan Konsepsi Presiden” digores dengan cat pada dinding-dinding

¹⁵ Sekretariat Negara Republik Indonesia, *30 Tahun Indonesia Merdeka 1950-1964*, Op. Cit., hal. 107.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ John D. Legge, *Sukarno Sebuah Biografi Politik*, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1996), hal. 327-328.

gedung parlemen juga perusahaan-perusahaan besar. Sebagian besar dari dukungan “spontan” tersebut menampilkan teknik pengerahan massa partai komunis, tetapi pada akhirnya ketika masalah itu dibicarakan dalam pertemuan di Istana Negara, banyak partai yang tidak setuju dengan konsepsi tersebut.

2. Pemberlakuan SOB (*Staat van Orlog on van Beleg*)

Situasi politik dalam negeri bertambah kacau. Gerakan-gerakan di daerah semakin meningkat, bahkan perwira militer juga terlibat di dalamnya. Nasution, selaku Kepala Staf Angkatan Darat pada waktu itu, berusaha menengahi, kemudian membicarakan kemungkinan penyelesaiannya dalam pertemuannya dengan Presiden Sukarno pada tanggal 5 Maret 1957.¹⁸ Bisa dikatakan bahwa sejak permulaan Maret 1957, Sukarno dan Angkatan Darat telah menempatkan diri sebagai kekuatan-kekuatan politik utama di Indonesia. Tidak lama kemudian, pada 14 Maret 1957, Perdana Menteri Ali Sastroamijoyo mengembalikan mandatnya. Setelah Perdana Menteri mengembalikan mandatnya, Presiden Sukarno menyatakan seluruh wilayah Republik Indonesia, termasuk semua perairan teritorialnya, dalam keadaan darurat perang.¹⁹ Keadaan darurat perang tersebut telah membuka jalan bagi perluasan yang cepat dari peranan tentara bukan hanya di bidang politik, tetapi juga di bidang-bidang administrasi umum dan pengelolaan ekonomi.²⁰

¹⁸ *Ibid*, hal.329

¹⁹ Sekretariat Negara Republik Indonesia, *30 Tahun Indonesia Merdeka 1950-1964, Op. Cit.*, hal. 109.

²⁰ Harold Crouch, *Militer dan Politik di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Harapan, 1986), hal.30-32.

Dalam kaitan diberlakukannya SOB, sebelumnya di daerah Madiun sendiri pada tanggal 2 Maret 1957 telah diadakan rapat oleh Dinas Penyelenggara SOB Kabupaten Madiun yang bertempat di pendopo Kabupaten Madiun. Pertemuan tersebut dihadiri oleh Penguasa Darurat Militer Madiun, yaitu Mayor Moh. Saffa, wakil CPM, Kepala Polisi Kabupaten Madiun, Wakil Kejaksaan Madiun, Kepala Jawatan Niveau Kabupaten Madiun, para wedana, para camat, dan lain-lainnya. Pertemuan itu dipimpin oleh kepala daerah. Dalam pertemuan tersebut dijelaskan mengenai soal pelaksanaan SOB untuk wilayah Jawa Timur. Pada pertemuan itu, Komisaris Residen mengatakan supaya SOB dilaksanakan untuk menegakkan disiplin, hukum, demokrasi, dan stabilisator keamanan.²¹ Serikat Buruh Kempen (Kementerian Penerangan) Kabupaten Madiun mendukung adanya konsepsi tersebut.²²

Dengan adanya pemberlakuan SOB tersebut, PKI memberikan pernyataan seputar pemberlakuan SOB tersebut. Melalui keterangan Pers Sekretaris Jenderal Sentral Komite PKI, yaitu D.N. Aidit menyatakan bahwa rakyat dan angkatan perang harus bekerjasama untuk mencapai tujuan-tujuan positif dengan adanya keadaan darurat perang. Dalam keterangan persnya tersebut, Aidit mengatakan bahwa keadaan darurat perang tersebut jangan dikatakan sebagai peraturan yang dibuat oleh kolonilais Belanda untuk membela kepentingan Belanda. Peraturan SOB menurut PKI adalah alat untuk memusatkan segala kekuasaan di tangan satu orang, yaitu pada saat itu adalah di tangan Presiden Sukarno selaku

²¹ *Suara Rakyat*, Senin Pon, 8 April 1957.

²² *Harian Umum*, Selasa Legi, 12 Maret 1957

Panglima Tertinggi, seorang demokrat dan patriot Indonesia.²³ Selain itu dikatakan pula oleh Aidit, bahwa dengan dinyatakannya darurat perang oleh presiden, Kabinet Ali Sastroamijoyo meyerahkan kembali mandatnya. Hal seperti itu menurut Sentral Komite PKI bukanlah akibat dari kekalahan suara di parlemen, tetapi sebagai akibat dari peristiwa-peristiwa pemberontakan di daerah-daerah yang anti demokrasi. Selain itu dalam keterangan persnya, Sentral Komite PKI/Aidit mengatakan bahwa dilihat dari sudut pandang politik, pengumuman keadaan darurat perang oleh presiden adalah kuat, sedangkan secara hukum, tindakan tersebut dibenarkan oleh Ketua Mahkamah Agung Mr. Wirjono dan Ketua Parlemen, yaitu Mr. Sartono.²⁴

Setelah Kabinet Ali Sastroamijoyo II mengembalikan mandatnya, maka dibentuk kembali kabinet baru. Presiden Sukarno menunjuk Suwiryo sebagai formatur. Dua kali Suwiryo berusaha tetapi gagal membentuk kabinet. Dengan gagalnya Suwiryo, akhirnya Presiden Sukarno menunjuk dirinya sendiri sebagai formatur. Formatur Ir. Sukarno membentuk Kabinet Darurat Ekstraparlementer dengan Ir. Djuanda sebagai Perdana Menteri. Kabinet Djuanda ini diberi nama Kabinet Karya dan di dalamnya duduk dua orang anggota Angkatan Bersenjata.²⁵ Program Kabinet Karya disebut pancakarya, yaitu :

1. Membentuk Dewan Nasional,
2. Normalisasi keadaan RI,

²³ Arsip SOBSI (1950-1965) No. 358 tentang “ *Keterangan Pers Sekretaris Jenderal Sentral Komite PKI, D.N. Aidit*” tanggal 17 Maret 1957.

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *30 Tahun Indonesia Merdeka 1950-1964, Op. Cit.*, hal. 110.

3. Melanjutkan pembatalan KMB,
4. Memperjuangkan Irian Barat,
5. Mempercepat pembangunan.²⁶

3. Gerakan Pembebasan Irian Barat

Setelah pengakuan kedaulatan Indonesia, maka usaha-usaha dilancarkan oleh Indonesia untuk mengembalikan Irian Barat ke pangkuan Republik Indonesia. Antara tahun 1950-1953, usaha tersebut dilakukan terutama melalui meja perundingan secara bilateral dalam lingkungan ikatan Uni Indonesia-Belanda. Setelah usaha-usaha tersebut tidak membawa hasil, maka sejak tahun 1953 perjuangan pembebasan Irian Barat mulai dilakukan di forum-forum internasional, terutama melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan forum-forum solidaritas Asia-Afrika seperti Konferensi Asia -Afrika (KAA).²⁷ Usaha-usaha di bidang diplomasi tersebut ternyata tidak juga membawa hasil, sehingga pemerintah mulai mengambil sikap yang keras terhadap Belanda, yaitu dengan pembatalan Uni Indonesia-Belanda pada tahun 1954 diikuti pembatalan secara sepihak persetujuan KMB oleh Indonesia pada tahun 1956. Tindakan pemerintah Indonesia ini sangat menentukan dan berperan penting dalam memobilisasi segenap lapisan masyarakat untuk ikut melakukan gerakan-gerakan pembebasan Irian Barat.

Sikap pemerintah Indonesia, yaitu secara sepihak membatalkan persetujuan KMB, mendapat dukungan dari berbagai pihak. Telah disebutkan di

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Ibid.*, hal. 114

atas, bahwa dengan pembatalan persetujuan KMB tersebut berdampak bagi hubungan Indonesia-Belanda yang semakin memanas, tetapi meskipun pemerintah Indonesia telah membatalkan persetujuan KMB, kenyataannya adalah pemerintah Indonesia masih belum mampu menunjukkan ketegasannya terhadap Belanda yang masih “berkuasa” di Indonesia. Belanda bukan hanya tidak ingin menyerahkan Irian Barat ke dalam wilayah Indonesia, tetapi pemerintah Belanda telah bertindak sewenang-wenang terhadap rakyat Indonesia di Irian Barat, yaitu dengan menempatkan tentara Belanda di Irian Barat.²⁸

Gerakan-gerakan dalam rangka pembebasan Irian Barat menggema di mana-mana. Protes-protes dari rakyat dan serikat-serikat buruh selalu bermunculan dan tidak ada henti-hentinya. Serikat-serikat buruh yang sebagian besar tergabung dalam SOBSI berada di garis depan dalam melancarkan aksi-aksi tersebut. Kaum buruh juga mendesak pemerintah agar bertindak tegas terhadap kolonialis Belanda dan mendesak pemerintah untuk menasionalisasi semua aset-aset Belanda di Indonesia. Aksi-aksi dari serikat-serikat buruh tersebut pada akhirnya berlanjut ke aksi pemogokan buruh yang bekerja pada perusahaan-perusahaan Belanda. Protes-protes terhadap kurang tegasnya sikap pemerintah tidak hanya datang dari serikat buruh saja, tetapi juga datang dari Partai Syarikat Islam Indonesia (PSSI) Jember yang juga mengeluarkan

²⁸ Inventaris Arsip Kabinet Presiden RI (1950-1959), Agenda No. 649, tertanggal 21 Januari 1957.

pernyataan berkenaan dengan pemberlakuan SOB dan gerakan pembebasan Irian Barat. Melalui pernyataannya itu PSSI menyatakan bahwa;

1. segera dicabutnya Keputusan Presiden No. 40 Tahun 1957 atas berlakunya peraturan-peraturan SOB;
2. adanya jaminan hak-hak asasi dan pelaksanaan hak-hak demokrasi bagi rakyat dan negara supaya rakyat dan negara dapat bekerja dengan tenang;
3. dengan segera dan secepat mungkin mengusahakan kembalinya Irian Barat ke dalam wilayah Republik Indonesia.²⁹

B. Aksi Pemogokan SOBSI Cabang Madiun

1. Pemogokan dan Pengambilalihan oleh Buruh SOBSI

Aksi pemogokan buruh pada masa itu terjadi di berbagai daerah. Bukan hanya buruh saja yang terlibat dalam aksi untuk membebaskan Irian Barat, tetapi juga segenap lapisan masyarakat. Dalam aksi pemogokan buruh tersebut, SOBSI sebagai saluran gerakan kelas buruh selalu berada di garis depan dalam memimpin aksi-aksi tersebut, hal itu dikarenakan SOBSI merupakan organisasi buruh yang terdiri dari serikat-serikat buruh dari berbagai lapangan industri dan terdiri dari tokoh-tokoh revolusioner yang anti-fasis dan anti-kapitalis.

Perlawanan atau pemogokan buruh yang di dorong oleh beberapa faktor yang telah disebutkan di atas, yaitu antara lain semangat anti-kapitalis dan

anti-kolonialis dari buruh yang ingin menghapuskan segala bentuk monopoli asing dan penjajahan di Indonesia yang dalam ini adalah berkaitan dengan permasalahan Irian Barat yang berada dalam cengkraman Belanda.

Kesewenang-wenangan Belanda terhadap masyarakat Irian Barat secara tidak langsung berarti Belanda masih menjajah Indonesia dan secara sewenang-wenang melakukan tindakan kejam yang menewaskan tujuh rakyat Indonesia di Irian Barat. Ditambah lagi dengan semakin maraknya perusahaan-perusahaan asing yang berdiri di Indonesia yang merugikan perusahaan nasional yang pada akhirnya berdampak bagi pekerja atau buruh, di mana banyak buruh yang diperlakukan secara sewenang-wenang, pemberian upah yang jauh dari standar, pemecatan, itu semua mendorong buruh dalam menggerakkan massanya untuk melakukan aksi-aksi pemogokan terhadap kapitalis yang telah mencekik rakyat.

Faktor-faktor yang disebutkan di atas tersebut merupakan faktor pencetus dari munculnya aksi-aksi pemogokan buruh, terutama oleh SOBSI yang merupakan saluran gerakan buruh bagi serikat buruh yang berasal dari lapangan industri yang berbeda-beda. Serikat-serikat buruh yang melakukan aksi pemogokan-pemogokan tersebut antara lain adalah Serikat Buruh Pelabuhan dan Pelayaran (SBPP) Surabaya yang merupakan anggota SOBSI,

²⁹ Inventaris Arsip Kabinet Presiden RI (1950-1959), Agenda No. 1509, tertanggal 11 November 1957.

Serikat Buruh Kereta Api Cabang Madiun, Serikat Buruh Gula Cabang Madiun, SARBUPRI, Serikat Buruh Pekerjaan Umum (SBPU), dan serikat-serikat buruh lain yang semuanya itu tergabung dalam SOBSI Jawa Timur. Serikat-serikat buruh tersebut melakukan aksi mogok kerja terhadap perusahaan-perusahaan Belanda.³⁰

Serikat-serikat buruh yang sebagian besar tergabung dalam SOBSI dalam melakukan aksi-aksinya tidak gentar dengan segala resiko yang dihadapinya. Dengan mengatasnamakan buruh dan pembebasan Irian Barat, serikat-serikat buruh tersebut semakin gencar dalam pemogokan terhadap perusahaan-perusahaan Belanda. Aksi pemogokan oleh buruh terhadap perusahaan-perusahaan Belanda dalam rangka pembebasan Irian Barat tidak hanya terjadi di Madiun saja, tetapi juga di setiap daerah di Jawa Timur dan juga seluruh daerah di Indonesia.

Telah disebutkan sebelumnya bahwa perkembangan politik di Madiun sejak dulu dan terutama pada masa revolusi, di dominasi oleh kelompok-kelompok perjuangan. Selain itu di Madiun pada masa itu juga banyak didirikan pusat-pusat pelatihan dan pendidikan politik bagi golongan kiri, yang mana dukungan terhadap golongan kiri di Madiun berasal dari serikat-serikat dagang, terutama serikat perkeretaapian, serikat-serikat buruh perkebunan, dan serikat buruh lainnya. Oleh karena itu tidak mengherankan apabila di

³⁰ Inventaris Arsip Kabinet Presiden RI (1950-1959), Agenda No. 4644 dan 16677

Madiun banyak berkembang serikat-serikat buruh yang mana serikat-serikat buruh tersebut juga berada di garis depan dalam melakukan aksi-aksi pemogokan buruh. Aksi pemogokan buruh di Madiun dilakukan oleh serikat-serikat buruh yang tergabung dalam SOBSI Cabang Madiun, di antaranya adalah pemogokan yang dilakukan Serikat Buruh Kereta Api (SBKA) Madiun yang merupakan anggota SOBSI.

Aksi-aksi pemogokan buruh-buruh tersebut juga merupakan kelanjutan dari aksi-aksi pemogokan sebelumnya. Masalah Irian Barat juga melatarbelakangi pemogokan oleh serikat buruh tersebut. Akan tetapi dengan dikeluarkannya larangan mogok bagi buruh oleh Menteri Pertahanan RI selaku Penguasa Militer, maka serikat-serikat buruh melakukan protes terhadap tindakan pemerintah tersebut, karena tindakan tersebut tidak mencerminkan demokrasi dan menyebabkan kegelisahan di kalangan buruh. Aksi pemogokan tersebut bukanlah sesuatu yang direncanakan, tetapi adalah suatu gerakan atau aksi yang muncul karena situasi dan kondisi yang sudah tidak nyaman lagi, sehingga meledak dalam bentuk aksi pemogokan dan ini terjadi secara spontan dan terjadi di beberapa daerah.

2. Larangan Pemogokan dan Pengambilalihan dari Penguasa Militer

Aksi-aksi pemogokan dan pengambilalihan terhadap modal-modal dan perusahaan-perusahaan Belanda oleh serikat-serikat buruh pada akhirnya mendapat larangan keras dari pemerintah Indonesia, karena oleh pemerintah Indonesia bahwa dengan adanya berbagai aksi pemogokan oleh segenap lapisan masyarakat tersebut berdampak bagi semakin kacanya situasi Indonesia dan juga bagi perekonomian Indonesia. Larangan mogok dari Penguasa Militer tersebut merupakan tindakan untuk mengamankan situasi negara agar tidak semakin kacau dan untuk meredam ketegangan-ketegangan dalam negara. Namun di satu sisi, dengan adanya larangan mogok bagi buruh oleh pemerintah, maka serikat-serikat buruh pun melakukan protes keras terhadap larangan tersebut. Protes-protes tersebut antara lain datang dari Serikat Buruh Pelabuhan Pelayaran (SBPP) Surabaya yang merupakan anggota SOBSI wilayah Jawa Timur. SBPP tersebut melayangkan protes melalui resolusinya yang ditujukan kepada Menteri Perburuhan Republik Indonesia, yaitu;

- 1. bahwa dengan dikeluarkannya larangan mogok dari Menteri Pertahanan selaku Penguasa Militer Pusat berarti pengekangan terhadap hak-hak buruh ;*

2. mendesak kepada pemerintah untuk segera mencabut Undang-Undang Darurat No. 16/1951 yang hingga saat itu masih menjadi persoalan dan undang-undang tersebut sangat merugikan kaum buruh ;
3. mendesak kepada Menteri Perburuhan untuk segera mengesahkan Undang-Undang Perburuhan No. 22 Tahun 1957 sebagai pengganti Undang-Undang Darurat No. 16 Tahun 1951, karena Undang-Undang Perburuhan No. 22 Tahun 1957 oleh buruh dinilai lebih baik dan lebih memperhatikan buruh.³¹

Protes terhadap larangan mogok bagi kaum buruh oleh Penguasa Militer juga datang dari Serikat Buruh Kereta Api (SBKA) Cabang Madiun yang merupakan anggota SOBSI. Berdasarkan hasil rapat kerja SBKA Bengkel Madiun pada tanggal 27 September 1957 yang dihadiri oleh ranting-rantingnya, dan sejumlah anggotanya menyatakan bahwa :

- a. Pada dasarnya larangan mogok bagi kaum buruh adalah kurang memberikan dorongan untuk lebih maju guna memenuhi rencana pemerintah dalam masa pembangunan 5 tahun,
- b. Sesuai dengan dukungan kaum buruh terhadap pemerintah, hal tersebut dapat diatasi dengan cara berunding dan tidak mungkin kaum buruh akan melanggar, kecuali jika dalam keadaan terpaksa,

³¹ Inventaris Arsip Kabinet Presiden RI, Agenda No. 4644, tertanggal 25 September 1957.

c. Salah satu jalan untuk mengatasi kesulitan ekonomi sebagaimana yang dimaksud oleh pemerintah, rapat mengajukan pendapatnya, yaitu :

1. Supaya pemerintah meninjau kembali larangan mogok tersebut,
2. Mencegah naiknya harga-harga kebutuhan hidup sehari-hari,
3. Menasionalisasi perusahaan partikelir dan perusahaan-perusahaan vital lainnya,
4. Melaksanakan Undang-Undang No. 22 Tahun 1957 sebagai gantinya Undang-Undang Darurat No. 16 Tahun 1951.³²

Serikat Buruh Kereta Api (SBKA) Surabaya juga mengeluarkan pernyataan sehubungan dengan dikeluarkannya larangan mogok bagi serikat-serikat buruh oleh Penguasa Militer. Dalam pernyataannya, pada dasarnya SBKA Surabaya tersebut mendukung semua tindakan yang diambil oleh pemerintah Indonesia dalam menormalisasi keadaan negara, akan tetapi SBKA Surabaya tersebut sangat menyesalkan tindakan pemerintah melalui Menteri Pertahanan selaku Penguasa Militer yang mengeluarkan "Peraturan tentang pencegahan pemogokan di Perusahaan-Perusahaan, Jawatan-Jawatan, dan Badan-Badan vital", karena larangan mogok tersebut dikeluarkan pada

³² Arsip Konstituante RI No. 111, "Pernyataan Tentang Larangan Mogok Atas Pengumuman Menteri Pertahanan RI (Penguasa Militer), oleh SBKA Bengkel Madiun, tanggal 9 Oktober 1957.

saat harga-harga kebutuhan hidup naik, sehingga secara berdampak bagi perekonomian negara. Tetapi dari pandangan pemerintah, bahwa kesulitan di bidang ekonomi itu disebabkan oleh adanya pemogokan buruh, sehingga pemerintah mengeluarkan larangan pemogokan bagi buruh. Selain itu diungkapkan pula oleh SBKA Surabaya tersebut, bahwa pemogokan-pemogokan itu bukan merupakan hobi buruh, melainkan pemogokan itu dilakukan apabila keadaan mendesak, SBKA Surabaya tersebut juga mendesak kepada pemerintah untuk segera mencabut larangan mogok bagi buruh, karena ditakutkan akan dimanfaatkan oleh golongan yang ingin mengadu domba antara buruh dengan pemerintah.³³

Persatuan Pelajar Demobilisant (Union of Demobilized Students) Jawa Timur pada tanggal 13 November 1957 mengirimkan surat kepada Presiden Sukarno berkenaan dengan masalah Irian Barat. Berdasarkan Konferensi PPD se Jatim yang diselenggarakan pada tanggal 2 dan 3 November 1957, maka PPD menyatakan mendukung pembebasan Irian Barat dan mengharapkan pemerintah untuk memperhatikan masalah tersebut.³⁴

Oleh karena adanya protes dan desakan terhadap pemerintah untuk segera membebaskan Irian Barat dan memasukkannya ke dalam wilayah

³³ Arsip Konstituante RI (1956-1960), Agenda No. 8466, tertanggal 15 Oktober 1957.

³⁴ *Ibid.*, tanggal 29 November 1957

Republik Indonesia serta dalam suasana anti Belanda yang semakin meningkat, maka pada tanggal 18 November 1957 diadakan rapat umum pembebasan Irian Barat di Jakarta. Rapat umum tersebut diikuti oleh aksi pemogokan total oleh buruh-buruh yang bekerja pada perusahaan-perusahaan Belanda pada tanggal 2 Desember 1957. Pada hari itu juga pemerintah melarang beredarnya semua terbitan dan film yang menggunakan bahasa Belanda,. Pada tanggal 5 Desember 1957, semua kegiatan perwakilan konsuler Belanda di Indonesia diminta dihentikan.³⁵ Selanjutnya terjadilah serentetan aksi pemogokan buruh yang semula mendapat larangan keras dari pemerintah. Aksi-aksi tersebut berlanjut ke pengambilalihan modal perusahaan-perusahaan Belanda di Indonesia yang semula dilakukan secara spontan oleh rakyat dan buruh yang bekerja pada perusahaan-perusahaan Belanda. Tak ketinggalan SBKA Bengkel Madiun, Serikat Buruh Gula Madiun, dan serikat buruh yang tergabung dalam Dewan Cabang SOBSI Madiun juga melancarkan aksi pemogokan dan pengambilalihan terhadap perusahaan-perusahaan Belanda. Serikat-serikat buruh yang bekerja pada perusahaan-perusahaan Belanda melakukan mogok kerja. Serikat-serikat buruh tersebut tergabung dalam SOBSI Cabang Madiun.

³⁵ 30 Tahun Indonesia Merdeka 1950-1964, Loc. Cit.

Pada tanggal 5 Desember 1957, Menteri Kehakiman G.A. Maengkom mengumumkan, bahwa setiap pengambilalihan sewenang-wenang terhadap perusahaan Belanda yang dilakukan oleh serikat buruh tersebut bertentangan dengan hukum yang ada dan hanya tindakan yang diambil oleh Penguasa Militer Pusat atau Penguasa Militer Daerah untuk mengawasi dan melindungi perusahaan Belanda demi keamanan dan ketertiban yang dapat dibenarkan. Kepala Staf Angkatan Darat selaku Penguasa Militer Pusat pada tanggal 10 Desember 1957 juga mengeluarkan sebuah peraturan yang ditujukan kepada segenap Penguasa Militer Daerah untuk mengambilalih pelaksanaan semua perusahaan Belanda yang ada dalam masing-masing wilayah militer atas nama Republik Indonesia.³⁶ Hal itu dikarenakan, yaitu bahwa pada awalnya aksi anti-Belanda ini dipimpin oleh Komite Aksi Pembebasan Irian Barat Pusat (Central Action Committes for the Liberation of West Irian) yang didukung oleh pemerintah. Tetapi, pada hari-hari pertama bulan Desember 1957, di beberapa perusahaan, para personal Indonesia di antaranya dari buruh memulai tindakan independen, dengan mengambilalih pimpinan perusahaan dari Belanda.³⁷ Dalam beberapa kasus, serikat dagang sayap kiri dikabarkan menghasut agar terjadi situasi itu, sehingga melalui

³⁶ Karl. J. Pelzer, *Sengketa Agraria*, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1991), hal. 203-206.

³⁷ W.F. Wrtheim, *Masyarakat Indonesia dalam Transisi*, (Yogyakarta : PT. Tiara Wacana, 1999), hal. 292.

KSAD Jenderal Nasution dikeluarkanlah larangan semua tindak lanjut pengambilalihan perusahaan Belanda.³⁸ Secara berangsur-angsur, semua perusahaan Belanda ditempatkan di bawah kontrol militer. Tindakan oleh militer ini dalam necessary condition (theory collective of behaviour) dikategorikan sebagai faktor penentu yang berusaha merintangi dan mencegah terjadinya suatu tindakan yang lebih bahaya lagi.³⁹

3. Undang-Undang Nasionalisasi

Komite Tindakan Pusat semi-resmi dibubarkan pada tanggal 27 Desember 1957 dan Perdana Menteri Juanda mengumumkan bahwa Dewan Keamanan Nasional di bawah kepemimpinannya, selanjutnya akan melangsungkan kampanye perebutan Irian Barat. Sedikit demi sedikit tindakan itu disalurkan ke dalam Front Nasional Pembebasan Irian Barat (FNPIB) yang dibentuk pada tanggal 10 Februari 1958 yang berada di bawah kepemimpinan militer, sebagai organisasi massa yang akhirnya dipimpin oleh Jenderal Nasution.⁴⁰ Situasi politik dalam negeri pada tahun 1958, selain masalah pembebasan Irian Barat, juga diwarnai aksi

³⁸ *Ibid.*

³⁹ Neil. J. Smelser, *Loc. Cit.*

⁴⁰ Guy Pankar, *The Role of Political Organization in Indonesia, dalam Eastern Survey*, Vol.. XXVII, hal. 129 dst, dalam Masyarakat Indonesia dalam Transisi, hal. 291.

pemberontakan di daerah yang pada akhirnya pecah pada bulan Februari 1958 melalui Pemberontakan PRRI-Permesta. Segala upaya dilakukan oleh pemerintah dalam menumpas pemberontakan tersebut. Dalam situasi yang semakin rawan konflik, Serikat Buruh Gula-Proklamasi (SBG-Proklamasi) Madiun mengeluarkan resolusi yang berkaitan dengan pengertian ambil-alih perusahaan-perusahaan milik Belanda. Konferensi Kerja SBG-Proklamasi tanggal 28 sampai dengan 30 Juni 1958 yang diselenggarakan di Madiun yang dikunjungi oleh segenap cabang-cabangnya dan utusan dari Sentral Organisasi Buruh Republik Indonesia-Pusat (SOBRI-Pusat) setelah mendengar laporan sekitar "Penguasaan Perkebunan/ Pertanian milik Belanda atas keputusan Penguasa Militer/Menteri Pertahanan No. 1063/PMT/57 tanggal 9 Desember 1957 dengan istilah "ambil-alih" :

Mengingat : bahwa pada dasarnya penguasaan atas milik Belanda (ambil-alih) itu kurang mengandung ketegasan-ketegasan nasionalisasi dan terlihat bahwa pemerintah bertindak setengah-setengah;

Mengingat : bahwa "ambil-alih" milik Belanda tersebut tidak terlepas dari rangkaian Perjuangan Pembebasan Irian Barat dan peran serta buruh di dalamnya;

Menimbang : bahwa kurang adanya ketegasan sikap dari pemerintah terhadap milik Belanda dapat menimbulkan kerugian bagi

kaum buruh pada khususnya dan rakyat Indonesia pada umumnya, baik dalam bidang politik maupun ekonomi; Maka dari itu konferensi memutuskan mendesak kepada pemerintah agar bertindak tegas dalam pengambilalihan perusahaan-perusahaan milik Belanda sebagai tindakan balasan atas perebutan Irian Barat oleh imperialis Belanda.⁴¹

BKS-BUMIL tersebut dibentuk atas usul Gasbiindo (Gabungan Serikat Buruh Islam Indonesia), yaitu Jusuf Wibisono, salah seorang pendiri Gasbiindo, memperingatkan akan munculnya Bahaya Merah di Indonesia dan mengusulkan pembentukan front anti komunis. Front tersebut adalah Front Nasional Pembebasan Irian Barat (FNPIB) yang dibentuk bersama-sama dengan Angkatan Darat dan BKS-BUMIL adalah basis organisasinya.⁴² BKS-BUMIL dan Gasbiindo keduanya menjadi mitra kerja. Dukungan Gasbiindo adalah memberi bantuan kepada penguasa perang (militer) untuk ikut menjaga menyelamatkan alat-alat produksi dan menjaga kelancaran jalannya produksi. Keduanya juga mengontrol dan menghancurkan serikat-serikat buruh yang berpolitik, FNPIB yang dibentuk oleh Angkatan Darat tersebut diperluas secara nasional dengan harapan akan mampu berkompetisi

⁴¹ Arsip SOBSI (1950-1965) No. 240, tanggal 30 Juni 1958.

⁴² Edi Cahyono, *Gerakan Buruh dari Masa ke Masa : Jaman Kolonial Belanda Hingga Orde Baru (Indonesia-1998)*, (Jakarta, 2003) diakses dari www.geocities.com

dengan partai-partai politik untuk mendapatkan massa dan digunakan sebagai alat politik bagi TNI oleh Nasution, namun pada akhirnya FNPIB tersebut tidak berhasil dijadikan alat politik bagi TNI. Nampak sekali bahwa tindakan militer dengan membentuk FNPIB dan BKS-BUMIL pada dasarnya adalah sebagai alat untuk mencegah dan merintanginya munculnya bahaya merah atau komunis dalam gerakan buruh.

Dalam bidang ekonomi, tindakan penempatan pengambilalihan berakibat Belanda hampir hilang sama sekali dalam kehidupan ekonomi di Indonesia. Pada mulanya perusahaan-perusahaan itu dimasukkan ke dalam administrasi militer dan pengambilalihan itu dikatakan hanya bersifat formal tanpa mempengaruhi hak kepemilikan Belanda. Tetapi menjelang akhir tahun 1958 diumumkan suatu peraturan untuk menasionalisasi semua perusahaan Belanda. Pengambilalihan perusahaan milik Belanda tersebut oleh pemerintah kemudian diatur dengan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 1958. Sementara itu tindakan pengambilalihan perusahaan Belanda dan akhirnya menasionalisasikan perusahaan-perusahaan Belanda diatur berdasar Undang-Undang No. 86 Tahun 1958 tentang "Nasionalisasi Persahan-perusahaan Belanda di Indonesia yang dikeluarkan tanggal 27 Desember 1958 yang berlaku surut hingga 3 Desember 1957.⁴³ Baru setelah Belanda

⁴³ Lembaran Negara RI No. 162 Tahun 1958.

menyetujui mengembalikan Irian Barat, Indonesian siap untuk membahas ganti rugi.⁴⁴ Tindakan itu mempunyai pengaruh yang sangat serius terhadap perekonomian Indonesia. Jelas bahwa semua itu tidak pernah direncanakan dan dipersiapkan sebelumnya.⁴⁵

Dengan adanya keterlibatan militer dalam pengambilalihan perusahaan-perusahaan Belanda, maka serikat-serikat buruh mengharapkan agar pemerintah bersikap tegas dalam nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda. Dengan telah diambilalihnya perusahaan-perusahaan Belanda oleh Indonesia dan menjadi milik Indonesia, serikat-serikat buruh dan masyarakat meminta kepada pemerintah agar membatalkan Undang-Undang Penanaman Modal Asing di Indonesia, karena mengingat dengan adanya undang-undang tersebut justru menyebabkan kesulitan hidup masyarakat dan kesejahteraannya tidak meningkat. Dengan adanya undang-undang tersebut telah memberikan keleluasan bagi imperialis Belanda dan kapitalis untuk meraup keuntungan dari Indonesia. Oleh karena itu diputuskan :

- 1. mendesak pemerintah agar Undang-Undang Penanaman Modal Asing yang baru disahkan segera dibatalkan.*

⁴⁴ W.F. Wertheim, *Loc. Cit.*

⁴⁵ *Ibid.*

2. mengajak kepada kaum wanita dan seluruh rakyat untuk lebih bersatu dalam memenangkan tuntutannya.⁴⁶

C. Pengaruh Gerakan SOBSI Cabang Madiun bagi

Kehidupan Politik dan Ekonomi Madiun

Kondisi perpolitikan negara belum juga menunjukkan kestabilan, meskipun telah dikeluarkan SOB maupun Perintah Larangan Mogok dari Penguasa Militer Pusat. Konstituante yang telah mulai bersidang sejak 10 November 1956, yang mana pada masa itu Indonesia diliputi awan gelap yang ditimbulkan oleh pergolakan-pergolakan di daerah-daerah. Dewan Konstituante juga belum menghasilkan undang-undang dasar. Posisi UUD 1945 semakin kuat. Berbagai petisi dan demonstrasi dilancarkan di mana-mana menuntut agar UUD 1945 dinyatakan kembali sebagai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Serikat-serikat buruh melalui Konstituante mendesak konstituante untuk memasukkan hal-hak mogok bagi buruh dan hak-hak demokrasi dalam Undang-Undang Republik Indonesia. Hal itu dilatarbelakangi oleh karena adanya berbagai larangan mogok bagi kaum buruh oleh pemerintah sehingga mengekang kebebasan berdemokrasi. Desakan-desakan untuk memasukkan hak-hak mogok dan hak berdemokrasi

⁴⁶ Arsip Konstituante RI (1956-1960) No. 165 tentang Pembatalan Undang-Undang Penanaman Modal Asing, tanggal 17 Maret 1959.

dalam Undang-Undang RI, antara lain datang dari Serikat Buruh Kementerian Pertahanan Surabaya.⁴⁷ Selain itu desakan untuk memasukkan hak-hak mogok bagi buruh juga datang dari Serikat Buruh Pekerjaan Umum (SBPU) Kediri, yaitu mendesak kepada Ketua Dewan Konstituante Republik Indonesia untuk mencantumkan hak mogok bagi kaum buruh untuk perbaikan taraf hidup.⁴⁸ Serikat Buruh Pegadaian Cabang Blitar dan Tulungagung yang keduanya adalah anggota SOBSI wilayah Jawa Timur juga mengeluarkan pernyataan kepada Konstituante, yaitu supaya Konstituante memasukkan hak mogok bagi kaum buruh dan hak demonstrasi kaum buruh dalam konstitusi (UUD Kesatuan RI).⁴⁹

Dalam suasana demikian, Presiden Sukarno pada tanggal 25 April 1959 menyampaikan amanat kepada Konstituante yang memuat anjuran Kepala Negara dan Pemerintah untuk kembali ke UUD 1945. Amanat presiden tersebut diperdebatkan dalam Konstituante dan akhirnya diputuskan untuk melakukan pemungutan suara. Dari hasil pemungutan suara tersebut menunjukkan bahwa mayoritas dalam Konstituante menghendaki kembalinya UUD 1945, namun jumlah suaranya tidak mencapai dua pertiga dari jumlah

⁴⁷ Arsip Konstituante RI (1956-1960), Agenda No. 1406, tertanggal 14 Februari 1959.

⁴⁸ Arsip Konstituante RI (1956-1960), Agenda No. 2137, tertanggal 24 Februari 1959.

⁴⁹ Arsip Konstituante RI (1956-1960), Agenda No. 2898, tertanggal 20 Maret 1959.

suara yang masuk sebagaimana disyaratkan dalam pasal 137 UUDS 1950.⁵⁰ Pemungutan suara pun diadakan dua kali pada tanggal 1 dan 2 Juni 1959, tetapi kembali gagal mencapai dua pertiga jumlah suara yang dibutuhkan. Kegagalan Konstituante untuk menetapkan UUD serta perdebatan-perdebatan di dalamnya, menyebabkan situasi politik di dalam negeri yang tengah bergolak semakin bertambah gawat.

Setelah konstituante gagal menetapkan UUD 1945 menjadi Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, Presiden Sukarno menetapkan berlakunya kembali UUD 1945 dengan suatu dekrit pada tanggal 5 Juli 1959. Dekrit tersebut mendapat dukungan dari masyarakat. KSAD mengeluarkan Perintah Harian yang ditujukan kepada seluruh anggota TNI untuk melaksanakan dan mengamankan dekrit tersebut. Mahkamah Agung kemudian juga membenarkan Dekrit Presiden tersebut. DPR hasil pemilu, dalam sidangnya pada tanggal 22 Juli 1959 secara aklamasi menyatakan kesediannya untuk bekerja terus berdasarkan UUD 1945.

Dengan berlakunya kembali UUD 1945, maka Kabinet Djuanda (Kabinet Karya) dibubarkan terhitung mulai tanggal 10 Juli 1959, kemudian dibentuk kabinet baru dengan Perdana Menterinya adalah Presiden Sukarno sendiri, sedangkan Ir. Djuanda ditunjuk sebagai Menteri Pertama. Para

⁵⁰ Sekretariat Negara Republik Indonesia, *30 Tahun Indonesia Merdeka 1950-1964*, Op. Cit. ,hal. 140.

anggota kabinet yang dinamai Kabinet Kerja tersebut dilantik pada tanggal 10 Juli 1959. Program kerja kabinet ini adalah disebut "Triprogram", yaitu :

1. sandang pangan

2. keamanan

3. Irian Barat⁵¹

Aksi pemogokan terhadap perusahaan-perusahaan Belanda oleh buruh dan segenap lapisan masyarakat dan juga terjadi pengambilalihan oleh beberapa serikat dagang sayap kiri seperti yang diutarakan oleh militer tersebut telah menyebabkan semakin kritisnya kondisi ekonomi Indonesia. Hal itu terutama sangat terasa di pusat. Keadaan yang perekonomian yang parah menjadi semakin parah oleh adanya pergolakan-pergolakan daerah yang tak kunjung selesai, ditambah lagi dengan perdebatan-perdebatan dalam pemerintahan yang semakin memperuncing masalah. Namun di tahun 1958, pemerintah Indonesia telah berhasil menumpas berbagai pemberontakan yang terjadi di daerah, yaitu PRRI-Permesta. Walaupun begitu persoalan yang dihadapi bangsa Indonesia tidak selesai begitu saja. Hingga pada akhirnya Presiden mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, yaitu diberlakukannya kembali UUD 1945 sebagai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia.

⁵¹ *Ibid.*, hal. 145

Dekret tersebut disambut baik dan mendapat dukungan dari berbagai lapisan masyarakat.

Dengan adanya berbagai aksi pemogokan oleh serikat-serikat tersebut memang menjadikan situasi politik Indonesia semakin rawan. Larangan-larangan mogok bagi kaum buruh meskipun telah dikeluarkan oleh pemerintah, tetapi justru memunculkan reaksi keras dari serikat-serikat buruh. Hal itu menjadikan pemerintah untuk segera bertindak secara tegas terhadap pelanggar-pelanggar larangan tersebut. Pemerintah pun mengambialih pengambialihan semua perusahaan-perusahaan Belanda di Indonesia dari tangan buruh, bahkan pemerintah pun melalui Angkatan Darat membentuk Front Nasional Pembebasan Irian Barat (FNPIB) dan Badan Kerja Sama Buruh Militer (BKS-BUMIL) yang tujuannya adalah untuk mencegah masuknya unsur-unsur sayap kiri ke dalam aksi pemogokan buruh, karena oleh TNI disinyalir bahwa aksi pemogokan buruh tersebut dimanfaatkan oleh sayap kiri melalui serikat dagangnya menghasut agar terjadi tindakan pengambialihan secara independen.⁵²

Gerakan pemogokan terhadap perusahaan-perusahaan Belanda dalam rangka pembebasan Irian Barat yang dilakukan oleh serikat buruh yang sebagian besar tergabung dalam SOBSI Cabang Madiun tersebut juga

⁵² W.F. Wertheim, *Loc. Cit.*

mendapat larangan dari pemerintah melalui Penguasa Militer Daerah. Hal itu dikarenakan dikhawatirkan timbulnya kekacauan-kekacauan yang lebih meluas lagi di daerah-daerah, sehingga aksi-aksi pemogokan oleh buruh tersebut mendapat larangan. Namun pada dasarnya, larangan mogok dari Penguasa Militer tersebut adalah untuk mencegah masuknya bahaya merah dan unsur sayap kiri dalam aksi-aksi tersebut. Situasi politik Madiun dengan adanya aksi-aksi pemogokan buruh tersebut juga dapat dikatakan memperlihatkan ketegangan. Hal itu terlihat dari sikap masyarakat Madiun yang tidak mau terlibat jauh dalam aksi tersebut dan adanya ketakutan sendiri dalam masyarakat, karena dengan adanya aksi tersebut, banyak buruh dan beberapa golongan masyarakat yang ikut diamankan oleh militer, karena aksi-aksi tersebut meresahkan masyarakat.⁵³ Selain itu, aksi-aksi tersebut mendapat larangan dari penguasa militer karena aksi tersebut juga berujung pada tindakan sendiri-sendiri dengan mengambilalih perusahaan-perusahaan Belanda dan hal itu oleh militer dipandang sebagai sesuatu yang berbahaya, karena aksi-aksi buruh telah terhasut oleh sayap kiri melalui serikat buruhnya dan dalam hal itu serikat buruh sayap kiri tersebut adalah SOBSI.⁵⁴

⁵³ Wawancara dengan Marijoen Hardjosoemarto (eks Pejuang Veteran) di Madiun pada tanggal 28 Januari 2004.

⁵⁴ *Ibid.*

Dikatakan pula oleh Marijoen bahwa aksi pemogokan oleh SOBSI tersebut bukan semata-mata untuk pembebasan Irian Barat dan menentang kolonialisme, tetapi aksi SOBSI tersebut juga ingin mencari simpati di mata masyarakat, karena SOBSI adalah di bawah pengaruh komunis, sehingga hal itu untuk melancarkan cita-cita komunis.⁵⁵

Dari pandangan itu, maka perlu digaris bawahi bahwa aksi pemogokan buruh oleh SOBSI itu ada dua hal, yaitu bahwa aksi pemogokan SOBSI adalah bukan aksi sebagai hobi dari kaum buruh⁵⁶, akan tetapi bahwasannya SOBSI adalah organisasi buruh yang anti-kapitalis, anti-imperialis, dan anti-kolonialis yang mewakili kelas buruh yang mempunyai kepentingan yang sama dalam memperjuangkan nasibnya.⁵⁷ Selain itu juga melihat dari kelahiran SOBSI yang dibentuk untuk menampung berbagai persoalan yang dialami buruh dan yang memiliki kepentingan yang sama. SOBSI adalah organisasi yang berasal dari berbagai macam aliran yang lahir pada saat pasangnyanya revolusi di mana seluruh rakyat Indonesia berperang melawan musuh revolusi kaum militeris Jepang dan tentara imperialis, sehingga SOBSI terbentuk

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ Arsip Konstituante RI (1956-1960), Agenda No. 8466.

⁵⁷ Arsip SOBSI (1950-1965), Bag. Pendhuluan.

sebagai hasil persatuan kaum buruh.⁵⁸ Untuk mendukung cita-cita kaum komunis, kaum komunis memang menggunakan barisan-barisan bawah yang diantaranya adalah melalui organisasi-organisasi pemuda, buruh, tani, laskar dan gerakan-gerakan massa lainnya.⁵⁹ Di antara barisan-barisan bawah tersebut adalah buruh, yaitu direpresentasikan oleh SOBSI, karena pada awalnya SOBSI berasal dari BBI di mana orang-orang yang duduk dalam BBI adalah pemuda-pemuda yang dipengaruhi oleh komunis dan pemuda-pemuda yang berasal dari golongan atau aliran lainnya, kemudian dijadikan PBI (namun BBI tetap ada), selanjutnya BBI menjadi GASBI dan GSBV dan pada akhirnya disatukan dalam organisasi yang bernama SOBSI. Pada masa itu, sejumlah kader komuni ikut berperan dalam kemerdekaan Indonesia karena didorong oleh motif idealisme revolusioner mereka dan motif bergerak mereka didorong oleh protes sosial atas tindakan-tindakan tidak adil dari Jepang dan imperialisme Belanda serta pemuda-pemuda yang ada waktu itu tidak berpikir dan bertindak sebagai kader komunis, tetapi karena semangat ideologis dan revolusinya. Sehingga dari aksi pemogokan yang dilakukan buruh SOBSI dan SOBSI Madiun pada khususnya adalah dapat dikatakan karena motif idealisme revolusionernya yang SOBSI memang anti-kapitalis

⁵⁸ *Ibid.*

⁵⁹ Soe Hok Gie, *Op. Cit.*, hal. 80-81.

dan anti-kolonialis, maka muncul aksi-aksi pemogokan oleh SOBSI dalam rangka pembebasan Irian Barat dari tangan kolonialis Belanda dan untuk memperjuangkan nasib buruh dan rakyat dari monopoli asing.

Kedua, aksi pemogokan buruh tersebut telah mendapat hasutan dari sayap kiri/komunis melalui serikat buruhnya, di mana serikat buruh tersebut direpresentasikan oleh SOBSI. Hal itu dikarenakan sebagian besar tokoh yang ada dalam SOBSI adalah orang-orang komunis⁶⁰, sehingga hal itu memperkuat bahwa aksi SOBSI bukan hanya semata-mata untuk membebaskan Irian Barat dan memperjuangkan nasib rakyat dan buruh, tetapi ada tujuan lain. Hal itu diperkuat lagi karena SOBSI selalu bekerjasama dengan kelompok yang sehaluan. Namun hal itu juga bukan berarti bahwa SOBSI adalah onderbow PKI, karena SOBSI menyatakan diri bukan menjadi bagian atau onderbow dari sesuatu partai politik,⁶¹ Akan tetapi pada kenyataannya SOBSI dipengaruhi oleh komunis.

Dikatakan bahwa dengan adanya aksi pemogokan oleh buruh (SOBSI) tersebut juga berdampak bagi perekonomian Indonesia⁶², namun pada dasarnya dengan pengambilalihan perusahaan-perusahaan Belanda yang

⁶⁰ *Ibid*, hal. 87.

⁶¹ Arsip SOBSI (1950-1965), Bag Pendahuluan, *Loc. Cit.*

⁶² Oey Beng To, *Sejarah Kebijakan Moneter Indonesia Jilid I (1945-1958)*, (Jakarta : LPPi, 1992), hal.

semula diambilalih oleh serikat buruh dan pada akhirnya pengambilalihan itu ditempatkan di bawah kontrol militer dan pengambilalihan itu dikatakan hanya bersifat formal tanpa mempengaruhi hak kepemilikan Belanda, tindakan itu berakibat Belanda hampir hilang sama sekali dalam kehidupan ekonomi Indonesia, tetapi karena kurang tegasnya sikap pemerintah dalam hal pengambilalihan tersebut, maka hal itu justru berakibat buruk bagi perekonomian negara, apalagi jika setelah Belanda menyerahkan Irian Barat ke tangan Indonesia, maka Indonesia akan mengganti rugi kepada Belanda. Tentu saja tindakan itu berakibat fatal bagi perekonomian negara, di mana kondisi perekonomian Indonesia tengah mengalami krisis. Sehingga bukan hanya karena aksi oleh SOBSI saja yang mengakibatkan perekonomian semakin kacau, tetapi juga karena tindakan pemerintah yang kurang tegas dalam megambilalih perusahaan-perusahaan Belanda tersebut.

Untuk Madiun sendiri, dengan adanya aksi pemogokan oleh SOBSI, juga mengalami imbasnya, tetapi tidak begitu mempengaruhi perekonomian Madiun. Aksi SOBSI Madiun tersebut memang menimbulkan ketegangan di dalam masyarakat, tetapi masyarakat Madiun tidak begitu merasakan akibatnya dalam kehidupan ekonomi. Menurut keterangan Marijoen, hal itu dikarenakan sikap hidup rakyat Madiun yang mereka tahu hanya bekerja

mencari nafkah dan tidak mau terlalu terlibat dalam ketegangan-ketegangan.⁶³

Walaupun aksi pemogokan buruh oleh SOBSI dibubarkan oleh Penguasa Militer dan pengambilalihan perusahaan-perusahaan Belanda diambil alih oleh militer, buruh SOBSI tetap terus melancarkan tuntutan-tuntutannya. Dalam ulang tahun SOBSI yang ke-13, dalam sambutannya yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 29 November 1959, menghimbau kepada seluruh serikat buruh SOBSI untuk tetap mempertahankan dan mengibarkan panji-panji SOBSI untuk memperkokoh persatuan dan mencapai kemenangan dalam setiap aksi-aksiuntutannya.⁶⁴ Selain itu juga diutarakan oleh SOBSI, bahwa untuk memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan, SOBSI telah menunjukkan keuletan dan ketabahannya dalam memimpin perjuangan buruh dalam:

- 1. melawan agresi Belanda*
- 2. melawan perjanjian KMB*
- 3. melawan PRRI-Permesta, DI/TII*
- 4. melawan intervensi asing Amerika Serikat*

⁶³ Wawancara dengan Marijoen Hardjosemarto (eks Pejuang Veteran) di Madiun tanggal 28 Januari 2004.

⁶⁴ Arsip SOBSI (1950-1965), No. 233, tanggal 29 November 1959.

5. perjuangan dalam pengambilalihan perusahaan-perusahaan Belanda untuk pembebasan Irian Barat
6. memperjuangkan hak demokrasi dan kebebasan serikat buruh untuk perbaikan nasib kaum buruh. Meskipun untuk itu semua banyak rintangan yang dihadapi.⁶⁵

Dikatakan pula oleh SOBSI, bahwa kaum buruh sudah tidak sabar lagi dalam menghadapi tekanan hidup yang semakin berat dan adanya pengekangan kebebasan demokrasi yang memperlemah persatuan. Oleh karena itu menjadi tugas SOBSI dan serikat-serikat buruh anggota untuk memobilisasi dan membangkitkan aksi-aksi massa kaum buruh untuk mendesak dan menuntut kepada pemerintah agar segera melakukan tindakan yang menjamin kesejahteraan hidup kaum buruh dan mencabut larangan kegiatan politik atau rapat-rapat.

Setelah aksi buruh SOBSI dalam pemogokan dan pengambilalihan terhadap perusahaan-perusahaan Belanda dibubarkan oleh pemerintah, selain itu pemerintah juga melarang setiap kegiatan-kegiatan SOBSI yang bersifat politik. Hal itu pula yang mendorong SOBSI untuk mendesak dan menuntut kepada pemerintah agar mencabut larangan untuk melakukan kegiatan atau rapat-rapat SOBSI. Dengan adanya ungkapan dari SOBSI pada perayaan

⁶⁵ Ibid.

ulang tahunnya yang ke-13, maka SOBSI tidak terpengaruh akan adanya pelarangan mengadakan kegiatan-kegiatan, bahkan SOBSI mengajak seluruh buruh untuk bersatu dalam memperjuangkan hak-hak buruh dan menuntut kepada pemerintah agar meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat dan kaum buruh. SOBSI juga menyatakan bahwa SOBSI tidak berhenti begitu saja dengan adanya pelarangan tersebut, justru bagi SOBSI itu adalah tantangan yang harus dihadapi untuk memenangkan aksi-aksinya.

Pada tanggal 31 Desember 1959, melalui Peraturan Presiden No. 13 Tahun 1959, dibentuklah Front Nasional. Menurut Peraturan Presiden, tujuan Front Nasional adalah :

- 1. menyelesaikan revolusi nasional Indonesia*
- 2. melaksanakan pembangunan semesta nasional*
- 3. mengembalikan Irian Barat ke dalam wilayah RI⁶⁶*

Front Nasional yang dibentuk untuk menghimpun seluruh kekuatan nasional itu kemudian dipengaruhi dan akhirnya dikuasai oleh PKI serta simpatisannya dan digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan mereka.

BAB V

⁶⁶ Sekretariat Negara Republik Indonesia, *30 Tahun Indonesia Merdeka 1950-1964, Op. Cit.*, hal. 153.

KESIMPULAN

Lahirnya gerakan buruh di Indonesia tidak lepas dari lahirnya partai-partai politik di Indonesia sesudah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945. Kemerdekaan yang diproklamkan oleh Sukarno-Hatta sebagai pernyataan bangsa yang bebas telah memberi kebahagiaan dan kesadaran seluruh bangsa Indonesia untuk mengisi dan mempertahankan kemerdekaannya. Tumbuhnya kesadaran ini membawa pengaruh bagi rakyat yang secara serentak bersama-sama membentuk kekuatan untuk mencapai cita-cita yang diinginkan. Salah satu kekuatan tersebut adalah golongan buruh yang tidak ketinggalan menampilkan kekuatannya. Apalagi dengan adanya Maklumat 3 November 1945, yaitu pernyataan tentang berdirinya partai politik, maka lahirlah berbagai partai politik, yang diantaranya adalah Partai Buruh Indonesia yang bersama-sama Partai Komunis Indonesia mendukung gerakan buruh. Kelompok komunis, selain mendirikan partai, mereka

juga mendirikan organisasi pemuda, buruh, tani, laskar dan gerakan-gerakan massa lainnya yang dapat mendukung cita-cita kaum komunis dalam masyarakat.

Salah satu organisasi buruh yang anti-feodalisme dan anti-kapitalisme serta anti-kolonialisme adalah SOBSI (Serikat Organisasi Buruh Seluruh Indonesia) yang didirikan pada tanggal 29 November 1946 di Yogyakarta dan disahkan dalam Kongres Nasional tanggal 18 Mei 1947 di Malang. Dalam Kongres Nasional tersebut, SOBSI pada waktu itu masih merupakan organisasi buruh yang sah dari organisasi vak yang ada di Indonesia. Namun seiring dengan pecahnya SOBSI dan keterlibatannya dalam berbagai pemogokan dan dalam Peristiwa Madiun 1948 serta sejak dibentuknya FDR yang semakin tegas sebagai partai politik ekstrem kiri, maka membawa seluruh organisasi onderbow partainya, tak terkecuali SOBSI yang mau tak mau organisasi vak yang ada di dalamnya juga mengandung sikap ekstrem kiri pula.

Secara de facto semenjak Februari 1948, SOBSI merupakan onderbow FDR. Kesejajaran sikap FDR dan SOBSI telah memperjelas hubungan FDR dengan SOBSI, baik secara formal maupun de facto.

Dalam perkembangannya, SOBSI mengalami pasang surut. Demikian halnya kehidupan perburuhan di Indonesia yang mengalami pasang surut dan berbagai persoalan di kalangan buruh. Kondisi perburuhan di Madiun sendiri juga memperlihatkan adanya berbagai persoalan yang dihadapi kaum buruh. Permasalahan-permasalahan tersebut antara lain adalah masalah upah buruh yang jauh dari kelayakan, jaminan sosial yang tidak terpenuhi, masalah pengangguran, masalah perselisihan di antara kaum buruh, dan masalah lainnya. Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh kaum buruh tersebut semakin menunjukkan kekuatiran, apalagi melihat kondisi politik dan ekonomi bangsa Indonesia yang belum menunjukkan kestabilan. Dengan kondisi ekonomi yang krisis tersebut, maka menjadikan naiknya harga-harga

kebutuhan hidup sehari-hari. Tentu saja hal itu sangat mencekik rakyat Indonesia pada umumnya dan buruh khususnya.

Kondisi yang sulit semakin sulit karena masih bercokolnya kolonialis Belanda di Indonesia. Hal itu terlihat dengan semakin maraknya perusahaan-perusahaan Belanda yang berada di Indonesia dan monopoli asing yang semuanya itu merugikan perusahaan-perusahaan nasional dan menghambat jalannya roda pemerintahan dan perekonomian negara, maka aksi-aksi pemogokan buruh tak dapat dihindarkan. Namun aksi-aksi pemogokan buruh tidak berjalan secara lancar, karena pemerintah mengeluarkan berbagai larangan mogok bagi kaum buruh, yang salah satunya adalah Undang-Undang Darurat No. 16 Tahun 1951. Pada dasarnya undang-undang tersebut memenjarakan hak-hak berdemokrasi bagi buruh dan melanggar hak-hak asasi manusia dan tentu saja undang-undang tersebut hanya menguntungkan kapitalis asing. Di tambah lagi

masalah Irian Barat yang masih dalam kekuasaan Belanda, sehingga terjadi sikap kesewenang-wenangan Belanda yang melakukan tindakan kejam hingga menewaskan tujuh rakyat Indonesia yang ada di Irian Barat. Semua itu merupakan faktor penentu untuk munculnya aksi-aksi gerakan dari berbagai lapisan masyarakat yang diantaranya adalah buruh. Dalam hal ini, faktor tersebut oleh Neil.J.Smelser disebut sebagai necessary conduciveness. Berangkat dari fenomena-fenomena tersebut dan faktor-faktor yang disebutkan di atas, maka diberbagai daerah dilancarkan aksi pembebasan Irian Barat yang diikuti oleh segenap lapisan masyarakat, tak ketinggalan kaum buruh ikut ambil bagian di dalam aksi tersebut. Aksi-aksi yang dilancarkan oleh buruh adalah aksi-aksinya melalui pemogokan-pemogokan kerja oleh buruh yang bekerja pada perusahaan-perusahaan Belanda. Dalam aksi-aksi tersebut, SOBSI yang merupakan saluran gerakan buruh dan sikap anti-kapitalisme dan anti-kolonialismenya menjadikan

SOBSI untuk mengambil bagian terdepan dalam aksi-aksi tersebut. Tak ketinggalan SOBSI Madiun juga melakukan aksi pemogokan buruh, di antaranya adalah Serikat Buruh Kereta Api (SBKA). Pada awalnya, aksi anti-Belanda tersebut dipimpin oleh Komite Aksi Pembebasan Irian Barat Pusat (Central Action Committes for the Liberation of West Irian) yang didukung oleh pemerintah. Tetapi pada hari-hari pertama bulan Desember 1957, di beberapa perusahaan, para personel Indonesia memulai tindakan sendiri-sendiri, yaitu mengambilalih perusahaan-perusahaan Belanda. Dalam beberapa kasus yang disinyalir oleh militer, bahwa tindakan tersebut dikarenakan mendapat hasutan dari serikat dagang sayap kiri. Oleh karena itu pemerintah melalui Penguasa Militer, yaitu KSAD Jenderal Nasution mengeluarkan larangan semua tindak lanjut pengambilalihan perusahaan Belanda dan pengambilalihan perusahaan Belanda pada akhirnya ditempatkan di bawah kontrol militer.

Untuk melanjutkan pembebasan Irian Barat, maka dibentuklah Front Nasional Pembebasan Irian Barat (FNPIB) yang berada di bawah kepemimpinan militer dan dibentuk pula BKS-Bumil (Badan Kerja Sama-Buruh Militer) sebagai basisnya. Dibentuknya FNPIB adalah adanya pandangan dari seorang tokoh Gasbiindo (Gabungan Serikat Buruh Islam Indonesia), yaitu Jusuf Wibisono yang menyatakan adanya Bahaya Merah di Indonesia. Oleh militer, Bahaya Merah atau serikat buruh sayap kiri tersebut direpresentasikan dengan SOBSI. Juga diduga oleh militer bahwa aksi SOBSI tersebut bukan semata-mata untuk membebaskan Irian Barat dari kolonialis Belanda, tetapi juga untuk menarik simpati masyarakat. Hal itu dipicu oleh banyaknya tokoh-tokoh komunis yang duduk dalam SOBSI serta SOBSI yang berkiabat ke kiri. Gasbiindo yang menyatakan munculnya Bahaya Merah tersebut menjadi mitra utama BKS-Bumil. BKS-Bumil dan Gasbiindo

*bertugas mengontrol dan menghancurkan serikat-
serikat buruh yang berpolitik,*

Selain karena masuknya sayap kiri dalam aksi pemogokan buruh, aksi-aksi pemogokan oleh buruh SOBSI tersebut mendapat larangan karena berakibat bagi perekonomian negara yang semakin kacau. Namun pada dasarnya bahwa tindakan pengambilalihan terhadap perusahaan-perusahaan Belanda berakibat hampir hilangnya Belanda dalam kehidupan ekonomi Indonesia. Pengambilalihan perusahaan Belanda tersebut pada akhirnya berada dalam administrasi militer dan pengambilalihan itu hanya bersifat formal tanpa mempengaruhi hak kepemilikan Belanda, sehingga hal itu memicu timbulnya protes karena kurang tegasnya sikap pemerintah dalam mengambilalih perusahaan-perusahaan Belanda. Sehingga akhirnya dikeluarkan Undang-Undang Nasionalisasi tahun 1958 untuk menasionalisasi semua perusahaan-perusahaan Belanda. Akan tetapi sangat disayangkan, yaitu keputusan pemerintah Indonesia yang akan mengganti rugi kepada Belanda setelah Irian Barat diserahkan ke Indonesia. Tentu saja tindakan tersebut berakibat fatal bagi perekonomian negara. Jadi bukan hanya aksi SOBSI saja yang menjadi faktor semakin kacanya perekonomian negara, tetapi juga dikarenakan sikap pemerintah tersebut.

Dengan adanya aksi-aksi pemogokan oleh SOBSI juga memunculkan ketegangan-ketegangan dalam masyarakat. Seperti halnya di Madiun, dengan aksi-aksi pemogokan SOBSI tersebut kondisi politik di Madiun juga mengalami imbasnya, yaitu munculnya ketegangan-ketegangan dalam masyarakat, yaitu memunculkan rasa takut masyarakat Madiun karena dengan aksi-aksi pemogokan SOBSI tersebut banyak buruh atau personel-personel tertentu yang diamankan oleh militer, karena aksi-aksi pemogokan tersebut telah termasuk unsur-unsur kiri. Bagi perekonomian Madiun, aksi pemogokan SOBSI tersebut tidak begitu mempengaruhi jalannya perekonomian Madiun, karena dampaknya paling terasa di pusat, sehingga di daerah Madiun tidak begitu dirasakan oleh masyarakatnya.

Aksi pemogokan yang dilancarkan oleh SOBSI pada masa 1957-1959 dapat dilihat bahwa aksi pemogokan oleh SOBSI tersebut adalah sebagai perwujudan SOBSI yang anti-kapitalis dan anti-imperialis dalam melawan kolonial Belanda dalam merebut Irian Barat serta untuk mengajak buruh agar bersatu menuntut majikan agar majikan lebih memperhatikan kesejahteraan buruh. Gerakan buruh tersebut terjadi tidak direncanakan, tetapi terjadi karena situasi kondisi yang tidak nyaman dan bergolak sehingga meledak dalam bentuk aksi pemogokan di beberapa daerah.

Di sisi lain, aksi-aksi yang dilancarkan oleh buruh tersebut adalah karena hasutan kelompok sayap kiri/komunis melalui serikat buruhnya yang diidentifikasi dengan SOBSI. Pandangan ini terutama muncul dari kelompok militer. Sehingga militer berusaha untuk mencegah dan merintangikan bahkan melarang aksi tersebut dengan membentuk Front Nasional Pembebasan Irian Barat serta BKS-Bumil.

DAFTAR PUSTAKA

Dokumen /Arsip

Dewan Nasional SOBSI : Daftar tanggal 20 Juni 1959 tentang alamat anggota Dewan Nasional SOBSI.

Dewan Nasional SOBSI : Artikel tanggal 3 Mei 1955 tentang masalah organisasi yang perlu dipecahkan untuk persatuan kaum buruh dan memperkuat SOBSI.

Dewan Nasional SOBSI : Berkas tanggal 5 November 1955 sampai 1959 tentang gerakan perluasan anggota dan organisasi.

Dewan Nasional SOBSI : Berkas tanggal 13 Maret 1953 sampai Desember 1959 tentang aksi kaum buruh Indonesia.

Dewan Nasional SOBSI : Berkas tanggal 3 Februari 1958 samapi 1959 tentang pengambilalihan modal dan perusahaan asing di Indonesia.

Dewan Nasional SOBSI : Berkas tanggal 28 September 1953 sampai 1959 tentang kesatuan aksi rakyat di daerah otonomi.

Dewan Nasional SOBSI : Resolusi tanggal 28 September 1959 tentang laporan umum Central Commite PKI

Sekretariat Sentral Biro SOBSI : Laporan tanggal 14 Juni 1952 tentang pemogokan SEBDA Jateng

Organisasi Massa dan Politik : Resolusi-resolusi tanggal 8 April 1951-1 Mei 1959 tentang sikap politik terhadap masalah keamanan, kabinet, politik, pendidikan, kesehatan, UU Perkawinan, hak demokrasi, masalah tanah, Irian Barat.

Organisasi massa : Resolusi-resolusi tanggal 12 November 1950-18 Januari 1955 tentang tuntutan undang-undang/peraturan-peraturan yang menguntungkan kaum buruh.

Organisasi massa : Resolusi-resolusi tanggal 28 Februari 1951-17 Maret 1959 tentang tuntutan dicabutnya UU Darurat No. 16/ 1951 tentang larangan mogok bagi kaum buruh.

Organisasi massa dan partai politik : Pernyataan tanggal 3 Maret 1951-17 februari 1959 tentang hak mogok dan hak demokrasi.

Organisasi massa : Surat-surat pernyataan tanggal 1 Maret 1951-15 Desember 1957 tentang tuntutan pembatalan KMB.

Berkas pernyataan mengenai usul agar menormalisasi keadaan

Surat-surat pernyataan mengenai hak mogok dan perburuhan. 1956-1959.

Berkas mengenai pernyataan agar perusahaan-perusahaan dan tanah partikelir milik Belanda diambil alih pemerintah Indonesia. 1957-1959.

Peraturan Menteri Perburuhan No. 90 Tahun 1955

Lembaran Negara No. 162 Tahun 1958 tentang Undang-Undang No. 86 Tahun 1958

Kementerian Pertahanan. Laporan sekitar peristiwa coup/ perebutan kekuasaan di Madiun oleh PKI Musso cs bulan September 1948.

Majalah dan Surat Kabar

.Suri Suroto .”Gerakan Buruh dan Permasalahannya”, *Prisma Nomor 11* Tahun 1982.

Berita Organisasi SARBUPRI, 20 Januari 1955.

Berita Organisasi SARBUPRI, 5 Agustus 1955.

Berita Organisasi SARBUPRI, 19 Oktober 1957.

Harian Boeroeh, 1 Februari 1947.

Harian Boeroeh, 10 April 1947

Harian Umum, 12 Maret 1957

Soeara Boeroeh, 12 Juli 1947.

Suara Rakyat, 8 April 1957.

Suara Sosialis, No. 13, 15 Desember 1951.

C. Buku/Literatur

A.Z. Abidin dan Baharudin Lopa. 1982. *Bahaya Komunisme*. Jakarta : N.V. Bulan Bintang.

Anderson, David Charles. 2003. *Peristiwa Madiun 1948. Kudeta atau Konflik Internal Tentara*. Yogyakarta : Media Pressindo.

Arbi Sanit. 2000. *Badai Revolusi Sketsa Kekuatan Politik PKI di Jawa Tengah dan Jawa Timur*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Bambang Setiaji. 2003. *Ekonomi Serikat Buruh di Indonesia*. Surakarta : UMS Press.

Crouch, Harold. 1986. *Militer dan Politik di Indonesia*. Jakarta : Sinar Harapan.

De Geus, P.B.R. 2003. *Masalah Irian Barat Aspek Kebijakan Luar Negeri dan Kekuatan Militer*. Yayasan Jayawijaya.

Dhakidae, Daniel. 1986. *Nasionalisme dalam Proses Mencari Arti, dalam : Menguk Mitos-Mitos Pembangunan*. Jakarta : Gramedia.

Edi Cahyono. 2002. *Perburuhan dari Masa ke Masa : Jaman Kolonial Belanda Hingga Orde Baru- 1998*. Paper ini dipersiapkan untuk IUF Indonesia Project. Bandung, 18 Juni 2002. Diakses dari www.geocities.com/penebar/essay/kronik_perburuhan.htm.

Ensiklopedi Nasional Indonesia Jilid 3.

Feith, Herbert. 1999. *Pemilihan Umum 1955 di Indonesia*. Jakarta : Gramedia.

_____. 1982. *Pemikiran Politik Indonesia 1945-1965 Suatu Pengantar*. Jakarta : Djambatan.

George Mc. Turnan Kahin. 1952. *Nasionalisme and Revolution in Indonesia*. New York Ithaca : Cornel University Press.

Gottschalk, Louis. 1986. *Mengerti Sejarah*, terjemahan Nugroho Notosusanto. Jakarta : UI Press.

Hersri Setiawan. 2003. *Negara Madiun? Kesaksian Soemarsono Pelaku Perjuangan*. FuSPAD.

Iman Toto K. Rahardjo dan Herdianto WK (ed). 2001. *Bung Karno dan Partai Politik Kenangan 100 Tahun Bung Karno*. Jakarta : PT. Grasindo.

Imam Supomo. 1983. *Hukum Perburuhan bidang Aneka Putusan P4P*. Jakarta : Prandnya Paramita.

Legge, John. D 1985. *Sukarno Sebuah Biografi Politik*. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.

Leirissa, R.Z. 1991. *PRRI-PERMESTA*. Jakarta : PT. Pustaka Utama Grafiti.

Leo Suryadinata. 1992. *Golkar dan Militer*. Jakarta : LP3ES.

M. Fadjoel Rahman. *Partai Sosialis Indonesia dan Perjuangan Ideologi Sosialisme Kerakyatan*. Diakses dari www.msnet.com

Moleong, Lexy. J. 1990. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya.

Mubyarto dan Boediono (ed). 1987. *Ekonomi Pancasila*. Yogyakarta : BPFPE.

Nugroho Notosusanto. 1978. *Masalah Penelitian Sejarah, Suatu Pengalaman*. Jakarta : Yayasan Idayu.

Oey Beng To. 1992. *Sejarah Kebijakan Moneter Indonesia Jilid I (1945-1958)*. Jakarta: LPPI.

Pelzer, Karl. J. 1991. *Sengketa Agraria*. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.

- Peristiwa Madiun 1948*. Diakses dari www.londoh.com
- Reid, Anthoni J.S. 1966. *Revolusi Nasional Indonesia*. Jakarta : Sinar Harapan.
- Sandra. 1961. *Sedjarah Pergerakan Buruh Indonesia*. Djakarta : PT. Pustaka Rakyat.
- Sarjana Sigit Wahyudi, MS. 2001. *Ketika SARBUPRI Mengguncang Pabrik Karung Delanggu 1948*. Semarang : Bendera.
- Sartono Kartodirjo. 1993. *Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodolgi Sejarah*. Jakarta : Gramedia.
- _____. 1982. *Pemikiran dan Perkembangan Historiografi Indonesia*. Jakarta : Gramedia.
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. 1994. *Gerakan 30 September Pemberontakan Partai Komunis Indonesia*. Jakarta.
- _____. 1988. *30 Tahun Indonesia Merdeka (1950-1964)*. Jakarta : PT. Citra Lamtoro Gung Persada.
- Smelser, Neil. J. 1968. *Theory of Collective Behaviour*. New York : The Free Press.
- Soe Hok Gie. *Orang-orang di Persimpangan Kiri Jalan Kisah Pemberontakan Madiun September 1948*, (Yogyakarta : Bentang Budaya, 1997), hal. 69.
- Subhan Sd. 1999. *Langkah Merah Gerakan Partai Komunis Indonesia 1950-1955*. Bentang Budaya.
- Sukarno. *Indonesia dan Pembaharuan Gerakan Buruh di Hubungan Perburuhan Pancasila*. Jakarta.
- Suprpto. 1988. *Peranan Federasi Buruh Seluruh Indonesia Cabang Surakarta Terhadap Kedudukan Buruh (Skripsi Jurusan Ilmu Sejarah Fakultas Sastra dan Seni Rupa UNS)*
- Syamsudin Haris. 1994. *Demokrasi di Indonesia Gagasan dan Pengalaman*. Jakarta : LP3ES.
- Yahya .A.Muhaimin. 1991. *Kebijaksanaan Bisnis dan Politik Ekonomi Indonesia*. Jakarta: LP3ES.
- _____. 1992. *Dinamika Militer dalam Politik di Indonesia 1945-1966*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.

Wertheim, W.F. 1992. *Masyarakat Indonesia dalam Transisi*. Yogyakarta : PT. Tiara Wacana.

DAFTAR INFORMAN

Nama : Marijoen Hardjosoemarto

Umur : 83 tahun

Alamat : Jl. Raya 200 Nglames Telp. (0351) 455010 Madiun 63151

Jabatan : Eks Pejuang Veteran N.P.V.12.012.884

Nama : Saimin

Umur : 78 tahun

Alamat : Jl. Yosodipuro No. 5, Gg. Setia Madiun 63023

Jabatan : Eks Ketua Kesatuan Buruh Marhaenis (KBM) Madiun













































































